

STUDI ANALISIS ISI PEMBERITAAN MEDIA MASSA
TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN BANGKA



Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2 pada
Program Studi Ilmu Lingkungan

Eko Kurniawan
NIM : L4K004005

PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Perumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	11
1.5.1. Manfaat Terhadap Dunia Akademis	11
1.5.2. Manfaat Terhadap Dunia Praktis	11
1.6. Keaslian Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Media Surat Kabar.....	13
2.2. Surat Kabar Sebagai Media Penyebar Informasi Lingkungan	15
2.3. Hak Masyarakat Memperoleh dan Menyampaikan Informasi.	20
2.4. Isu dan Permasalahan Lingkungan Hidup	21
2.5. Proses Kebijakan Lingkungan	25
2.6. Konflik dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan.....	31
2.7. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia.....	33
2.8. Peranserta dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan.....	34
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Strategi Penelitian	37
3.2. Teknik Analisis Isi	38

3.3. Definisi Konseptual.....	39
3.4. Definisi Operasional	40
3.5. Populasi dan Sampel	47
3.6. Unit Analisis.....	48
3.7. Teknik Pengumpulan Data	48
3.8. Reliabilitas Data	49
3.9. Analisis Data	49
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Wilayah.....	51
4.1.1. Geografis, Ekonomi, Sosial dan Kependudukan.....	51
4.1.2. Sejarah Pertambangan Timah	55
4.2. Deskripsi Surat Kabar.....	58
4.3. Analisis Isi Pemberitaan Lingkungan	61
4.3.1. Kategori Bulan Terbit.....	62
4.3.2. Kategori Ukuran Kolom	64
4.3.3. Kategori Halaman Penempatan.....	66
4.3.4. Kategori Ruang Rubrikasi.....	68
4.3.5. Kategori Teknik Penulisan	74
4.3.6. Kategori Nara Sumber	77
4.3.7. Kategori Jumlah Nara Sumber	80
4.3.8. Kategori Tema Berita.....	83
4.3.9. Kategori Substansi Aspek Kebijakan....	87
4.4. Analisis Implikasi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan	91
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	110
5.1.1. Profil dan Isi Pemberitaan Lingkungan .	110
5.1.2. Intensitas dan kualitas pemberitaan Isu Lingkungan	112
5.1.3. Implikasi terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan	113
5.2. Saran-saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1.1.	Hubungan Antara <i>Good Environmental Governance</i> (GEG) dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5
3.5.1.	Populasi dan Sampel Surat Kabar	47
4.1.1.1.	Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Bangka Menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2004.....	52
4.1.1.2.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bangka Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dengan timah)	52
4.1.1.3.	Dana Bagi Hasil Timah yang diterima Kabupaten Bangka Periode 2001 s/d 2005	53
4.1.1.4.	Produk Hukum Pengelolaan Lingkungan Terkait Bidang Penambangan Pemerintah Kabupaten Bangka	54
4.1.1.5.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	55
4.1.2.1.	Sejarah Pertimahan di Kabupaten Bangka	57
4.1.2.2.	Sebaran Tiras Surat Kabar dan Latar Belakang Pembaca Berdasarkan Wilayah	60
4.4.1.	Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Tema Berita dengan Substansi Isi Tahap Kebijakan	93
4.4.2.	Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Nara Sumber dengan Substansi Isi Tahap Kebijakan	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.5.1.	Tahap-tahap Kebijakan	27
2.5.2.	Siklus Kebijakan	28
2.5.3.	<i>Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation</i>	36
3.4.1.	Alur Pikir Studi.....	46
4.3.1.	Jumlah Sampel Pemberitaan Lingkungan.....	62
4.3.1.1.	Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Bulan Terbit Tahun 2005	63
4.3.2.1.	Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Ukuran Kolom	65
4.3.3.1.	Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Halaman Penempatan	67
4.3.4.1.	Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Rubrikasi	69
4.3.4.2.	Massa Bakar Tujuh Kamp TI.....	72
4.3.4.3.	Perlu Komitmen Bersama Soal TI	72
4.3.4.4.	Peringati Hari Air Sedunia DPD ASWD Bersih Kolong	73
4.3.5.1.	Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Teknik Penulisan Berita	75
4.3.6.1.	Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Nara Sumber.....	78
4.3.7.1.	Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Jumlah Nara Sumber	81
4.3.8.1.	Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Tema Berita	84
4.3.9.1.	Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Substansi Isi Tahap Kebijakan.....	88
4.3.9.2.	Sumber Air Tercemar, Warga Ngadu ke Dewan	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Matrik Instrumen Penelitian Studi Analisis Isi Pemberitaan Media Massa Tentang Lingkungan Hidup Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bangka
Lampiran 2	: <i>Coding Manual</i> Studi Analisis Isi Pemberitaan Media Massa Tentang Lingkungan Hidup Implikasinya Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bangka
Lampiran 3	: <i>Coding Sheet</i> Sampel berita Bangka Pos
Lampiran 4	: <i>Coding Sheet</i> Sampel berita Bangka-Belitung Pos
Lampiran 5	: <i>Coding Sheet</i> Sampel berita Rakyat Pos
Lampiran 6	: Tabel Frekuensi

ABSTRACT

As a concept, communication and policy influence each other. Empirically such relation is reflected in public perception when responding to environmental issues and problems. Mass media as a social institution contributes to such process. There are many sensitive environmental issues in Indonesia, especially related to mining. This study is aimed at observing the relationship of environmental communication with environmental management in Bangka Regency.

The aim of this qualitative-type research is to analyze the content of newspapers and to identify its implication toward environmental management policy in Bangka Regency. Scope of this study covers environmental news in Bangka Pos, Babel Pos and Rakyat Pos newspapers published from January 1, 2005 to December 31, 2005. This analytical method is matched with depth interview in this research. Data collection was done through coding manual instruments, coding sheet and interview guide. The analysis was done with qualitative descriptive and quantitative, presented in frequency table and bar diagram. The result of interview was employed to enrich the analysis.

Result of the research shows that Bangka Pos is the most intensive newspaper presents environmental news (47.86%), compared to Babel Pos (32.48%) and Rakyat Pos (19.66%). However, environmental news was mostly (95.73%) written in small column of less than 75 cm/column by these three newspapers, and mostly (66.67%) in news form. From writing technique point of view, straight news was the most popular (88.51%). All of them tend to use single informant (80.34%), with bureaucrats become the most popular target (37.32%), followed by journalists (24.65%), and the people in general (16.29%). The most commonly written issue is environmental impact (32.48%), followed by environmental law (27.35%) and environmental policy (20.51%). Among these issues, mining is the most frequently written. Based on the writing substance, agenda setting (47.86%) and implementation policy (37.61%) news category are mostly found, with evaluation only 8.55%.

Implication for social control aspect is the opening of space for critics, input and demand for policy. In the policy aspect there is betterment in the environmental management planning in Bangka Regency with the increase of public participation. There is more room for the media to actively control and aggregating stakeholders' interest in environmental management. The media is expected to optimize its role for policy control and become a communication forum among stakeholders. The government is expected to be more responsive, enhance its coordination and consistency in enforcing the law, as well as keep its transparency and accountability. Most importantly, the media should open its space for the society to actively participate in environmental management.

Keywords : newspaper, environmental communication, environmental policy.

ABSTRAK

Secara konseptual aspek komunikasi dan aspek kebijakan memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Dalam tataran empiris hubungan tersebut tercermin pada persepsi masyarakat ketika merespon isu dan permasalahan lingkungan. Media massa sebagai institusi sosial memiliki kontribusi terhadap hal tersebut. Banyak berita tentang isu dan masalah kebijakan lingkungan yang sensitif di Indonesia, khususnya terkait dengan bidang pertambangan yang selalu menarik perhatian publik. Studi ini hendak melihat interelasi komunikasi lingkungan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka.

Tujuan penelitian dengan tipe kualitatif ini hendak menganalisis isi surat kabar dan mengetahui implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka. Ruang lingkup studi ini mencakup pemberitaan lingkungan di surat kabar Bangka Pos, Babel Pos dan Rakyat Pos periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005. Metode analisis isi dipadukan dengan teknik wawancara mendalam kepada sumber diterapkan pada penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan teknik *coding manual*, *coding sheet* dan panduan wawancara. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan bar diagram. Hasil wawancara digunakan untuk mempertajam analisis.

Berdasarkan intensitas pemberitaan, Bangka Pos paling intensif memuat isu dan masalah lingkungan dibanding Babel Pos dan Rakyat Pos. Ini terlihat dari tingginya frekuensi pemberitaan Bangka Pos (47,86%), sementara itu Babel Pos (32,48%) dan Rakyat Pos (19,66%). Pada dimensi tata letak pemakaian kolom kecil oleh ketiga surat kabar dengan ukuran di bawah 75 cm/kolom cenderung tinggi dengan total 95,73%. Sedangkan rubrik artikel berita (66,67%) merupakan pilihan yang paling sering digunakan oleh ketiga surat kabar. Sementara itu dari aspek teknik penulisan, teknik *straight news* merupakan pilihan tertinggi dengan jumlah 88,51% yang dipakai ketiga surat kabar. Berdasarkan nara sumber ketiga surat kabar cenderung tinggi dalam penggunaan narasumber tunggal (80,34%). Birokrat paling kerap dijadikan narasumber (37,32%), diikuti wartawan (24,65%), dan masyarakat (16,29%). Isu yang kemunculannya tinggi adalah isu dampak lingkungan (32,48%). Disusul oleh isu hukum lingkungan (27,35%) dan kebijakan lingkungan (20,51%). Dari ketiga isu tadi eksekusi penambangan adalah permasalahan yang sering ditulis. Berdasarkan substansi isi, berita yang sering muncul adalah berita berkategori tahap penyusunan agenda yakni (47,86%) dan tahap implementasi kebijakan yakni (37,61%), sedangkan tahap evaluasi hanya (8,55%).

Implikasi pada aspek kontrol sosial terbukanya ruang untuk kritik, *input* dan tuntutan kebijakan. Pada aspek kebijakan terlihat adanya perbaikan perencanaan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka dengan meningkatnya partisipasi masyarakat. Pada aspek media semakin terbukanya peran media untuk aktif mengontrol dan menjembatani *stakeholders* dalam pengelolaan lingkungan. Sebagai Rekomendasi, media disarankan mengoptimalkan peran melalui peningkatan kinerja dan kapasitas wartawannya untuk mengontrol kebijakan serta aktif menjadi forum komunikasi antar *stakeholders*. Pemerintah diharapkan lebih responsif, meningkatkan keterpaduan dan SDM, konsisten menegakkan aturan, serta transparan sehingga akuntabilitasnya terjaga, dan yang terpenting senantiasa menumbuhkan sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

Kata Kunci : Surat Kabar, Komunikasi Lingkungan, Kebijakan Lingkungan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amsyari dalam Hardjasoemantri (2005), menyebutkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia akan mempengaruhi eksistensinya, hal tersebut disebabkan manusia yang sangat tergantung pada lingkungannya. Karena manusia, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat merupakan bagian dari lingkungannya, maka manusia juga adalah pengelola lingkungan tersebut.

Lingkungan hidup telah menjadi isu utama pada hampir setiap negara di dunia. Beberapa pertemuan yang membahas pentingnya pengelolaan lingkungan dapat dilacak sejak tahun 1972 yang menghasilkan Deklarasi Stockholm (Soemarwoto,1991). Kemudian tahun 1987 *World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam laporannya berjudul *Our Common Future*, mempopulerkan istilah Pembangunan Berkelanjutan (Soerjani,2000). Yang paling komprehensif menghasilkan kebijakan pengelolaan lingkungan yaitu pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 atau lebih dikenal *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) dengan Agenda 21-nya (Hardjasoemantri,2005).

Dalam Agenda 21 yang merupakan rencana kerja global pertama yang disusun secara menyeluruh mengenai pembangunan berkelanjutan, konsep-konsep kemitraan, keterpaduan, partisipasi, peran serta, pemberdayaan dan sebagainya semakin jelas kedudukannya dalam pengelolaan lingkungan (Hardjasoemantri,2005). Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna memenuhi harapan sebagaimana konsep di atas adalah memberikan pendidikan, penyadaran kepada masyarakat tentang lingkungan. Pendek kata semua pihak (*stakeholders*) dalam hal ini

pemerintah, masyarakat, maupun swasta sudah selayaknyalah mengambil peran secara proporsional dalam pengelolaan lingkungan.

Inti dari semua pertemuan tingkat dunia yang membahas persoalan lingkungan tadi apabila disimpulkan ternyata memberikan pemahaman bahwa pokok persoalan lingkungan berawal dari persoalan-persoalan kebijakan atau regulasi-regulasi yang dibuat. Banyak kebijakan pembangunan selama ini tanpa disadari sangat merugikan lingkungan. Berangkat dari hal tersebutlah kemudian masyarakat dunia mulai melahirkan konsep pembangunan berkelanjutan yang orientasinya ingin memihak kepada lingkungan. Namun meski Agenda 21 dengan konsep pembangunan berkelanjutan itu telah diintrodusir lebih dari 14 tahun silam kenyataannya masih belum memberikan hasil yang menggembirakan. Faktor kebijakan dan regulasi yang dibuat penentu kebijakan lagi-lagi disinyalir menjadi pokok penyebabnya.

Indro Sugianto, Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), dalam Evaluasi Akhir Tahun Bidang Lingkungan tahun 2005 menyebutkan bahwa pengarusutamaan isu pembangunan berkelanjutan dalam pengambilan kebijakan dinilai semakin kabur (Kompas, 2005). Hal tersebut terlihat dari ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Padahal menurut Indro, sebelumnya terlihat jelas para *stakeholders* dalam hal ini pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan akademisi memperlihatkan langkah yang sama untuk mengarusutamakan isu pembangunan berkelanjutan. Kejadian tersebut menjelaskan betapa sampai saat ini aspek kebijakan dan regulasi yang dibuat masih sering berseberangan dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Kesepakatan nasional untuk lebih serius menerapkan konsep Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia tercetus pada Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan pada bulan Januari 2004 di Yogyakarta (Hardjasoemantri, 2005). Salah satu kesepakatan yang dicapai dan diterima dalam konferensi tersebut adalah mengembangkan

dan memanfaatkan komunikasi dan informasi. Dalam konteks pengelolaan lingkungan tentunya mengembangkan dan memanfaatkan komunikasi dan informasi tidak hanya dipahami sebagai upaya penyediaan informasi dan upaya memberikan informasi lingkungan secara linier satu arah, dari atas ke bawah (*top down*) atau sebaliknya (*bottom up*), tapi bagaimana pertukaran arus informasi terjadi secara interaktif (*dialogis*).

Meskipun sebagai suatu konsep, komunikasi lingkungan itu sendiri masih sangat jarang diangkat ke permukaan untuk di wacanakan, setidaknya komunikasi lingkungan telah hadir tanpa disadari. Ambil contoh pemberitaan yang dibuat Kompas di atas sebetulnya adalah suatu aktifitas komunikasi media yang dikoordinir oleh sekelompok orang dan secara langsung memberikan pengetahuan kepada kita bahwa pembangunan berkelanjutan masih belum terwujud secara nyata. Apa yang diberitakan Kompas tadi, setidaknya menjadi bahan masukan dalam rangka evaluasi kebijakan. Hal ini juga menjelaskan bahwa kepedulian *stakeholders* dalam hal ini pers sangat dibutuhkan. Bahkan tidak hanya pers, lebih utama lagi seluruh masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Pers sesuai dengan fungsinya mungkin memiliki karakteristiknya sendiri ketika menjalankan perannya. Pada konteks ini lebih tepat sebagai fungsi kontrol dan fungsi informasi, sekaligus sarana untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan (*policy demands*) bagi masyarakat umum ataupun kelompok masyarakat, dalam rangka kesertaannya menjalankan peran pengelolaan lingkungan.

Sebagaimana pers, masyarakat dalam segala manifestasinya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para cerdik pandai, maupun masyarakat umumnya, dapat menyampaikan gagasannya sebagai wujud peran sertanya dalam pengelolaan lingkungan. Apa yang ingin disampaikan dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, secara langsung ataupun tak langsung. Langsung dipahami sebagai adanya pertemuan tatap muka, sementara itu tidak langsung dipahami sebagai bermedia, artinya lewat saluran media. Entah itu media massa maupun tidak. Terpenting, pesan yang disampaikan dapat dijadikan *in put* bagi

pengambil kebijakan publik, dalam hal ini kebijakan pengelolaan lingkungan. Berkenaan dengan tuntutan terhadap kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada lingkungan, maka *pressure* masyarakat harus ada, dalam hal ini media massa dapat dijadikan sarana (Purnaweni, 2004).

Peran pers atau media massa, yang dalam hal ini sebagai bagian dari *Civil Society* tentunya sangat penting dalam kerangka pengelolaan lingkungan. Substansi dari hal ini telah sangat jelas diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keterkaitan antara media massa dan kebijakan pengelolaan lingkungan, dapat pula ditinjau dari konsep *good governance*, karena pada hakekatnya, prinsip *good governance* mempersyaratkan adanya partisipasi dan transparansi, yang menjadi kunci penting dalam keterlibatan *stakeholders* terutama berkaitan urusan pemerintahan, utamanya yang menyangkut *public Policy*.

United Nations Development Program (UNDP) dalam Tangkilisan (2004), menyebutkan beberapa karakteristik *good governance* sebagai berikut ; *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Effetiveness and efficiency, Accountability*. Kemudian, *Indonesian Centre for Environmental Law* (ICEL) dalam Hadi (2001), mempersyaratkan lima hal yang harus ada agar konsep *Good Governance* berjalan, antara lain; lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsi kontrol dan penyalur aspirasi masyarakat, pengadilan yang mandiri, bersih dan professional, birokrasi yang responsif dan berintegritas, masyarakat sipil yang kuat sebagai fungsi kontrol, serta desentralisasi dan lembaga perwakilan yang kuat.

Sementara itu dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, konsep *Good Governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih dikenal dengan *Good Environmental Governance* (GEG) setidaknya mengedepankan 10 hal antara lain; Visi

strategis, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, partisipasi, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme (Santosa, 2006). Kesepuluh prinsip tersebut saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri yang harus menjadi karakteristik pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai semangat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Berikut gambar hubungan *Good Environmental Governance* (GEG) dengan pengelolaan lingkungan hidup :

Tabel 1.1.1. Hubungan Antara *Good Environmental Governance* (GEG) dengan pengelolaan lingkungan hidup

<i>Good Environmental Governance (GEG)</i>	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP						
	UU No.23 Th 1997 ttg PLH & UU No.32 Th 2004 ttg Pemda						
	Penataan Ruang	Pemanfaatan	Pengembangan	Pemeliharaan	Pemulihan	Pengawasan	Pengendalian Lingkungan
<i>Visi-Strategic</i>	Pembangunan Berkelanjutan						
<i>Law Enforcement</i>	Sanksi Administratif dan Pidana						
<i>Transparency</i>	Keterbukaan Informasi						
<i>Equality</i>	Pemanfaatan, Perlindungan/Pemeliharaan SDA& LH						
<i>Responsiveness</i>	Preemtif, Preventif, Represif, Kuratif, Rehabilitatif						
<i>Participation</i>	Mitra dan Kemitraan Sesama Stakeholders						
<i>Accountability</i>	Finansial, Moral/Etik, Normatif dan Politik						
<i>Control/check</i>	Monitor dan Evaluasi/Pengawasan (Riset dan Pengembangan)						
<i>Efficiency-effectiveness</i>	Mangkus dan Sangkil (Daya Guna dan Hasil Guna)						
<i>Professional</i>	Peran Genuine(ahli) Pelaku Pemangku Kepentingan						

Sumber : Santosa (2006)

Sayangnya kenyataan di lapangan menunjukkan *stakeholders* belumlah optimal dalam menjalankan perannya sesuai tuntutan di atas, namun dapat dipahami apa yang dipersyaratkan ICEL tersebut hingga saat ini kondisinya memang belum memungkinkan. Hadi, (2002) mensinyalir belum adanya sinergi yang baik antara pihak yang berkepentingan. Ia menyebutkan tidak ada sinergi diantara masyarakat sipil dalam mengontrol kebijakan pembangunan, semuanya berjalan sendiri-sendiri dan terkesan parsial. Padahal apabila tindakan mereka terorganisir bukan tidak mungkin masyarakat sipil dapat menjadi kelompok penekan untuk mengedepankan isu-isu lingkungan. Pemanfaatan media

massa sebagai saluran dalam menyampaikan aspirasi tadi merupakan salah satu cara untuk membentuk opini publik sehingga dapat direspon oleh Pengambil Kebijakan.

Pemanfaatan media massa sebagai sarana mengkampanyekan sekaligus penyebaran informasi lingkungan telah sering dilakukan. Lacey dan Longman serta Parlour dan Schatzow dalam Hannigan (1995), menyebutkan pada periode akhir 1960-an sampai awal 1970-an ulasan media terhadap lingkungan meningkat secara dramatis, untuk pertama kalinya isu lingkungan dipandang oleh para jurnalis Inggris dan Amerika sebagai kategori berita utama.

Di Propinsi Bangka Belitung sejak kehadiran pers, isu-isu dan persoalan lingkungan pun tak luput dari perhatian media. Persoalan lingkungan khas daerah sudah menjadi bagian dari pemberitaan surat kabar lokal. Namun demikian belum diketahui secara pasti seperti apa karakteristik pemberitaan yang disajikan oleh surat kabar lokal tersebut dan bagaimana pula pengambil kebijakan menyikapi persoalan-persoalan lingkungan yang ditulis oleh surat kabar tersebut.

Dalam perspektif komunikasi, pertautan media dalam ranah kebijakan publik dapat dilihat menggunakan pendekatan analisis isi media. Melalui analisis isi media, akan dapat dipahami seperti apa sebetulnya pers memandang isu dan permasalahan lingkungan dan bagaimana pula pers menjalankan fungsi-fungsinya, terlebih dalam konteks kebijakan pengelolaan lingkungan.

Beberapa penelitian pernah dilakukan berkenaan dengan pemanfaatan media massa, khususnya surat kabar dalam menginformasikan isu lingkungan. Salah satunya apa yang dilakukan oleh Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI) dalam studi analisis isinya pada tahun 1995. Hasil studi tersebut menjelaskan bahwa hampir semua surat kabar besar lokal dan nasional menyediakan ruang untuk berbagai pemberitaan lingkungan. Dua surat kabar yang menjadi

media penyebar utama isu-isu lingkungan adalah Kompas dan Media Indonesia.

Studi analisis isi lainnya pernah dilakukan oleh Nuryadi (2003). Dalam studinya tersebut, Nuryadi lebih melihat pada karakteristik tiga surat kabar ibukota yakni, Kompas, Koran Tempo, dan Sinar Harapan dalam menyajikan informasi lingkungan hidup.

Sampai saat ini belum ada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana pemberitaan lingkungan yang dilakukan media massa khususnya surat kabar implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi peneliti untuk melakukan suatu studi analisis isi mengenai pemberitaan lingkungan yang dilakukan surat kabar lokal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung kemudian implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan khususnya di Kabupaten Bangka.

1.2. Identifikasi Masalah

Meskipun dalam perspektif komunikasi, lingkungan sering menjadi isu dan masalah kebijakan pembangunan yang sensitif, namun hingga kini masih jarang dilakukan kajian yang khusus menelaah tentang implikasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dari sudut pandang komunikasi khususnya melalui analisis isi berita.

Secara konsepsional aspek komunikasi dan aspek kebijakan memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Dalam tataran empiris hubungan tersebut tercermin pada persepsi seseorang dalam merespon isu dan permasalahan lingkungan hidup. Dalam hal ini media massa sebagai salah satu institusi sosial memiliki kontribusi yang besar terhadap persepsi seseorang.

Sebagai salah satu alat yang digunakan pada aktifitas komunikasi, media memiliki peran sangat penting untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Hubungan media dengan *Good Environmental*

Governance menjadi penting mengingat proses pengambilan suatu kebijakan tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi *stakeholders*, dalam hal ini media menjadi wahana untuk menciptakan ruang interaksi pada proses pengambilan kebijakan tadi (Suranto dkk, 2005). Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup peran media dapat dilakukan dengan cara mempromosikan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, memonitor dan mengawasi (kontrol) terhadap kebijakan, dan terpenting menyuarakan tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*) berkenaan dengan pengelolaan lingkungan.

Di Bangka Belitung persoalan kerusakan lingkungan masih sering terjadi, padahal pemberitaan tentang hal tersebut telah sering dilakukan oleh surat kabar lokal. Beberapa persoalan ditengarai menjadi penyebab misalnya :

- Media massa sebagai salah satu alat yang digunakan dalam aktifitas komunikasi khususnya untuk menyampaikan informasi lingkungan masih memiliki keterbatasan, sehingga masih belum optimal menjalankan fungsinya dalam kerangka pengelolaan lingkungan.
- Kebijakan pembangunan dan regulasi yang dilahirkan tanpa disadari sangat merugikan lingkungan, hal ini sebagai akibat dari belum adanya keterpaduan dalam membuat kebijakan. Kelemahan ini terindikasi pada berbagai aspek seperti, kelembagaan lingkungan, sumberdaya manusia, penegakan hukum lingkungan dan sederet persoalan lainnya.
- Belum berjalannya konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dicita-citakan juga adalah salah satu sebab. Konsep-konsep kemitraan, partisipasi, peran serta, pemberdayaan dalam pengelolaan lingkungan belum optimal dilaksanakan. Hal ini terlihat dari masih lemahnya peran *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

Dari beberapa hal tadi maka komunikasi lingkungan menjadi penting. Peran surat kabar dalam rangka pengambilan suatu kebijakan publik tentunya tak dapat dikesampingkan. Studi ini hendak melihat interelasi antara komunikasi lingkungan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan. Jadi fokus kajiannya adalah analisis pemberitaan lingkungan hidup di surat kabar.

1.3. Perumusan Masalah

Peranan media massa dalam menyebarkan informasi yang diperlukan masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui (*Public's right to know*) dan lembaga pers berperan memenuhinya. Tidak hanya itu, hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia (HAM), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya".

Sementara itu mengenai hak masyarakat akan informasi lingkungan secara spesifik dinyatakan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan yang berbunyi "Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan." Selain itu pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan tersebut menyatakan "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat".

Berdasarkan kenyataan di atas, analisis isi surat kabar mengenai pemberitaan lingkungan dan implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka menjadi sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana pers melakukan perannya, kemudian

bagaimana pula pengambil kebijakan di daerah merespon pemberitaan-pemberitaan tersebut dalam kebijakan publik berkenaan dengan pengelolaan lingkungan.

Penelitian ini akan mengamati aspek pemberitaan lingkungan serta aspek kebijakan pengelolaan lingkungan. Peneliti tidak bermaksud menguji kedua aspek tersebut. Penelitian ini pada satu sisi hanya melakukan analisis isi terhadap pemberitaan lingkungan yang ada di surat kabar, kemudian untuk melihat implikasinya peneliti mewawancarai pengambil kebijakan dan LSM serta redaktur surat kabar untuk mengetahui persepsi mereka tentang pemberitaan lingkungan dan kebijakan pengelolaan lingkungan tersebut. Berangkat dari uraian di atas maka permasalahan yang ingin diketahui jawabannya, yaitu : "Bagaimana sesungguhnya pemberitaan lingkungan disajikan oleh surat kabar lokal dalam hal ini harian pagi Bangka Pos, Bangka Belitung Pos, dan Rakyat Pos dan bagaimana pula implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka? ". Adapun pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Bagaimana isi pemberitaan surat kabar Bangka Pos, Bangka Belitung Pos, dan Rakyat Pos tentang lingkungan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
2. Bagaimana intensitas dan kualitas pemberitaan lingkungan pada surat kabar Bangka Pos, Bangka Belitung Pos, dan Rakyat Pos di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung?
3. Bagaimana implikasi pemberitaan lingkungan terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan profil isi pemberitaan lingkungan pada surat kabar Bangka Pos, Bangka Belitung Pos, dan Rakyat Pos di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Mendeskripsikan intensitas dan kualitas pemberitaan pada surat kabar Bangka Pos, Bangka Belitung Pos, dan Rakyat Pos tentang lingkungan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Mendeskripsikan implikasi berita terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat terhadap dunia akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan yang berkenaan dengan konsep komunikasi lingkungan, khususnya yang berkenaan dengan pemberitaan surat kabar tentang lingkungan implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan.

1.5.2. Manfaat terhadap dunia praktis

Keterangan-keterangan yang didapatkan dari hasil penelitian ini setidaknya diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan terhadap upaya perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang analisis isi media sejauh ini telah banyak dilakukan, termasuk topik-topik lingkungan, namun tulisan mengenai analisis isi media dalam hal pemberitaan surat kabar tentang lingkungan implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan belum pernah dilakukan. Terlebih yang terfokus pada surat kabar lokal di Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh sebab itu dapat dikatakan tulisan ini bersifat orisinal. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan analisis isi media antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Nuryadi (2003), mengenai analisis isi informasi lingkungan hidup di beberapa surat kabar, antara lain Kompas, Koran Tempo, dan Sinar Harapan. Penelitian tersebut tujuannya hendak mengkaji karakteristik surat kabar dalam menampilkan informasi lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga surat kabar tadi berupaya menyajikan berita lingkungan hidup secara berimbang, akurat, jelas dan obyektif.

Selain itu penelitian tentang surat kabar menggunakan analisis isi pernah pula dilakukan oleh Litbang Kompas bersama Zentra Media, Undip (2003). Penelitian tersebut ingin melihat obyektivitas media, dalam hal ini Kompas, Republika, Media Indonesia, dan Koran Tempo menyajikan konflik di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Penelitian dilakukan selama tiga tahap periode Mei s/d September 2003. Hasil penelitian menunjukkan ada kesamaan pola antara keempat surat kabar dalam menyajikan berita-berita konflik Aceh, tapi tidak dalam hal yang berkenaan dengan prinsip jurnalisme damai (netralitas pers).

Penelitian analisis isi yang dilakukan oleh Henry Subiakto (2000), juga berkenaan dengan obyektivitas pemberitaan pers nasional. Subiakto mengambil 8 surat kabar lokal maupun nasional sebagai obyek studinya, antara lain; Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaharuan, Surya, Jawa Pos, Suara Merdeka, Pikiran Rakyat, dan Republika. Periode pemberitaan yang diteliti adalah Januari s/d April 2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suara Pembaharuan, Kompas, Suara Merdeka, dan Media Indonesia cenderung obyektif dibanding dengan surat kabar lain dalam hal keakurasian pemberitaan, validitas nara sumber, dan ketidakberpihakan pada pihak manapun.

Beberapa penelitian ini memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan penelitian analisis isi tentang pemberitaan lingkungan implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan. Subyektivitas tak terhindarkan dalam pemilihan obyek serta lokasi penelitian. Harapan penulis orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

`BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Media Surat Kabar

Media tidak hanya sekedar penyebar informasi. Media memiliki sejumlah tanggung jawab ikut aktif melibatkan diri dalam interaksi sosial dan kadangkala menunjukkan arah atau memimpin, serta berperanserta dalam menciptakan hubungan dan integrasi. Dalam masyarakat, media bergerak dengan ditandai oleh adanya penyebaran kekuasaan, yang diberikan kepada individu, kelompok, dan kelas sosial secara tidak merata.

McQuail (1989), menyebutkan media seringkali dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk melakukan salah satu atau lebih dari beberapa hal seperti : menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi pilihan sikap, memberikan status dan legitimasi, mendefinisikan dan membentuk persepsi realitas.

Salah satu media yang sering digunakan dalam membentuk persepsi realitas sebagaimana disebutkan di atas adalah surat kabar. Surat kabar telah lama dipergunakan untuk penyebaran informasi. Sejalan dengan berjalannya waktu, surat kabar tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi saja, tetapi banyak fungsi yang dapat diberikan oleh surat kabar. Suwardi (1993) menjelaskan bahwa fungsi-fungsi dari surat kabar adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi menyiarkan informasi, berbagai informasi dengan cepat dan akurat dapat disampaikan oleh surat kabar. Pembaca menjadi pembeli ataupun berlangganan surat kabar karena ingin mengetahui informasi apa yang terjadi di berbagai tempat di dunia.

- b. Fungsi mendidik, surat kabar secara tidak langsung memberikan fungsi pendidikan pada pembacanya. Ini bisa dilihat dari materi isi seperti artikel, *feature* dan juga tajuk. Materi isi tersebut disamping memberikan informasi juga menambah perbendaharaan pengetahuan pembacanya walaupun bobot pemahaman tiap pembaca berbeda-beda.
- c. Fungsi mempengaruhi, berita pada surat kabar secara tidak langsung mempengaruhi para pembacanya, sedangkan tajuk rencana dan artikel dapat memberikan pengaruh langsung kepada pembacanya. Pengaruh ini pada mulanya timbul dari persepsi pembaca terhadap suatu masalah yang kemudian membentuk opini pada pembacanya.

Menurut Suwardi (1993), umumnya isi dari suatu surat kabar terdiri dari berita utama yang terletak di halaman depan, berita biasa, rubrik opini, reportase, wawancara, *feature*, iklan, cerita pendek, cerita bergambar, dan lain-lain. Semua komponen itu diramu sedemikian rupa agar pembaca tertarik membaca dan menjadi pelanggan surat kabar itu.

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Proses komunikasi akan berlangsung dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut : sumber, pesan, saluran, penerima dan efek. Menurut McQuail (1989), komunikasi merupakan suatu proses dimana seorang individu (komunikator) menyampaikan rangsangan biasanya dalam simbol-simbol verbal untuk mengubah perilaku individu lain (komunikan).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa saluran atau media merupakan salah satu unsur penting dalam proses komunikasi. Saluran komunikasi sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu saluran personal dan saluran massa atau media massa yang kerap disebut dengan komunikasi massa.

Menurut Devito (1996), komunikasi massa adalah komunikasi dengan radio, televisi, surat kabar, majalah, hasil rekaman radio kaset dan piringan hitam. Dengan begitu, media massa dapat diklasifikasikan menjadi media massa cetak dan media massa elektronik. Surat kabar sebagai salah satu media massa cetak merupakan lembaga yang menyebarkan informasi atau berita sebagai karya jurnalistik kepada masyarakat.

Peranan media massa memberitakan informasi yang diperlukan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam pasal 6 point (a) Undang-Undang tersebut dinyatakan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang diperlukan dan dalam hal ini lembaga pers berkewajiban memenuhinya.

Menurut Effendi (1993), surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri ; publisitas (isi surat kabar tersebut disebarluaskan kepada publik), periodisitas (surat kabar terbit secara teratur setiap hari, seminggu sekali atau dua minggu), universalitas (isi surat kabar tersebut bersifat umum yang menyangkut segala aspek kehidupan) dan aktualitas (yang dimuat surat kabar mengenai permasalahan aktual).

2.2. Surat Kabar Sebagai Media Penyebar Informasi Lingkungan

Fungsi media massa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tersebut berbunyi : "Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial". Sementara peranan pers nasional sebagai media untuk mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, benar dan melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran dinyatakan dalam pasal 6 (point c,d,e) Undang-Undang tersebut.

Penggambaran fungsi media massa secara lebih jelas dikemukakan Schramm dalam Jahi (1993), ia mengemukakan tiga fungsi media massa dalam pembangunan :

1. Memberi tahu tentang pembangunan nasional, memusatkan perhatian mereka pada kebutuhan untuk berubah, kesempatan untuk menimbulkan perubahan, metoda dan cara menimbulkan perubahan dan jika mungkin meningkatkan aspirasi.
2. Membantu rakyat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog dan menjaga agar informasi mengalir baik keatas maupun kebawah.
3. Mendidik rakyat agar memiliki keterampilan.

Sebagai agen perubahan sosial, menurut Rachmadi (1989), surat kabar memiliki beberapa tugas yang dapat dilakukan untuk menunjang pembangunan, yaitu :

1. Memperluas cakrawala pandangan. Dalam hal ini melalui surat kabar orang mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi di negara-negara lain.
2. Memusatkan perhatian masyarakat dengan pesan-pesan yang ditulisnya. Pada masyarakat modern, gambaran tentang lingkungan yang jauh dari mereka diperoleh dari surat kabar dan media massa lainnya. Dalam hal ini masyarakat mulai menggantungkan pengetahuan pada surat kabar dan media massa lainnya.
3. Menumbuhkan aspirasi. Dengan penguasaan media, suatu masyarakat dapat mengubah kehidupan mereka dengan cara meniru apa yang disampaikan oleh media tersebut.
4. Menciptakan suasana membangun, Melalui surat kabar dan media massa lainnya dapat disebarluaskan informasi kepada masyarakat. Surat kabar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan membangun simpati, memusatkan tujuan pembangunan sehingga tercipta suasana pembangunan yang serasi dan efektif.

Sesuai perannya, surat kabar dapat digunakan untuk menyampaikan informasi lingkungan. Penyebaran informasi lingkungan sangat diperlukan mengingat berbagai kegiatan pembangunan memiliki kaitan erat dengan isu lingkungan dan isu lingkungan memiliki kaitan erat dengan kualitas hidup manusia. Surat kabar bersama media massa lainnya terbukti berperan membangun kesadaran publik akan pentingnya upaya mengelola lingkungan yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Menurut Atmakusumah (1996), surat kabar ikut menyumbang berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan masalah lingkungan untuk membangkitkan kesadaran itu.

Lembaga Pers Dr. Sutomo dalam Atmakusumah (1996) mengungkapkan, media massa memiliki tiga misi utama di bidang lingkungan:

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan masalah-masalah lingkungan.
2. Merupakan wahana pendidikan untuk masyarakat dalam menyadari perannya dalam mengelola lingkungan hidup.
3. Memiliki hak mengoreksi dan mengontrol dalam masalah pengelolaan lingkungan hidup.

Assegaff (1996) mengungkapkan, dari sekian banyak masalah pembangunan dewasa ini, lingkungan merupakan objek pemberitaan yang kian mendapat sorotan. Menurutnya, kecenderungan ini muncul karena persoalan lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai kegiatan pembangunan. Disamping masyarakat semakin menyadari arti penting lingkungan yang baik bagi mereka. Hal tersebut menjadikan masyarakat lebih tertarik pada berita-berita mengenai penciptaan pelestarian lingkungan, dan proyek-proyek yang berupaya memulihkan lingkungan yang rusak seperti proyek reboisasi lahan kritis, perbaikan daerah aliran sungai, pencemaran industri dan sebagainya.

Menurut Assegaff, tulisan tentang lingkungan di surat kabar biasanya dalam bentuk berita, *feature* dan tajuk rencana. Menurutnya, dalam pemberitaan masalah lingkungan akhir-akhir ini tengah berkembang bentuk jurnalistik baru yang dikenal sebagai jurnalistik proses. Bentuk jurnalistik ini tidak hanya memberitakan fakta suatu peristiwa yang terjadi, akan tetapi juga memotret secara mendalam proses yang berlangsung yang telah menciptakan peristiwa tadi.

Jurnalistik proses, contohnya, menggambarkan ancaman terjadinya penggurunan di daerah-daerah subur dengan tujuan memberitahu sejak dini kepada masyarakat tentang bahaya yang sedang mengancamnya. Dalam tulisannya, wartawan mengungkapkan bagaimana proses tersebut terjadi, apa penyebabnya dan tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan apa yang sedini mungkin dapat diambil pemerintah dan lembaga terkait, sekaligus menyadarkan masyarakat tentang apa yang harus dilakukan untuk mencegah gangguan yang mengancam kelestarian kemampuan alam.

Beranjak dari pemahaman tersebut, Assegaff menyarankan, penulisan masalah lingkungan sebaiknya menggabungkan jurnalistik proses dan model penulisan mendalam (*in-depth reporting*), sebagai salah satu jenis penulisan *feature*. Hal tersebut disebabkan karena, menurutnya, penulisan dalam bentuk *feature* atau berita yang hanya mengungkapkan kenyataan-kenyataan kerusakan lingkungan kurang dapat menggerakkan penghayatan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian kemampuan lingkungan. Sementara tulisan *feature* yang menyertakan jurnalistik proses lebih dapat menggambarkan pentingnya upaya membina kelestarian kemampuan lingkungan.

Menurut Friedman dalam Atmakusumah (1996), untuk membuat tulisan yang lebih mendalam tentang lingkungan, penulisan jurnalistik lingkungan perlu menjawab pertanyaan lebih dari satu "*what*", "*who*", "*why*" dan "*how*". Misalnya, apabila terjadi suatu peristiwa alam, penulis laporan tidak hanya mencari informasi tentang "apa yang terjadi", melainkan juga

“apa persoalan yang ditimbulkannya”, “apa pemecahannya”, dan “apa pula yang harus dilakukan”. Kemudian “siapa yang terkena dampak peristiwa itu”, “siapa yang bertanggung jawab”, “siapa yang bertindak mengurus persoalan ini”, dan “siapa pula yang menanggulangi pemecahannya”. Perlu pula dipertanyakan “mengapa timbul dampak dari peristiwa itu” dan “mengapa seseorang harus bertanggung jawab”. Selain itu, “bagaimana terjadinya peristiwa itu”, dan “bagaimana menghadapi persoalan itu”.

Peran media massa dalam menggerakkan kesadaran masyarakat tentang persoalan lingkungan tergambar dalam berbagai penelitian di luar negeri. Staats, Wit dan Midden (1996), contohnya, mengemukakan bahwa kampanye bahaya efek rumah kaca di Belanda melalui media massa baik cetak maupun elektronik terbukti meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Sekalipun memang kampanye itu sendiri tidak terbukti secara langsung mampu mengubah kebiasaan masyarakat yang mengancam lingkungan.

Meskipun demikian menurut Messick, Brewer (1983), dan Liebrand, Messick, Brewer (1992), kampanye melalui media massa tetap perlu diperhitungkan. Karena meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan persoalan lingkungan menjadi kunci sukses untuk memecahkan masalah sosial terkait. Artinya, persoalan lingkungan hanya mungkin bisa dipecahkan manakala ada banyak masyarakat yang mengetahui dan menyadari persoalan lingkungan yang berkembang.

Kenyataan senada ditemukan dalam studi Ader dalam Szerszynsi (1991). Ader mengemukakan bahwa media massa berperan nyata dalam menggerakkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat Inggris. Dalam studi yang menghubungkan pemberitaan lingkungan di media massa dan opini publik, terbukti media massa memberikan pengetahuan dan pemahaman akan persoalan lingkungan yang berkembang dan

memperbesar peluang munculnya upaya-upaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

2.3. Hak Masyarakat Memperoleh dan Menyampaikan Informasi

Komunikasi merupakan hak asasi manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa komunikasi. Hakekat komunikasi sendiri adalah penyampaian informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan. Para ahli filsafat komunikasi sepakat tentang kebebasan komunikasi. Menurut mereka kebebasan komunikasi dalam peradaban manusia adalah kebebasan yang melekat secara alamiah pada diri semua orang tanpa kecuali.

Oleh karena itu kebebasan komunikasi harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Sementara dalam pasal 14 ayat (2) dinyatakan : “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

Sementara itu mengenai hak masyarakat memperoleh informasi lingkungan, secara spesifik dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tersebut berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup”.

Keberadaan ayat tersebut antara lain yang membedakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang yang digantikannya yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1982. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982, hak masyarakat atas informasi lingkungan sama sekali tidak disinggung. Hal ini menandakan informasi mengenai

lingkungan merupakan sesuatu yang penting sehingga negara perlu menjamin kemudahannya untuk diperoleh masyarakat. Terbukanya akses informasi lingkungan memang merupakan langkah awal yang diharapkan dapat menggerakkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan perlunya pengelolaan lingkungan yang benar demi terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. Ikut sertanya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan sesuatu yang mutlak mengingat persoalan lingkungan selalu bermuara kepada manusia.

Adapun penjelasan pasal 5 ayat (2) tersebut berbunyi “Hak atas informasi lingkungan merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan akan meningkatkan nilai dan efektivitas peranserta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan yang baik dan sehat”.

Hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat dijamin dalam pasal 5 ayat (1) UUPH, yakni “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat”. Sementara hak dan kewajiban masyarakat berperanserta dalam pengelolaan lingkungan dinyatakan dalam pasal 5 ayat (3): “Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2.4. Isu dan Permasalahan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, adalah kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Soerjani (1997), berpendapat bahwa lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan buatan atau binaan, serta lingkungan sosial. Masalah lingkungan pada saat ini, erat dihubungkan dengan persoalan pembangunan. Menurut A.R. Soehoed dalam Soerjani (1997), pada hakekatnya lingkungan dan pembangunan merupakan dua rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan adalah hasil dari perbuatan manusia guna mewujudkan suatu lingkungan penghidupan baru yang seharusnya lebih baik dari sebelumnya.

Soemarwotto (1991) mengatakan, interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya sangat kompleks sehingga pengaruh terhadap suatu unsur akan merembet ke unsur lain, sehingga pengaruhnya terhadap manusia sering tidak dapat segera terlihat atau dirasakan.

Menurut Abrar (1993), permasalahan lingkungan biasanya menyangkut gangguan terhadap keseimbangan sumberdaya di lingkungannya. Problema lingkungan buatan biasanya menyangkut cara hidup manusia mengatur penggunaan sumberdaya alam yang ada. Namun, jika sumberdaya tersebut tidak dimanfaatkan secara benar malah akan mengganggu kehidupan manusia.

Lebih lanjut Abrar menyebutkan bahwa, setiap permasalahan yang menyangkut lingkungan, tidak semua mendapat perhatian oleh pers untuk diinformasikan kepada masyarakat. Sebab, pers baru tertarik bila permasalahannya menjadi sebuah isu. Isu dalam konteks ini dimaknai sebagai suatu topik penting dan menarik perhatian untuk didiskusikan. Pada tingkatan tertentu isu-isu yang berkembang tapi tidak mendapat tanggapan berarti dari pihak-pihak berkepentingan akan menjelma menjadi suatu masalah.

Menurut Hardjasoemantri (2005), pemberian informasi yang benar kepada masyarakat adalah prasyarat yang paling penting untuk peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan. Informasi tersebut harus sampai di tangan masyarakat yang

akan terkena rencana kegiatan dan informasi itu haruslah diberikan tepat pada waktunya, lengkap dan dapat dipahami.

Secara umum Soemarwoto (1994) mengungkapkan, masalah lingkungan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) masalah lingkungan udara, (2) masalah lingkungan darat, (3) masalah lingkungan air. Dari ke tiga permasalahan tersebut apabila dijabarkan lebih lanjut dapat diuraikan menjadi : masalah dalam pembangunan pertanian tanaman pangan, masalah dalam pembangunan perkebunan, masalah dalam pembangunan kehutanan, masalah dalam pembangunan perikanan kelautan, masalah dalam pembangunan industri, masalah dalam pencemaran air, masalah dalam pencemaran udara, masalah dalam perkembangan penduduk, masalah dalam pembangunan permukiman dan masalah dalam perkembangan teknologi.

Dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009, Hardjasoemantri (2005), disebutkan beberapa permasalahan pokok berkenaan dengan lingkungan hidup antara lain :

- a. Terus menurunnya kondisi hutan Indonesia.
- b. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- c. Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak.
- d. Citra pertambangan yang merusak lingkungan.
- e. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*)
- f. Pencemaran air semakin meningkat.
- g. Kualitas udara, khususnya di kota-kota besar, semakin menurun.
- h. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan.
- i. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas.
- j. Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu.
- k. Rendahnya kapasitas pengelolaan kehutanan.

- l. Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan.
- m. Belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan Negara tetangga.
- n. Potensi kelautan belum didayagunakan secara optimal.
- o. Merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak.
- p. Pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal.
- q. Sistem mitigasi bernuansa alam belum dikembangkan.
- r. Ketidakpastian hukum di bidang pertambangan.
- s. Tingginya tingkat pencemaran dan belum dilaksanakannya pengelolaan limbah secara terpadu dan sistematis.
- t. Adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) belum dilaksanakan.
- u. Alternatif pendanaan lingkungan belum dikembangkan.
- v. Isu lingkungan global belum diterima dan diterapkan dalam pembangunan nasional dan daerah.
- w. Belum harmonisnya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
- x. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.

Beberapa yang disebutkan di atas paling tidak sebagian pernah diungkapkan surat kabar lokal di Bangka Belitung dalam pemberitaannya. Tentunya sebagaimana dikatakan oleh Hardjasoemantri (2005), mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat membuat kebijakan dan aturan-aturan berupa produk hukum di daerahnya. Dalam hal ini tentu sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah masing-masing. Hadi (2002), menyebutkan bahwa hukum memiliki peran yang amat penting dalam membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut menurutnya, aturan yang baik haruslah memuat prinsip-prinsip keberlanjutan, berkeadilan dan demokratis (*good norms*). Untuk itu

mempersyaratkan proses yang baik (*good process*), caranya antara lain dengan mengikutsertakan seluruh *stakeholders* sejak awal.

2.5. Proses Kebijakan Lingkungan

Thomas R. Dye dalam Thoha (2002), memaknai kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Dalam pemahaman tersebut, maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi termasuk juga segala yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu menurut Anderson dalam Winarno (2005), kebijakan merupakan arah tindakan yang jelas dan ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah. Konsep tersebut lebih menekankan pada apa yang dilakukan bukan pada apa yang diusulkan. Lebih lanjut menurut Anderson, sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dirinci menjadi beberapa kategori, seperti : tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), dan dampak-dampak kebijakan (*outcomes*).

Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, di tujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai sesuatu masalah tertentu. Biasanya tuntutan-tuntutan ini diajukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat dan mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus “berbuat sesuatu” sampai usulan agar pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatu persoalan.

Keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), dipahami sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Yang termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah menetapkan aturan-aturan, memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.

Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Yang termasuk kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), merupakan manifestasi nyata dari kebijakan-kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan (*action*) menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Sementara itu dampak-dampak kebijakan (*outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

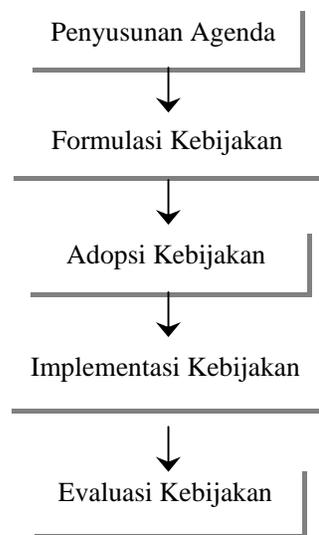
Ketika pers memberitakan isu-isu dan permasalahan lingkungan yang ada di Bangka Belitung, pada saat itu sebetulnya dapat dikatakan bahwa pers telah menjalankan fungsi dan perannya dalam rangka menyuarakan tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*). Sampai pada tahap ini tentunya tugas pengambil kebijakanlah yang harus tanggap untuk merespon dan memasukkan *demands* tersebut kedalam proses penyusunan suatu kebijakan.

Ada beberapa tahap yang dilalui dalam proses suatu kebijakan publik. Winarno (2005), menyebutkan antara lain; tahap penyusunan

agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pada setiap tahap ini tentunya sangat memungkinkan media memiliki kontribusi terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan, tentunya sesuai karakteristik setiap tahapan. Badjuri dan Yuwono (2003) menyebutkan, setiap tahapan dalam siklus kebijakan masih memerlukan pendapat publik sesuai derajat kepentingannya. Tentunya pendapat publik ini, salah satunya dapat dilacak melalui media yang ada.

Berikut digambarkan bagaimana proses suatu kebijakan dibuat dari tahap awal sampai dengan kebijakan siap dievaluasi.

Gambar 2.5.1. Tahap-tahap Kebijakan



Sumber. Winarno, 2002

Menurut Winarno, ada beberapa faktor yang mendorong suatu isu masuk ke agenda kebijakan. Pertama, isu-isu publik akan mencapai status agenda karena suatu krisis atau peristiwa kritis. Kedua, agar suatu masalah menjadi agenda kebijakan adalah dengan melakukan protes. Ketiga, adalah perhatian media massa terhadap suatu isu.

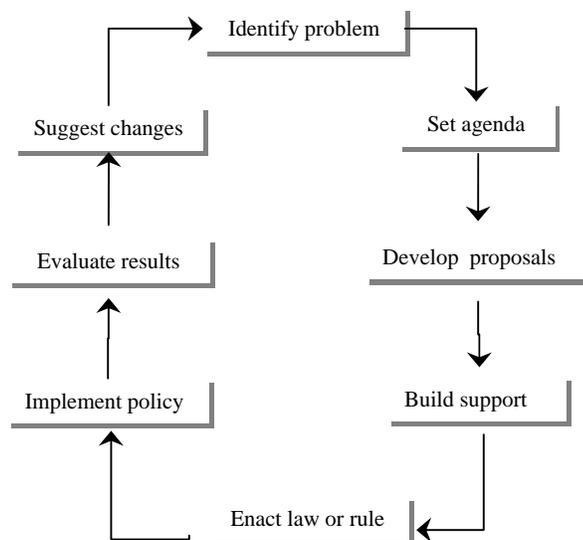
Sementara itu, Cunningham (2005), menyebutkan ada beberapa tahap dalam pembuatan suatu kebijakan. Ia menyebutkannya sebagai

siklus kebijakan. Siklus kebijakan dimulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan (*identify problem*), menentukan agenda (*set agenda*), perumusan (*develop proposals*), dukungan (*build support*), menetapkan kebijakan berupa aturan (*enact law or rule*), implementasi kebijakan (*implement policy*), evaluasi (*evaluate result*), dan saran perubahan (*suggest change*).

Menurut Cunningham untuk menyampaikan tuntutan dalam siklus kebijakan terkadang dapat dilakukan dengan cara melakukan *pressure* melalui media. Hal ini pernah dilakukan oleh masyarakat Amerika, ketika terjadi tumpahan minyak di pantai California Selatan pada tahun 1969. Ketika itu dengan menggunakan media televisi dan beberapa aksi lain, masyarakat berupaya memobilisasi opini publik agar kongres dapat merespon tuntutan mereka. Kejadian ini menunjukkan betapa opini publik sangat mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan publik, dan media menjadi salah satu agen untuk memobilisasi opini publik tersebut.

Siklus kebijakan menurut Cunningham tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.5.2. Siklus Kebijakan



Sumber. Cunningham, 2005

Berkenaan dengan media dan kebijakan lingkungan, Hannigan (1995), menyebutkan bahwa media sangat berperan sebagai agen pendidikan lingkungan sekaligus membentuk agenda kebijakan. Lebih lanjut Hannigan mengatakan agar isu-isu dan permasalahan lingkungan ataupun tuntutan-tuntutan (*policy demands*) bidang lingkungan tersebut mendapat perhatian di dalam suatu arena proses politik pengambilan kebijakan maka perhatian media terhadap isu-isu dan permasalahan lingkungan tersebut menjadi sangat penting. Hannigan mengatakan :

In moving environmental problems from conditions to issues to policy concerns, media visibility is crucial. Without media coverage it is unlikely that an erstwhile problem will either enter into the arena of public discourse or become part of the political process. (Hannigan, 1995).

Best dalam Hannigan (1995), mengatakan bahwa ketika membuat tuntutan-tuntutan untuk kepentingan kebijakan lingkungan paling tidak harus memperhatikan tiga hal yakni : sifat tuntutan, orang yang membuat tuntutan dan proses pembuatan tuntutan. Tiga hal ini sangat penting dalam proses politik pengambilan suatu kebijakan.

Berkenaan dengan sifat tuntutan tersebut dibutuhkan alasan yang jelas berdasarkan fakta dan data yang akurat dalam pembuatan suatu tuntutan kebijakan. Pendefinisian masalah secara tepat disertai contoh-contoh permasalahan dan estimasi berdasarkan angka-angka terhadap permasalahan yang menjadi tuntutan akan semakin memudahkan pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan tuntutan dalam proses suatu kebijakan. Untuk melakukan itu semua dibutuhkan orang-orang yang betul-betul memiliki kredibilitas dan integritas, dalam hal ini bisa dari kalangan LSM maupun para profesional. Yang terpenting dari pembuatan suatu tuntutan kebijakan adalah memberikan saran atau alternatif solusi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

Hannigan (1995), menyebutkan ada enam faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyampaikan tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*) bidang lingkungan antara lain :

1. Tuntutan harus benar dan memenuhi kaidah ilmiah.
2. Keberadaan orang yang dikenal untuk menjembatani faham lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan.
3. Perhatian media yang menggambarkan masalah sebagai sesuatu yang penting.
4. Dramatisasi masalah secara visual dan simbolis.
5. Imbalan bagi yang melakukan tindakan positif (insentif).
6. Adanya dukungan dari lembaga yang *legitimate* dan kesinambungan.

Winarno (2005), menyebutkan beberapa faktor yang mendorong suatu isu masuk ke agenda kebijakan. Pertama, isu-isu publik akan mencapai status agenda karena suatu krisis atau peristiwa kritis. Kedua, agar suatu masalah menjadi agenda kebijakan adalah dengan melakukan protes. Ketiga, adalah perhatian media massa terhadap suatu isu. Lebih lanjut menurut Winarno dalam beberapa penelitian berkenaan dengan peranserta warga negara, terungkap bahwa para pembuat kebijakan lebih responsif terhadap warga negara yang mempunyai peranserta.

Kehadiran media dalam kaitannya dengan kebijakan menjadi sangat penting. Salah satu unsur penting dari media yang makin bebas dan kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah tersedianya informasi yang terbuka bagi masyarakat untuk menunjukkan kinerja macam apa yang ditunjukkan oleh para pejabat dalam menjalankan mandat mereka sebagai pemerintah lokal. Pippa Noris dan Dieter Zinnbauer dalam Suranto (2005), menyebutkan bahwa "Dalam masyarakat modern, ketersediaan informasi sangat penting artinya untuk mengukur kualitas pembuatan keputusan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa hal tentang informasi yang terbuka, berguna untuk masyarakat, menjadi penting artinya bagi pengembangan masyarakat, terutama untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai sasaran yang telah disusun sebelumnya. Tidak

hanya itu terbukanya akses terhadap media akan membuka ruang demokrasi dan memberikan peluang terjadinya kebebasan berekspresi, dan memberi kesempatan kepada berbagai kelompok masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya, khususnya guna memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam rangka peranserta masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan terutama menyangkut kepentingan mereka.

Menurut Mas Achmad Santosa dalam Suranto (2005), pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas 5 hal, yaitu :

1. Hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (*right to observe*)
2. Hak untuk memperoleh informasi (*right to information*)
3. Hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (*right to participate*)
4. Kebebasan berekspresi, yang salah satunya diwujudkan dalam kebebasan pers
5. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan dari pelaksanaan hak-hak di atas tersebut.

2.6. Konflik dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Bruce Mitchell dkk (2003), menyebutkan bahwa perubahan, kompleksitas, ketidakpastian, dan konflik adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Keempat hal tersebut menjadi penting karena dapat mendatangkan peluang sekaligus masalah bagi para perencana, pengelola, pengambil keputusan, serta anggota masyarakat lainnya. Mengenali keempat elemen tersebut dan memahami bagaimana keempatnya saling berpengaruh memberikan peluang untuk mengetahui bagaimana yang seharusnya dan apa yang dapat dilakukan untuk menuju suatu perubahan yang positif.

Dampak pengembangan sumberdaya atau pemakaian lingkungan biasanya menghasilkan keuntungan dan biaya yang mempunyai implikasi berbeda terhadap kepentingan berbagai kelompok. Hampir tidak dapat disangkal, bahwa satu atau lebih kelompok akan merasa tidak diuntungkan, dan akan melakukan protes melawan usulan kebijakan atau pembangunan yang berkaitan dengan pemakaian sumberdaya dan lingkungan. Oleh sebab itu dalam konteks pengambilan suatu kebijakan menjadi penting adalah bagaimana melibatkan seluruh komponen atau *stakeholders* yang terkait langsung dengan suatu isu dan permasalahan.

Perbedaan dan pertentangan kepentingan yang sering muncul dalam pengalokasian sumberdaya dan pengambilan keputusan merefleksikan adanya perbedaan pandangan, ideologi maupun harapan. Sebagai contoh, Kebijakan yang diambil pemerintah dalam proyek lahan gambut satu juta hektar di Kalimantan memperlihatkan bagaimana suatu kebijakan diambil hanya dilandasi pertimbangan politik sehingga aspek lain seperti lingkungan terabaikan. Dalam pembuatan kebijakannya sendiri tidak mengakomodir partisipasi masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Dalam kondisi tersebut telah terjadi apa yang disebut dengan konflik struktural.

Menurut Malik dkk (2003), konflik struktural itu adalah konflik yang terjadi karena adanya ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Lebih lanjut dikatakannya bahwa hal tersebut diakibatkan oleh faktor struktural di mana pola hubungan tak seimbang yang mendudukan negara (aparatur birokrasi pemerintahan, DPR, militer) berperan sebagai pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal menetapkan kebijakan umum dan mengambil keputusan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam. Fakta menunjukkan bahwa penguasaan atas sumber-sumber daya alam memungkinkan akses dan kontrol terpusat pada aparatur negara. Praktis, pemusatan kekuasaan itu lebih menguntungkan sebagian kecil golongan masyarakat yang dekat dengan penguasa-penguasa negara.

Bryant dalam Mitchell dkk (2003), mencatat bahwa suatu kebijakan dikembangkan tidak dalam situasi hampa, tetapi melalui suatu proses interaksi dan negosiasi antar banyak kelompok kepentingan yang berjuang untuk mempengaruhi perumusan dan isi suatu kebijakan. Banyaknya kebijakan yang berdampak terhadap sumberdaya dan lingkungan telah memberikan keyakinan bahwa kepentingan kelompok-kelompok yang terkait dengan isu-isu lingkungan seperti, instansi pemerintah, perusahaan nasional dan multinasional, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya akan saling tumpang tindih.

2.7. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia

Di Indonesia, secara formal kebijakan pengelolaan lingkungan telah memiliki acuan yang jelas yakni, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lahirnya Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, tak terlepas dari pertimbangan bahwa kesadaran masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup semakin berkembang. Hal tersebut apabila diperhatikan paralel dengan hasil-hasil beberapa pertemuan tingkat global tentang lingkungan yang senantiasa mengedepankan aspek partisipasi atau peranserta dalam pengelolaan lingkungan. Di dalam paradigma pemerintahan *Good Environmental Governance (GEG)*, atau tata kelola lingkungan yang baikpun telah secara jelas disebutkan bahwa aspek partisipasi adalah salah satu hal penting dalam peran pengelolaan lingkungan tersebut.

Demikian pula halnya dengan pers atau surat kabar. Sesuai dengan fungsi yang dimilikinya jelas pers sangat penting untuk menginformasikan, membangkitkan kesadaran dan membuka ruang partisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Di dalamnya tersirat bahwa dengan perannya tersebut pers pun diharapkan dapat membangkitkan peran *stakeholders* lain.

Winarno (2005), menyebutkan dalam beberapa penelitian terungkap bahwa pembuat kebijakan cenderung menerima tuntutan-tuntutan dan pilihan-pilihan agenda yang diusulkan oleh kelompok warga negara yang berperanserta dalam rangka memecahkan masalah.

Sementara itu dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa “Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”. Dalam konteks ini keterpaduan jelas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan. Keterpaduan dapat dimaknai sebagai suatu keadaan di mana tersedianya ruang untuk berpartisipasi, adanya kondisi yang menjamin transparansi serta para pengambil kebijakan publik yang responsif, sebagaimana karakteristik *Good Environmental Governance (GEG)*.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia dalam salah satu programnya menjelaskan, ada tiga komponen utama yang dapat menjadi motor untuk menjamin efektifnya mekanisme pengelolaan lingkungan guna memenuhi tuntutan pembangunan berkelanjutan. Komponen tersebut antara lain :

- i) Masyarakat yang sadar lingkungan, mempunyai keberdayaan dalam berperanserta pada pengambilan keputusan untuk kepentingan umum, dan mendapatkan informasi yang benar dan mutakhir.
- ii) DPR/DPRD yang peka dan paham pada aspirasi masyarakat bidang pembangunan berkelanjutan, serta
- iii) Pemerintah yang peka akan aspirasi dan mampu melaksanakan *Good Environmental Governance (GEG)*.

2.8. Peranserta dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Peranserta masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan suatu keputusan tentang proyek, program ataupun kebijakan.

Hal ini mengingatkan bahwa masyarakatlah yang akan merasakan dampak dari suatu proyek maupun kebijakan. Oleh sebab itu kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam upaya perencanaan suatu kebijakan. Hadi (1999) menyebutkan bahwa masyarakat adalah "*local expert*" tentang lingkungan disekitarnya, sehingga layak didengar pendapat dan gagasannya agar program dan proyek yang akan dilakukan *workable*. Di samping itu keberlanjutan dari proyek, program dan kebijakan akan terjamin jika masyarakat diikutsertakan.

Menurut Hadi (1999), ada beberapa pandangan tentang peranserta ditinjau dari kualitas :

1. Peranserta sebagai kebijaksanaan, dalam hal ini informasi yang berupa pendapat, aspirasi dan *concern* dari publik akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
2. Peranserta sebagai strategi, dalam konteks ini partisipasi hanyalah dianggap sebagai alat untuk memperoleh dukungan publik.
3. Peranserta sebagai komunikasi, hal ini didasarkan anggapan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi dan *concern* masyarakat.
4. Peranserta sebagai media pemecahan publik, dalam hal ini partisipasi ditujukan untuk pencapaian suatu konsensus.
5. Peranserta sebagai terapi sosial, peranserta dilakukan untuk menyembuhkan "*penyakit sosial*" seperti rasa keterasingan, kurang percaya diri.

Sherry Arstein dalam Hadi (1999), pada artikelnya "*Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation*", membedakan peranserta berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam program atau perencanaan yang menerangkan perbedaan peranserta yang "*sumir*" dengan "*real*" yang mempengaruhi hasil dalam perencanaan. Dalam gambar terlihat sebagai berikut :

Gambar 2.5.3.

Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation

8	<i>Citizen Control</i>	— Degrees of Citizen Power
7	<i>Delegated Power</i>	
6	<i>Partnership</i>	
5	<i>Placation</i>	— Degree of Tokenism
4	<i>Consultation</i>	
3	<i>Informing</i>	— Non Participation
2	<i>Therapy</i>	
1	<i>Manipulation</i>	

Sumber : Arstein, Sherry R dalam Hadi (1999)

Pada tingkat (1) *manipulation* dan (2) *therapy* disimpulkan sebagai tingkat yang bukan peranserta atau “*non-participation*”. Tujuan model ini adalah untuk mengempamakan pemegang kekuasaan guna “mendidik” dan “mengobati” para peserta dalam peran serta bukan memberikan kemampuan masyarakat untuk berperan serta. Tidak ada partisipasi pada tingkat ini. Tingkat (3) *informing* dan (4) *consultation* disebut sebagai tingkat “*tokenisme*” atau sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat untuk mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara. Formalitas dalam hal ini dimaknai bahwa belum tentu pula pendapat mereka dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tingkat (5) *placation* dipandang sebagai *tokenisme* pada tingkat yang lebih tinggi dimana masyarakat memiliki hak untuk memberikan pendapat atau masukan, tetapi kekuasaan untuk pengambilan keputusan tetap di tangan pemrakarsa kegiatan. Tingkat (6) *partnership*, masyarakat memiliki ruang untuk bernegosiasi dan terlibat dalam “*trade-off*” dengan para pemegang kekuasaan. Pada tingkat (7) *delegated power* dan (8) *citizen control*, masyarakat memiliki kekuatan mayoritas untuk mengambil keputusan. Beberapa hal tadi menjelaskan bahwa peranserta dapat hanya sekedar “retorik” bukan “substansif” dimana masyarakat memiliki ruang yang luas dan gagasan mereka menjadi bahan dalam pengambilan keputusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Strategi Penelitian

Penelitian mengenai analisis isi pemberitaan media massa tentang lingkungan hidup dan implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka ini dilakukan dengan strategi triangulasi yaitu menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara mengintegrasikan metode analisis isi (*content analysis*) kuantitatif dengan teknik wawancara mendalam. Strategi triangulasi adalah penggabungan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti (Kelle,2001).

Menggunakan metode analisis isi kuantitatif yang bersifat *ex post facto*, data dikumpulkan dari kejadian-kejadian yang telah berlangsung atau sudah terjadi. Dalam hal ini yang diteliti adalah berita-berita yang telah diterbitkan berkaitan dengan lingkungan yang ditulis di surat kabar Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos dan Rakyat Pos. Kuantitatif dalam hal ini dimaknai sebagai upaya mendeskripsikan isi komunikasi berlandaskan frekuensi pemunculan isi komunikasi tersebut. Analisis isi hanya dilakukan terhadap sampel bahan-bahan pemberitaan lingkungan hidup dari surat kabar yang merupakan obyek studi.

Wawancara mendalam terhadap pengambil kebijakan pada tingkat eksekutif dan legislatif, termasuk juga Lembaga Swadaya Masyarakat, serta redaktur surat kabar dilakukan untuk mengetahui persepsi mereka terhadap pemberitaan lingkungan dalam kaitannya dengan kebijakan pengelolaan lingkungan.

Sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini selain bermaksud mendeskripsikan isi pemberitaan lingkungan yang diberitakan surat kabar Bangka Pos, Bangka Belitung

Pos, dan Rakyat Pos juga mendeskripsikan implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bangka.

3.2. Teknik Analisis Isi

Analisis isi (*content analysis*) adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan cara menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. (Holsti dalam Fluornoy,1989). Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mempunyai pendekatan sendiri dalam menganalisis data. Pendekatan ini tidak seperti mengamati langsung perilaku orang atau mewawancarai orang, namun si peneliti mengambil komunikasi-komunikasi atau data yang telah dihasilkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang komunikasinya (Kerlinger, 1973).

Menurut Fluornoy (1989), analisis isi adalah suatu metoda untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi. Metoda ini sering digunakan untuk mengetahui karakteristik isi surat kabar mengenai frekuensi, volume berdasarkan bidang masalah, penggunaan sumber informasi dan kecenderungan isi. Sementara itu menurut (Rakhmat,1991), analisis isi berguna untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang.

Berelson dalam Holsti (1969), menyebutkan bahwa teknik penelitian yang menggunakan analisis isi bisa menggambarkan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif tentang isi komunikasi yang tersurat. Obyektivitas dicapai dengan menggunakan kategori analisis yang diklasifikasi secara tepat sehingga orang lain yang menggunakannya untuk menganalisis isi yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Sistematis diartikan bahwa prosedur tertentu diterapkan dengan cara yang sama pada semua isi yang dianalisis. Sementara kuantitatif mengandung pengertian penelitian ini dicerminkan dalam data kuantitatif atau melalui perhitungan angka.

Berelson dalam Kerlinger (1973) menyebutkan, dalam konstruksi kategori, perumusan kategori berhubungan erat dengan variabel penelitian dan tujuan penelitian. Perumusan kategori yang tidak tepat akan mengakibatkan penarikan sampel isi yang salah dan data penelitian yang tidak tepat.

Sementara itu menurut peneliti media lainnya disebutkan bahwa, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat suatu kategori yaitu : (1) Kategori-kategorinya harus relevan dengan tujuan-tujuan studi; (2) Kategori-kategorinya hendaklah fungsional, dan (3) Sistem kategori-kategorinya harus dapat dikendalikan (Stempel dalam Flournoy, 1989).

Dalam penelitian ini beberapa kategori tentang aspek teknis media diadaptasi dari penelitian tentang media yang dilakukan oleh Litbang Kompas bekerja sama dengan Sentra Media Undip (2003), sementara itu untuk kategori aspek kebijakan menggunakan tahapan proses suatu kebijakan. Penyesuaian tertentu dilakukan untuk menselaraskan dengan tujuan penelitian.

3.3. Definisi Konseptual

1. Media massa, adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara massal kepada khalayak umum yang heterogen. Bentuk media massa itu sendiri terbagi menjadi dua jenis yakni cetak dan elektronik. Dalam konteks penelitian ini media massa yang dimaksudkan adalah media massa cetak yaitu surat kabar Bangka Pos, Bangka Belitung Pos, dan Rakyat Pos.
2. Isi Berita, adalah karakteristik penyajian isi lingkungan menurut kategorisasi dan format penyajian yang ada di surat kabar Bangka Pos, Bangka Belitung Pos, dan Rakyat Pos.
3. Isu dan Masalah Lingkungan, isu lingkungan adalah pokok persoalan lingkungan yang sering menjadi topik atau tema pemberitaan. Adapun masalah lingkungan adalah persoalan fisik

lingkungan yang bersinggungan dengan kepentingan umum atau sekelompok orang. Dalam penelitian ini ada beberapa isu dan masalah lingkungan yang diamati yakni; hukum lingkungan, kebijakan lingkungan, pendidikan lingkungan, dampak lingkungan, konflik lingkungan, budaya lingkungan, kelembagaan lingkungan, partisipasi lingkungan, dan propaganda lingkungan.

4. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, adalah arah dan tindakan yang jelas berkenaan dengan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, penelitian, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup dilihat dari tahap-tahap kebijakan.

3.4. Definisi Operasional

Isi berita lingkungan hidup, adalah karakteristik pemberitaan lingkungan yang dapat dilihat melalui pola pemberitaan yang dilakukannya. Pola pemberitaan lingkungan hidup oleh surat kabar adalah kategorisasi format penyajian di dalam surat kabar yang dibagi menurut bentuk penyajian atau ruang rubrikasi, tema berita atau isu dan masalah, sumber informasi atau nara sumber, kecenderungan isi atau teknik penulisan.

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam penelitian ini dilihat dari proses pembuatan suatu kebijakan melalui tahap-tahap kebijakan. Berdasarkan substansi isi berita lingkungan tersebut maka dapat dibagi dalam tahap-tahapan kebijakan yakni, tahap penyusunan agenda kebijakan, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Adapun implikasi kebijakan pengelolaan lingkungan dilihat dari persepsi pembuat kebijakan termasuk LSM dan redaktur surat kabar terhadap pemberitaan lingkungan.

Dengan demikian beberapa kategorisasi berikut dibuat untuk melihat isi pemberitaan lingkungan juga implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan. Kategorisasi tersebut sebagai berikut :

1. Bentuk Penyajian Berita (ruang rubrikasi), kategorisasi penyajian berita di surat kabar, identifikasinya dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. **Headline**, berita utama yang ada pada halaman satu.
 - b. **Berita utama**, berita yang paling menonjol, oleh redaksi dianggap paling penting dalam sebuah halaman Koran diluar halaman satu.
 - c. **Artikel berita**, tulisan tentang suatu isu yang diposisikan sebagai artikel berita biasa.
 - d. **Jangkar**, berita yang penempatannya biasanya ada pada bagian bawah sebuah halaman surat kabar, ditulis memanjang dalam empat kolom, biasanya berisi ulasan atau analisis terhadap sebuah peristiwa yang menonjol dan aktual.
 - e. **Pojok**, opini surat kabar yang ditulis secara singkat/pendek, posisinya ada pada bagian sudut halaman surat kabar biasanya berisi komentar penulisnya (redaksi) terhadap pernyataan, tindakan *public figure*/tokoh, atau peristiwa tertentu.
 - f. **Artikel**, ditulis oleh penulis lepas, berupa opini terhadap sebuah wacana atau peristiwa yang menonjol dan aktual pada masanya.
 - g. **Karikatur**, opini surat kabar yang divisualisasikan dalam bentuk gambar coretan tangan, biasanya berupa sindiran, kritik, satire terhadap tokoh, pernyataan tokoh, atau sebuah peristiwa yang menonjol pada masanya.
 - h. **Tajuk**, opini resmi surat kabar yang ditulis oleh redaksi surat kabar yang bersangkutan terhadap peristiwa atau sesuatu yang dianggap penting untuk dibahas lebih lanjut.
 - i. **Foto**, menggunakan Cm kolom, kategori nara sumber, dan kategori tema.
 - j. **Kolom**, tulisan ringan yang ditulis oleh seorang kolumnis tetap di sebuah surat kabar, biasanya mendeskripsikan kejadian, opini penulis, dan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan persoalan yang dibahas.

2. Sumber informasi, analisa terhadap kategorisasi nara sumber berita yang diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Birokrat, orang yang secara formal bekerja pada Negara/pemerintahan. Misalnya pejabat pemerintah, pejabat Negara (menteri), pegawai negeri. Dalam kategori ini dikecualikan unsur TNI/Polri, staf pengajar PTN dan purnawirawan yang aktif dalam kegiatan intelektual (seperti menjadi pembicara seminar, penulis, pengajar di PT, dsb).
 - b. Intelektual, mereka yang diakui oleh masyarakat karena kepakarannya, atau yang disebut sebagai pengamat, atau yang memiliki kapabilitas tertentu yang diakui publik. Termasuk dalam kategori ini adalah; staf pengajar PT dan mahasiswa, pengamat sosial politik, budayawan, aktivis LSM, dsb)
 - c. Politisi, termasuk dalam kategori ini adalah anggota DPR/DPRD, DPD, pengurus partai politik atau mereka yang terlibat secara aktif dalam kegiatan partai.
 - d. Tokoh Ormas, mereka yang duduk dalam kepengurusan organisasi sosial kemasyarakatan.
 - e. TNI/Polri, jajaran pimpinan maupun anggota.
 - f. Masyarakat, mereka yang tidak termasuk dalam kategori yang sudah disebutkan diatas.
 - g. Swasta, mereka yang berkecimpung di dunia usaha swasta/BUMN, asosiasi dagang dan sebagainya.
 - h. Wartawan.
 - i. Kecenderungan Isi, analisa terhadap kategori teknik penulisan isi berita yang dapat menjelaskan seperti apa media memandang suatu peristiwa. Hal tersebut diklasifikasikan sebagai berikut :
 - j. *Straight News* : berita yang ditulis semata-mata memenuhi unsur 5W+1H , tanpa ada penelaahan dan paparan yang lebih komprehensif.

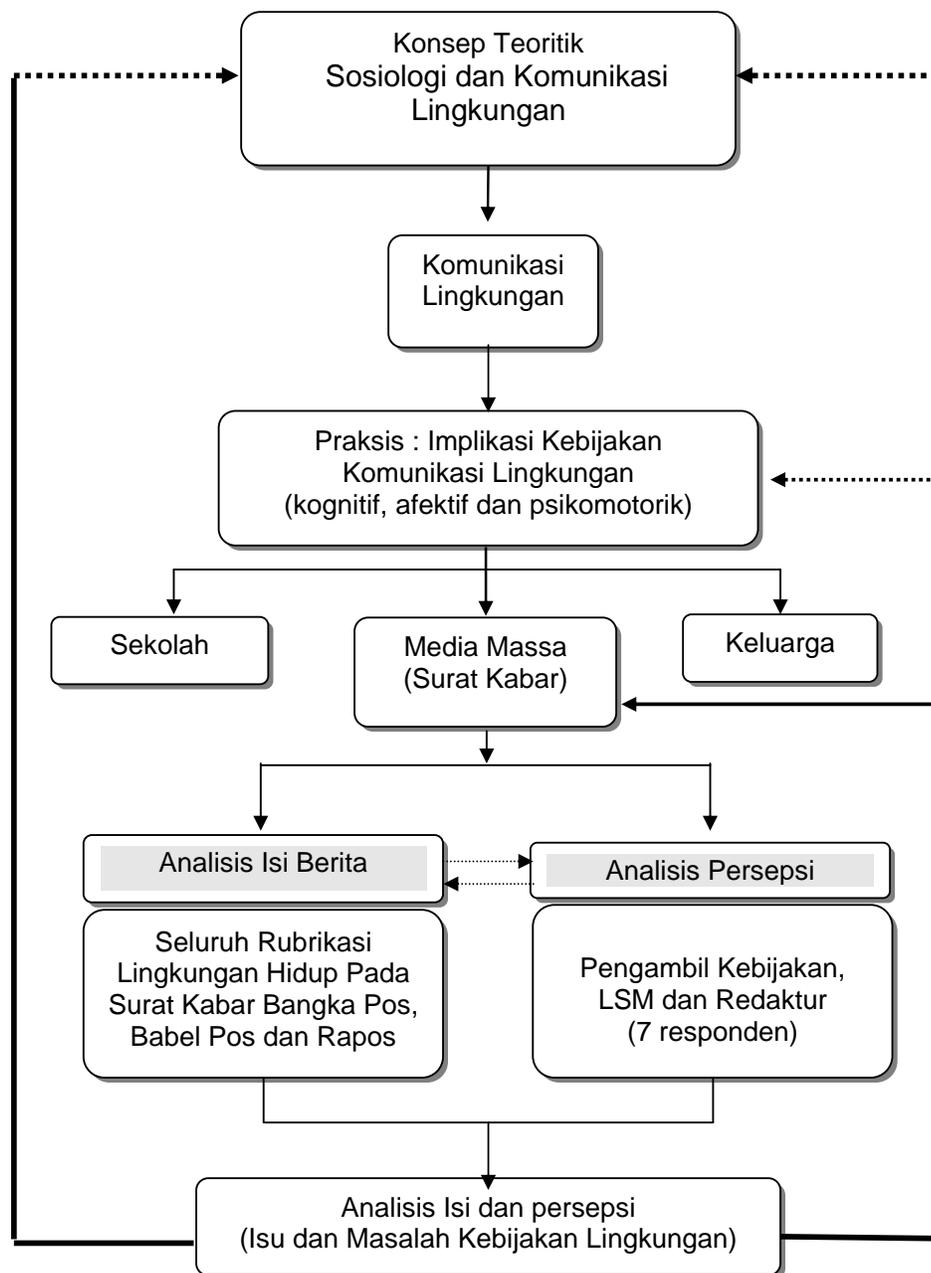
- k. *Depth News* : berita yang ditulis melalui penelusuran fakta secara mendalam oleh wartawan dengan mewawancarai beberapa narasumber dan penyajiannya sangat komprehensif disertai dengan data dan informasi dari sumber berita yang utama.
3. Tema berita: kategorisasi tema berita lingkungan hidup, diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Hukum Lingkungan, identifikasi terhadap pemberitaan yang berkenaan dengan penerapan aturan-aturan, tindakan-tindakan yang diambil berkenaan dengan lingkungan hidup dan bermuatan hukum. Misalnya masalah perijinan terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan, penertiban sehubungan dengan kegiatan yang menyangkut lingkungan, termasuk pula proses hukum akibat kegiatan yang berkenaan dengan lingkungan hidup dan sebagainya yang sejenis.
 - b. Kebijakan Lingkungan, identifikasi terhadap pemberitaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan pemanfaatan, penataan, penelitian, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Misalnya kegiatan-kegiatan loka karya, seminar, pembahasan-pembahasan tentang lingkungan hidup, studi perbandingan termasuk program-program lingkungan dan seluruh produk yang dihasilkannya seperti Peraturan Daerah, Surat Keputusan, dan sebagainya yang sejenis.
 - c. Pendidikan Lingkungan, identifikasi terhadap pemberitaan yang berkenaan dengan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran lingkungan, seperti kampanye lingkungan, sosialisasi lingkungan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat berkenaan dengan lingkungan. Pengembangan teknologi, meliputi teknologi ramah lingkungan, teknik pengelolaan sumberdaya alam dan sebagainya.

- d. Dampak Lingkungan, identifikasi terhadap berita-berita yang berkenaan dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat suatu kegiatan. Misalnya *Kehutanan dan Perkebunan*, meliputi persoalan kerusakan akibat kebakaran, perambahan, konversi lahan, pencurian kayu, kerusakan hutan lindung ; *Pertanian*, meliputi persoalan bahaya penggunaan pupuk dan pestisida ; *Perkotaan*, meliputi persoalan permukiman, banjir, pencemaran air, sampah, kesehatan lingkungan ; *Fenomena alam*, meliputi gempa, perubahan iklim, badai, angin ribut, kekeringan ; *Keanekaragaman hayati*, meliputi serangan terhadap eksistensi flora fauna ; *Limbah Industri*, meliputi persoalan gas buangan, limbah padat dan cair yang diproduksi industri ; *Laut, pantai dan sungai*, meliputi persoalan eksploitasi laut dan pantai, pencemaran laut dan sungai, kerusakan terumbu karang, sedimentasi, abrasi, intrusi, kerusakan mangrove ; *Pertambangan*, meliputi kerusakan akibat aktifitas menambang, kerusakan bentang alam ; dan sebagainya yang sejenis; *Ketenagakerjaan dan Kependudukan*, meliputi kecelakaan kerja, pekerja pendatang, dan sebagainya.
- e. Konflik Lingkungan, identifikasi terhadap berita-berita yang berkenaan dengan konflik pemanfaatan sumber daya (air, darat, udara), keluhan, kritik, protes, demo yang berkenaan dengan lingkungan dan sebagainya.
- f. Budaya Lingkungan, identifikasi terhadap pemberitaan yang berkenaan dengan kearifan lokal lingkungan (*indigenous local*).
- g. Kelembagaan Lingkungan, identifikasi terhadap pemberitaan berkenaan dengan infrastruktur lingkungan yang ada, baik formal maupun informal. Seperti LSM lingkungan, lembaga lingkungan pemerintah dan sebagainya.
- h. Partisipasi Lingkungan, identifikasi terhadap pemberitaan mengenai aktifitas masyarakat baik pribadi atau kelompok dalam kegiatan-kegiatan lingkungan dan sebagainya yang sejenis.

- i. Propaganda Lingkungan, identifikasi terhadap pemberitaan yang terkait dengan pencitraan buruk terhadap lingkungan, misalnya pemberitaan tentang upaya-upaya perlawanan dari sekelompok orang atau masyarakat terhadap upaya perlindungan lingkungan, atau yang sejenisnya.
4. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan, dapat diklasifikasikan sesuai tahapan suatu kebijakan sebagai berikut :
 - a. Tahap Penyusunan Agenda, yaitu substansi isi pemberitaan lingkungan yang mengandung makna terkait dengan tahap penyusunan agenda kebijakan.
 - b. Tahap Formulasi Kebijakan, yaitu substansi isi pemberitaan lingkungan yang mengandung makna terkait dengan tahap formulasi kebijakan.
 - c. Tahap Adopsi Kebijakan, yaitu substansi isi pemberitaan lingkungan yang mengandung makna terkait dengan tahap adopsi kebijakan.
 - d. Tahap Implementasi Kebijakan, yaitu substansi isi pemberitaan lingkungan yang mengandung makna terkait dengan tahap implementasi kebijakan.
 - e. Tahap Evaluasi Kebijakan, yaitu substansi isi pemberitaan lingkungan yang mengandung makna terkait dengan tahap evaluasi kebijakan.

Berikut alur pikir studi analisis isi Pemberitaan Media Massa Tentang Lingkungan Hidup Implikasinya terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bangka.

Gambar.3.4.1. Alur Pikir Studi



3.5. Populasi dan Sampel

Menurut Riduwan (2004), populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkenaan dengan masalah penelitian.

Populasi untuk analisis isi dalam penelitian ini adalah seluruh surat kabar harian lokal yang terbit di propinsi kepulauan Bangka Belitung yakni ; Bangka Pos, Bangka Belitung Pos dan Rakyat Pos. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling* untuk memilih 12 edisi. Bahan-bahan berita yang dipakai dalam penelitian ini dibatasi pada periode 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan ketersediaan bahan. Stempel dalam Flournoy (1989), menyebutkan bahwa menambah ukuran percontohan di atas 12 tidak menunjukkan perbedaan yang berarti dalam hasil-hasilnya.

Sementara itu responden untuk wawancara mendalam diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan, Kabupaten Bangka, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Satu orang Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bangka, Satu orang Anggota LSM Plantari, dan tiga orang redaktur masing-masing satu orang dari surat kabar Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos dan Rakyat Pos.

Tabel 3.5.1.
Populasi dan Sampel Surat Kabar

Populasi	Sampel Edisi Terbitan periode 1 jan 2005 s/d 31 des 2005												Jml
	jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	agt	sep	okt	nop	des	
Bangka Pos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Babel Pos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Rakyat Pos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	J u m l a h												36

3.6. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh rubrikasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup pada surat kabar Bangka Pos, Bangka Belitung Pos dan Rakyat Pos yang meliputi : Berita (*Headline*, berita utama, artikel berita, jangkar), opini (pojok, artikel, karikatur, tajuk, kolom), dan foto. Pengamatan terhadap ketiga bentuk rubrikasi tadi sudah dirasakan memadai untuk mengidentifikasi pola pemberitaan dalam surat kabar.

Litbang Kompas dan Sentra Media (2003), menyebutkan bahwa pola dan kecenderungan pemberitaan memiliki kemungkinan ditangkap apabila dilakukan dengan pengamatan dan pembacaan terhadap semua berita yang dikemas dalam tiga kategori tersebut yakni, berita, opini, dan foto.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna penarikan kesimpulan, dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan pengamatan terhadap isi pemberitaan lingkungan hidup dari beberapa surat kabar lokal yang menjadi obyek penelitian, dalam hal ini surat kabar harian pagi Bangka Pos, Bangka Belitung Pos, dan Rakyat Pos. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan *coding manual* dan *coding sheet*.
2. Melakukan wawancara mendalam kepada pengambil kebijakan lingkungan hidup, dalam hal ini anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bangka, Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bangka dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dan redaktur surat kabar Bangka Pos, Bangka Belitung Pos, dan Rakyat Pos. Teknik wawancara dilakukan menggunakan panduan wawancara.

3.8. Reliabilitas Data

Untuk memenuhi syarat obyektivitas, hasil penghitungan dari proses pengukuran unit analisis perlu diuji kembali. Adapun rumus yang dipakai dalam penghitungan tingkat keterpercayaan *intercoder* pada penelitian ini menggunakan *intercoder reliability* dari Holsti (Bulaeng, 2004) sebagai berikut :

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2} \times 100\%$$

Keterangan:

CR : *Coefisien Reliability*

M : hasil koding yang sama dari dua orang koder

N : jumlah objek yang dikategori

Menurut Lasswell dalam Flournoy (1989), pemberian angka yang menunjukkan kesamaan antara pelaksana koding sebaiknya berkisar antara 70 - 80 persen, dengan demikian proses koding dapat diterima sebagai keterpercayaan.

3.9. Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian khususnya yang berkenaan dengan pemberitaan lingkungan digunakan teknik analisis isi sebagaimana terminologi Berelson.

Dalam hal ini pemrosesan informasi yang menyangkut isi-isi komunikasi yang telah dibuat kategorisasinya, dimasukkan ke dalam tabel frekuensi dan selanjutnya dianalisis menurut frekuensi pemunculan yang kemudian diinterpretasi dan dibandingkan. Analisa dilakukan secara kualitatif.

Sementara itu hasil wawancara dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mempertajam analisa terhadap frekuensi pemunculan berita lingkungan sesuai kategorisasi yang telah dibuat, disamping itu juga untuk melihat bagaimana implikasi pemberitaan lingkungan terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Wilayah

4.1.1. Geografis, Ekonomi, Sosial dan Kependudukan

Kabupaten Bangka adalah salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memiliki luas sekitar 2.950,68 km², Kabupaten Bangka berbatasan dengan Laut Natuna pada sebelah Utara dan Timur, pada sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Tengah, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.

Dengan iklim tropis Tipe A, pengaruh Angin Muson Barat yang basah sangat terasa terutama pada bulan Nopember, Desember dan Januari sehingga distribusi hujan semakin ke arah selatan semakin menurun. Curah hujan hampir merata sepanjang tahun. Suhu udara dan kelembaban di kabupaten Bangka relatif tinggi dengan fluktuasi yang kecil. Suhu rata-rata bulanan berkisar antara 25 – 27 °C dan suhu minimum terjadi pada bulan September dan Juli yaitu sekitar 21 °C sedangkan kelembaban tertinggi mencapai 97% pada bulan Januari. Tanah di Daerah Kabupaten Bangka mempunyai kadar pH rata-rata di bawah 5, di dalamnya mengandung mineral bijih timah dan bahan galian lainnya seperti : pasir kwarsa, kaolin dan batu gunung.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Bangka sekitar 229.707 jiwa dengan kepadatan 78 jiwa/km². Jenis mata pencaharian penduduk relatif bervariasi diantaranya : pertanian, perdagangan, pertambangan dan galian, industri kecil, jasa angkutan, bangunan, jasa kemasyarakatan dan lain-lain.

Mata pencaharian penduduk yang menonjol di Kabupaten Bangka pada saat ini adalah pada sektor pertanian dan pertambangan. Di sektor pertambangan ini selain sebagai karyawan di PT.Timah banyak pula penduduk yang bekerja sebagai penambang timah rakyat yang bekerja

secara perorangan. Harga timah yang menggiurkan membuat mereka melakukan aktifitas menambang timah baik di darat maupun di laut.

Berikut data mata pencaharian penduduk Kabupaten Bangka berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2004 dan distribusi persentase PDRB Kabupaten Bangka atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dari tahun 2000 s/d 2004.

Tabel 4.1.1.1
Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Bangka
Menurut Lapangan Usaha Pada Tahun 2004

Lapangan Usaha	Jumlah (%)
1. Pertanian	62,99
2. Pertambangan dan Penggalian	10,07
3. Industri Pengolahan	2,68
4. Listrik, Gas dan Air Minim	0,25
5. Bangunan dan Konstruksi	7,0
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,62
7. Angkutan dan Komunikasi	0,95
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Lainnya	0,99
9. Jasa-Jasa	8,83
10. Lain-lain	0,63

Sumber : Bappeda Kab Bangka, 2004.

Tabel 4.1.1.2
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bangka Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dengan timah)

Lapangan Usaha	2000 (%)	2001 (%)	2002 (%)	2003 (%)	2004 (%)
1. Pertanian	36,08	34,35	33,17	29,55	28,19
2. Pertambangan & Penggalian	21,93	24,34	24,90	23,71	24,99
3. Industri Pengolahan	8,93	8,65	8,41	15,00	15,53
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,84	0,90	0,92	0,88	1,05
5. Bangunan	8,21	7,90	7,47	6,65	6,50
6. Perdag., Hotel & Restoran	11,70	11,45	11,27	10,41	10,49
7. Pengangkutan & Komunikasi	2,01	2,28	2,38	2,27	2,26
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,50	4,37	4,31	3,96	3,93
9. Jasa-Jasa	5,79	5,75	7,17	7,56	7,05
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangka, 2004.

Data di atas menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat kabupaten Bangka sampai saat ini masih bergantung dengan pekerjaan di

sektor pertanian khususnya komoditi tanaman perkebunan, tanaman bahan pangan dan perikanan. Kemudian pada sektor pertambangan, timah menjadi komoditi paling besar memberikan sumbangan pada mata pencaharian.

Berikut data bagi hasil timah yang diterima kabupaten Bangka dari PT.Timah kurun waktu 2001 s/d 2005. Pada tahun 2001 s/d 2003 masih bersama tiga kabupaten hasil pemekaran yakni Bangka Barat, Bangka Selatan dan Bangka Tengah.

Tabel 4.1.1.3
Dana Bagi Hasil Timah yang Diterima Kabupaten Bangka
Periode 2001 s/d 2005

	Royalti (1)	Landrent (2)	Pajak timah (1+2)
2001	22.953.765.240,15	6.977.770.438,20	29.931.535.678,35
2002	21.905.708.676,50	745.140.045	22.650.848.721,50
2003	22.419.010.949,95	1.341.918.200	23.760.929.149,95
2004	6.680.354.613,98	783.178.061	7.463.532.674,98
2005	11.642.996.944,60	-	11.642.996.944,60

Sumber : *Dispenda Kabupaten Bangka, 2005.*

Sejak lama di Kabupaten Bangka, komoditi timah memang menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk perhitungan PDRB. Bahkan kalau perhitungan PDRB Indonesia menggunakan migas sebagai salah satu ukuran, di Kabupaten Bangka karena tidak memiliki migas, timah dijadikan patokan. Dari tabel terlihat sumbangan timah dalam bentuk pajak timah selama lima tahun. Pada tahun 2001 s/d 2003 angka sumbangan pajak timah rata-rata diatas 20 milyar, hal itu disebabkan periode tersebut Kabupaten Bangka belum mengalami pemekaran. Namun sejak diundangkannya UU Nomor 5 tahun 2003 Kabupaten Bangka dimekarkan menjadi empat wilayah kabupaten maka pendapatan dari pajak timah terbagi kepada 4 wilayah yakni; Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.

Di daerah pertambangan terbuka (*open mining*) yang dalam aktifitasnya cenderung merubah bentang alam, tentunya isu dan

permasalahan lingkungan merupakan sesuatu yang kerap menjadi polemik. Di Kabupaten Bangka aktifitas penambangan timah pada satu sisi merupakan penyelamat bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, di lain sisi aktifitas yang mereka lakukan tersebut cenderung tidak mengikuti kaidah yang baik dan hal ini memberikan dampak semakin cepat terjadinya kerusakan lingkungan.

Berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan aktifitas penambangan dalam bentuk produk aturan seperti Perda maupun turunannya telah pula dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Beberapa di antaranya tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 4.1.1.4
Produk Hukum Pengelolaan Lingkungan
Terkait Bidang Penambangan
Pemerintah Kabupaten Bangka

No	Bentuk Peraturan	Nomor dan Tgl Pengesahan	Subyek
1.	PERDA	No.6 Tahun 2001 26 April 2001	Pengelolaan Pertambangan Umum
2.	Peraturan Bupati Bangka	No.38 Tahun 2004 30 Desember 2004	Peraturan Pelaksanaan Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan
3.	Peraturan Bupati Bangka	No.7 tahun 2005 21 April 2005	Pemberian Izin Usaha Industri Smelter

Sumber : Kumpulan Peraturan Pemkab.Bangka

Beberapa perda dan aturan yang dibuat di atas sebagian isinya telah mengakomodir masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan, misalnya Perda Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Pada Bab X dijelaskan tentang hak dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sejalan dengan harapan akan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan maraknya isu serta permasalahan lingkungan hidup, di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk Kabupaten Bangka bermunculan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berlabel lingkungan sebagai kelompok penyuar yang prihatin

terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Bangka Belitung. Beberapa dari mereka memang ada yang eksis, dan kerap menyuarakan tuntutan-tuntutan serta aktif diikutsertakan membahas persoalan-persoalan lingkungan dan kebijakan pemerintah umumnya seperti pembuatan rencana strategis daerah, namun tidak sedikit pula Lembaga Swadaya Masyarakat yang timbul tenggelam, dalam artian bergerak hanya pada saat-saat tertentu dan terkadang tinggal papan nama saja.

Berikut ini beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat berlabel lingkungan yang ada di Bangka Belitung, khususnya berdomisili di pulau Bangka.

Tabel 4.1.1.5
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama LSM	Alamat	Berdiri	Keterangan
1.	Repalaka	Jl.Sudirman 51 Sungailiat	2000	Aktif
2.	Perhimpunan Pengelola & Pekerja Tambang Timah Rakyat Bangka	Jl.A.Yani, Sungailiat	2000	Aktif
3.	Plantari	Jl.Irian 100, Pk.Pinangng	2000	Aktif
4.	Masyarakat Pencinta LH Indonesia	Jl.Mentok 23,Pk.Pinang	2003	Aktif
5.	Forum Peduli Tambang Karya Babel	Jl.Mentok,Gg.Gajahmada, Pk.Pinang	2005	Aktif
6.	Forum Lingkungan Hidup	Jl.Pasar Mambo 95, Pk.Pinang	2000	Aktif

Sumber : Dinas Kesbanglinmas Prov.Kep.Babel, 2006

4.1.2. Sejarah Pertambangan Timah

Daerah cadangan timah di Indonesia merupakan suatu rentangan wilayah sejauh lebih 800 Km yang disebut dengan "The South East Asia Tin Belt". Daerah ini membujur sejauh kurang lebih 3000 Km dari daratan Muangthai ke arah Semenanjung Malaysia. Di Indonesia mencakup Pulau Karimun, Pulau Kundur, Kepulauan Singkep di Utara terus ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Pulau Belitung dan Pulau Karimata hingga ke daerah sebelah Barat Kalimantan. Daerah tersebut merupakan daerah cadangan utama timah di Indonesia dengan Bangka yang paling kaya.

Tahun 1709 pertama kali biji timah digali di Sungai Olim di Toboali, yang saat ini merupakan bagian dari Kabupaten Bangka Selatan. Ketika itu pengerjaan timah masih dilakukan secara primitif oleh penduduk dengan cara pendulangan dan mencangkul dengan sistem penggalian sumur Palembang atau sistem kolong/parit.

Pasir timah yang dihasilkan pada waktu itu dijual kepada pedagang-pedagang yang datang dari Portugis, Spanyol dan juga dari Belanda. Keadaan ini berubah ketika Belanda datang ke Indonesia. Penggalian timah mulai lebih digiatkan. Semenjak tahun 1720, penggalian timah secara besar-besaran dibiayai oleh para pengusaha Belanda yang tergabung dalam VOC yang kemudian memonopoli dan mengawasi seluruh tambang di Pulau Bangka. Penambangan dengan alat mekanis dimulai tahun 1816.

Tahun 1906 Pemerintah Belanda mulai mengambil alih seluruh tambang timah yang ada di Pulau Bangka dan kemudian dikelola oleh badan yang diberi nama " *Bangka Tin Winning* " (BTW). Secara historis perusahaan pertambangan dibedakan dalam dua masa pengelolaan, yakni, pertama, sebelum tahun 1953 dikenal dengan masa pengelolaan Belanda. Masa yang kedua adalah masa pengelolaan Pemerintah RI, yang dalam hal ini dikelola oleh BUMN PT. Timah. Namun sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian (SK Menperindag No.558/MPP/Kep/12/1998) tanggal 4 Desember 1998, Tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, yang menyatakan biji timah tidak termasuk barang yang diatur, diawasi, dan dilarang ekspornya. Dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian (SK Menperindag No.146/MPP/Kep/4/1999) mengenai pencabutan status timah sebagai komoditas strategis. Implikasinya timah tidak dimonopoli lagi oleh satu BUMN dan dapat diekspor dengan bebas oleh siapapun. Masyarakat beramai-ramai mulai menambang. Tepatnya sejak tahun 1999 tumbuh menjamur penambangan timah rakyat di Kepulauan Bangka Belitung. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik karena aktifitas penambangan yang

mereka lakukan banyak tidak memperhatikan lingkungan sehingga berdampak pada rusaknya lingkungan hidup.

Untuk mengatur kegiatan penambangan timah tersebut pemerintah kabupaten Bangka pada tanggal 2 April 2001 mengeluarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Namun kenyataannya pada tingkat implementasi banyak masyarakat tidak mengindahkan peraturan daerah tersebut. Banyak tambang-tambang inkonvensional milik rakyat tidak membuat perijinan dalam kegiatannya. Hal ini menyebabkan sangat sedikit dari mereka yang dapat diawasi, di samping itu modus penambangannya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Bangka masih kerap melakukan penertiban terhadap tambang-tambang ilegal yang tidak memiliki ijin operasi dan beroperasi di daerah-daerah terlarang.

Untuk menggambarkan sejarah pertimahan di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.2.1
Sejarah Pertimahan di Kabupaten Bangka

Periode	Pengelola	Modus/skala	Keterangan
1709	Tidak ada	Pendulangan, cangkul (sistem Kolong/parit) skala kecil	-
1720 s/d 1816	VOC	Pendulangan, cangkul (sistem Kolong/parit) dan alat mekanis skala besar	-
1906 s/d 1953	Pemerintah Belanda (BTW)	Alat mekanis skala besar	-
Setelah 1953	Pemerintah RI (BUMN)	Alat mekanis skala besar (di darat dan laut)	-
Sejak 1998 • (SK Menperindag No.558/mpp/Kep/12/1998) tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor yang menyatakan timah tidak termasuk barang yang diatur, diawasi, dilarang ekspornya. • Perda No.6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.	Pemerintah RI (BUMN), Swasta/rakyat.	Alat mekanis skala besar (di darat dan laut)	Sampai dengan tahun 2005 luas areal Kuasa Pertambangan timah PT. Tambang Timah di Kab. Bangka adalah 109.596,63 Ha (darat seluas 80.099,65 Ha dan laut seluas 29.496,98 Ha)

Dihimpun dari berbagai sumber.

4.2. Deskripsi Surat Kabar

Dewasa ini tiras surat kabar di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 2001 saja menurut catatan Kompas tiras surat kabar sudah mencapai 15,8 juta eksemplar per hari. Hal tersebut tentunya akan semakin memberi peluang tersebarnya informasi kepada khalayak secara luas. Apalagi sejak keran kebebasan pers mulai dibuka bersamaan dengan era reformasi pada tahun 1998. Sejak saat itu semakin banyak perusahaan pers baru di Indonesia. Telah hadir apa yang disebut era keterbukaan informasi, didukung oleh lahirnya perusahaan-perusahaan pers baru yang selama lebih dari 30 tahun dapat dihitung dengan jari dan terkungkung kebebasannya.

Kondisi ini terlihat pula di daerah-daerah. Bertebaran surat kabar-surat kabar yang tumbuh dan beredar baik skala regional maupun lokal. Masing-masing membangun ciri dan karakteristiknya sendiri-sendiri. Di daerah misalnya ada pers yang memang sengaja mengembangkan dimensi kedekatan geografis dan kedekatan psikologis (*proximity*) untuk menjaring pembacanya. Pers-pers seperti ini biasanya sangat lokal, artinya hanya beredar di sebuah kota dan sekitarnya. Menurut Sumadiria (2005), dalam segala dimensi dan implikasinya pers lokal bisa disebut sebagai buku harian berwarna sebuah kota dimana 80% isinya didominasi oleh berita, laporan, tulisan, dan sajian gambar bernuansa lokal.

Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak perusahaan pers berdiri. Ketika itu bermunculan surat kabar yang terbit dengan format harian, mingguan, ataupun dwi-mingguan. Namun seiring berjalannya waktu seleksi alam telah memilih. Sampai saat ini untuk harian yang bertahan dan masih menjumpai pembacanya setiap pagi secara teratur di propinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Pulau Bangka masing-masing adalah harian pagi Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos. Dengan jumlah penduduk sekitar 1.021.283 jiwa dan lebih dari separuhnya yakni 795.227 jiwa berada di pulau Bangka, dan 229.707

penduduknya berdomisili di Kabupaten Bangka kehadiran ketiga surat kabar ini paling tidak telah memberikan warna dan telah setia menjumpai pembacanya dengan pemberitaan-pemberitaan khas daerah termasuk persoalan lingkungan.

Bangka Pos Group adalah kelompok surat kabar harian yang diterbitkan oleh PT. Bangka Media Grafika yaitu anak perusahaan PT. IndoPersda PrimaMedia – Kelompok Kompas Gramedia. Hingga saat ini Bangka Pos Group memiliki tiga media cetak yakni Harian Pagi Bangka Pos, Harian Sore Pos Belitung dan Tabloid Abel – sebuah tabloid anak-anak bekerjasama dengan Persatuan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (PGTKI) Bangka Belitung yang terbit mingguan setiap hari Senin. Selain itu Bangka Pos Group juga memiliki satu media *online* yaitu bangkapos.*Online* (<http://www.bangkapos.com>)

Harian Pagi Bangka Pos merupakan koran pertama yang dimiliki Bangka Pos Group yang bermarkas di Jl.Sriwijaya No. 1B Pangkalpinang. Edisi perdana Harian Pagi Bangka Pos terbit pada tanggal 25 Mei 1999 yang hadir dengan 8 halaman. Sementara itu BangkaPos.*Online* dimunculkan pada 8 Desember 2000. Pada tanggal 24 Agustus 2001 Harian Pagi Bangka Pos mulai terbit 12 halaman. Saat ini Bangka Pos terbit dalam format 16 halaman.

Bangka-Belitung Pos merupakan surat kabar kedua yang hadir tak lama setelah kehadiran Bangka Pos , tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2001. Bangka-Belitung Pos sendiri adalah termasuk bagian dari kelompok usaha Jawa Pos Group. Berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 10 Pangkalpinang, hingga saat ini Bangka-Belitung Pos terbit dengan 16 halaman.

Sementara itu Harian Pagi Rakyat Pos hadir 4 tahun setelah Bangka Pos, tepatnya bulan Maret 2003. Harian yang relatif masih muda usia ini bermarkas di Jl. Pangkal Balam, Pangkalpinang. Rakyat Pos sampai saat ini terbit dalam format 12 halaman.

Berikut Peta sebaran tiras dan latar belakang pembaca surat kabar Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos dan Rakyat Pos berdasarkan wilayah peredarannya :

Tabel 4.1.2.2
Sebaran Tiras Surat Kabar dan Latar Belakang Pembaca Berdasarkan Wilayah

Surat Kabar	Tiras	Latar Belakang Pembaca		Sebaran	
		Pekerjaan	%	Wilayah	%
Bangka Pos	37.000	Wiraswasta	28,2	Pangkalpinang	33,3
		Kary.Swasta/BUMN/BUMD	22,9	Bangka	26,7
		PNS/Polri/TNI	24,4	Bangka Barat	14,5
		Belum Bekerja	10,5	Bangka Tengah	9,4
		Kuliah	2,6	Belitung	7,7
		Lain-lain	11,5	Bangka Selatan	5,8
					Belitung Timur
BaBel Pos	18.000	Wiraswasta	31,2	Pangkalpinang	37,2
		Kary.Swasta/BUMN/BUMD	22,3	Bangka	25,8
		PNS/Polri/TNI	25,7	Bangka Barat	13,1
		Belum Bekerja	10,1	Bangka Tengah	10,2
		Kuliah	1,9	Belitung	5,1
		Lain-lain	8,8	Bangka Selatan	6,3
					Belitung Timur
Rakyat Pos	5.000	Wiraswasta	32,3	Pangkalpinang	35,5
		Kary.Swasta/BUMN/BUMD	22,8	Bangka	27,4
		PNS/Polri/TNI	26,3	Bangka Barat	12,3
		Belum Bekerja	9,6	Bangka Tengah	11,6
		Kuliah	2,3	Belitung	-
		Lain-lain	6,7	Bangka Selatan	13,2
					Belitung Timur

Sumber. Bangka Pos, Babel Pos, Rakyat Pos.

Dari tabel diatas diketahui sebaran ketiga surat kabar terkonsentrasi di ibukota Propinsi yaitu Pangkalpinang, tempat dimana ketiga surat kabar berdomisili. Pada urutan kedua Kabupaten Bangka diikuti Bangka Barat. Bangka pos sampai saat ini memiliki oplah terbesar yakni 37.000 eksemplar per hari, diikuti Bangka-Belitung Pos dengan 18.000 eksemplar per hari dan Rakyat Pos 5.000 eksemplar per hari. Secara umum sebaran ketiga surat kabar tidak terlalu jauh berbeda, hanya Rakyat Pos yang belum menjangkau pulau Belitung yakni Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Dari latar belakang pekerjaan pembaca terlihat bahwa kalangan wiraswasta merupakan pembaca terbesar ketiga surat kabar ini, diikuti oleh kelompok PNS,TNI/Polri, dan karyawan swasta, BUMN/BUMD.

4.3. Analisis Isi Pemberitaan Lingkungan

Dalam sub bab ini akan diuraikan secara rinci bagaimana isi pemberitaan lingkungan hidup di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disajikan oleh surat kabar Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos.

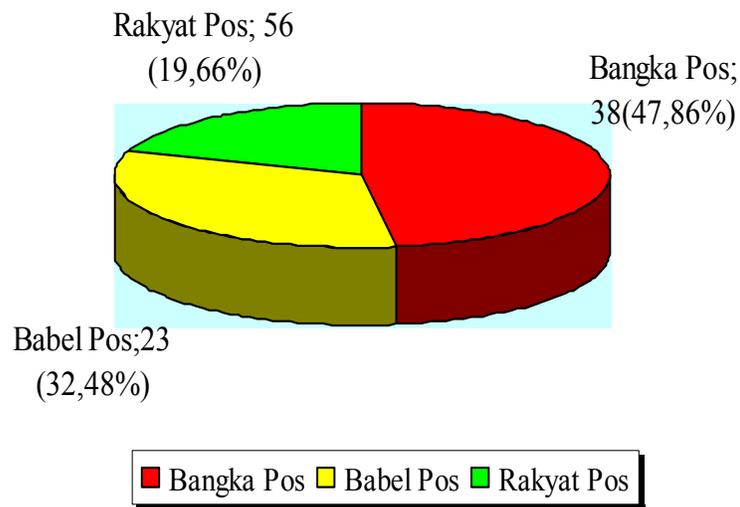
Sebelumnya berkenaan dengan reliabilitas untuk kepentingan keterpercayaan sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka peneliti dibantu oleh seorang pengkoding kedua. Peneliti terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada pengkoding kedua mengenai prosedur yang digunakan dan selanjutnya melakukan percobaan pengkodingan. Dari 117 objek yang dikategori didapati 95 hasil koding yang sama dengan tingkat keterpercayaan 81 persen dan ini dianggap memadai untuk keperluan studi ini. Sebagaimana dinyatakan Lasswell dalam Fluornoy (1998), bahwa nilai-nilai yang menunjukkan 70 sampai 80 persen kesamaan antara pemberi koding dapat diterima sebagai keterpercayaan yang memadai.

Unit observasi yang menjadi bahan pengamatan dalam penelitian ini meliputi teks dan gambar pada *Headline*, berita utama, berita, jangkar, pojok, artikel, karikatur, tajuk, foto, dan kolom. Kategorisasi yang dijadikan acuan analisis dalam penelitian ini berupa bulan terbit, ukuran kolom, halaman penempatan, ruang rubrikasi, teknik penulisan, status dan jumlah nara sumber, bidang masalah sesuai tema berita, serta substansi isi aspek kebijakan berdasarkan tahap kebijakan.

Periodisasi pemberitaan lingkungan dipilih sepanjang tahun 2005 dari bulan Januari s/d Desember 2005. Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik *random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 36 edisi dan jumlah pemberitaan sebanyak 117 buah. Selama periode tersebut Bangka Pos menurunkan berita lingkungan sebanyak 56 tulisan (47,86%), Bangka-Belitung Pos menurunkan berita lingkungan sebanyak 38 tulisan (32,48%) dan Rakyat Pos menurunkan berita lingkungan sebanyak 23

tulisan (19,66%). Berikut gambar yang menunjukkan jumlah berita yang menjadi sampel dari tiga surat kabar.

Gambar 4.3.1.
Jumlah Sampel Pemberitaan Lingkungan



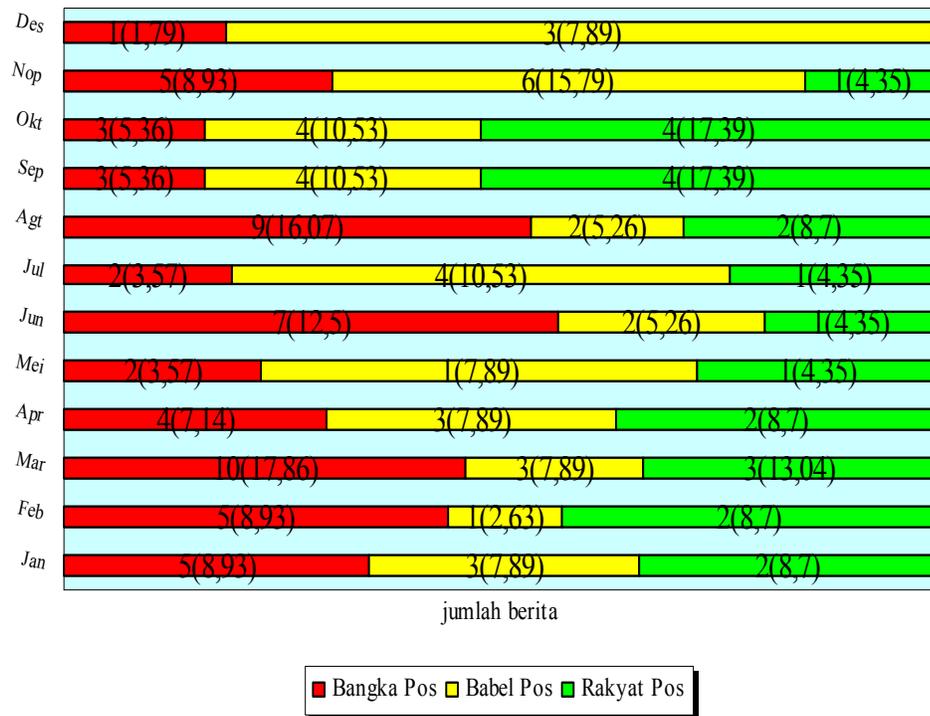
Sumber : Data hasil olahan

Pola pemberitaan lingkungan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh surat kabar Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos diuraikan sebagai berikut.

4.3.1. Kategori Bulan Terbit

Pemberitaan Lingkungan oleh tiga surat kabar masing-masing Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos berdasarkan bulan terbit dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.3.1.1.
Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan
Berdasarkan Bulan Terbit Tahun 2005



Sumber : Data hasil olahan

Dari gambar terlihat bahwa Bangka Pos memberikan porsi terbesar dalam pemberitaan lingkungan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2005 dengan jumlah 56 tulisan yang tersebar selama dua belas bulan hampir merata. Lonjakan pemberitaan terlihat pada bulan Maret yaitu sebanyak 10 berita atau (17,86%) dan bulan Agustus sebanyak 9 berita atau (16,07%) dengan isi pemberitaan mengenai penertiban tambang inkonvensional, *illegal logging*, kegiatan pembersihan kolong dan kekeruhan sumber air PDAM akibat aktivitas tambang rakyat. Sementara itu Bangka-Belitung Pos menurunkan berita lingkungan sebanyak 38 tulisan (32,48%) dan pemberitaan yang terbanyak di bulan Nopember yakni sebanyak 6 tulisan atau (15,79%). Sedangkan Rakyat Pos secara keseluruhan sebanyak 23 tulisan (19,66%) dan pada bulan September

dan Oktober menurunkan masing-masing 4 tulisan atau sebesar (17,39%). Untuk lebih jelasnya sebaran pemberitaan berdasarkan bulan terbit dapat dilihat pada lampiran 6 tentang tabel frekuensi.

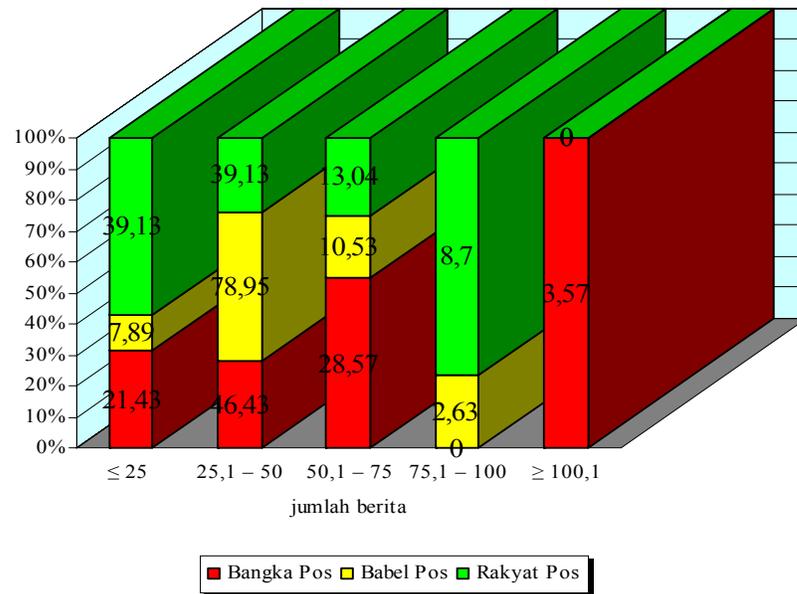
Secara umum ketiga harian ini dapat dikatakan hampir setiap bulan menurunkan tulisan tentang lingkungan meskipun tidak ada *desk* atau kolom khusus untuk lingkungan yang disediakan. Hal tersebut merupakan indikasi adanya perhatian surat kabar terhadap kondisi lingkungan lokal yang ada di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sumadiria (2005), menjelaskan bahwa kebijakan redaksional pers lokal lebih bertumpu pada pengembangan dimensi kedekatan geografis dan kedekatan psikologis (*proximity*). Dalam konteks ini ketiga surat kabar memandang bahwa persolan lingkungan memiliki nilai yang layak untuk diketahui oleh khalayak pembacanya, karena hal-hal tersebut sangat terkait dengan kehidupan keseharian mereka. Laporan oleh surat kabar tentang kondisi lingkungan di Bangka Belitung secara langsung dapat menjelaskan seperti apa kondisi lingkungan yang ada. Lebih lanjut Sumadiria menyebutkan bahwa dalam segala dimensi dan implikasinya pers lokal bisa disebut sebagai buku harian berwarna sebuah kota dimana 80% isinya didominasi oleh berita, laporan, tulisan, dan sajian gambar bernuansa lokal.

4.3.2. Kategori Ukuran Kolom

Penetapan besarnya kolom pada suatu pemberitaan menunjukkan bagaimana kebijakan redaksional suatu surat kabar memandang tingkat pentingnya nilai suatu berita. Ukuran kolom juga sangat terkait dengan aspek kedetailan dalam hal penulisan berita. Artinya semakin besar alokasi kolom yang disediakan oleh surat kabar menandakan semakin detail pula informasi yang disajikan. Untuk Lebih jelasnya alokasi ukuran kolom yang diberikan oleh ketiga surat kabar dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.3.2.1.
Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Ukuran Kolom



Sumber : Data hasil olahan

Gambar diatas menunjukkan bahwa ketiga surat kabar cenderung mengemas berita lingkungan dalam ukuran 25,1 – 50 cm/kolom. Hal tersebut menandakan bahwa dalam kemasan berita ketiga surat kabar menyukai tampilan berita lingkungan secara ringkas dan sekilas. Pada gambar nampak sebagian besar berita dikemas ke dalam kolom-kolom kecil yakni ukuran 75 cm/kolom ke bawah.

Bangka-Belitung Pos tercatat paling sering menggunakan ukuran kolom 25,1 – 50 cm/kolom yaitu sebesar 78,95%, hanya satu kali (2,63%) menggunakan ukuran kolom besar 75,1 – 100 cm/kolom. Demikian juga dengan Bangka Pos, lebih sering menggunakan kolom 25,1 – 50 cm/kolom atau sebesar (46,43%). Selain itu sebesar 28,57% bangka Pos mengemas beritanya ke dalam kolom 50,1 – 75 cm/kolom. Hanya 2 kali (3,57%) Bangka Pos menggunakan kolom ukuran besar $\geq 100,1$, yaitu *Headline* tentang konflik lingkungan berkenaan dengan pembakaran kamp

tambang oleh massa dan satu artikel yang ditulis oleh mahasiswa tentang pengelolaan ekosistem mangrove di Bangka Belitung.

Sementara itu Rakyat Pos secara bersamaan lebih suka mengemas berita dengan ukuran ≤ 25 cm/kolom dan 25,1 – 50 cm/kolom, masing-masing sebesar 39,13%. Untuk lebih jelasnya sebaran pemberitaan berdasarkan ukuran kolom dapat dilihat pada lampiran 6 tentang tabel frekuensi.

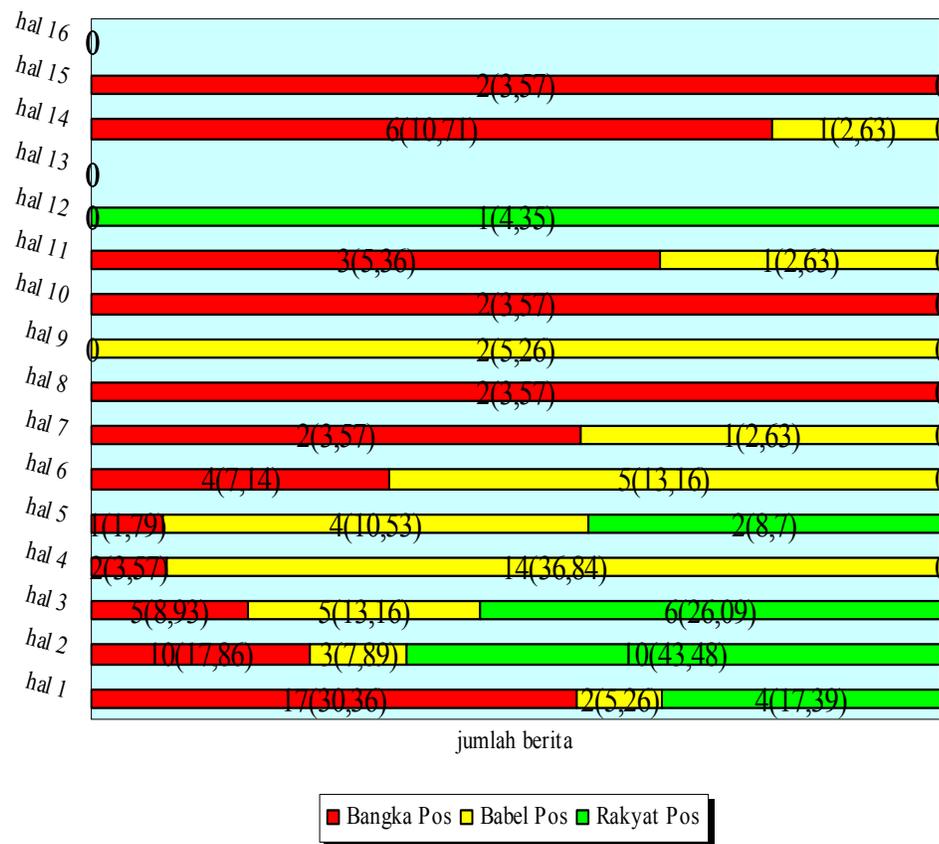
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketiga surat kabar dalam menyajikan isu lingkungan belum cukup detail. Berita-berita dengan ukuran kolom kecil ini biasanya berita-berita yang memiliki materi pendek, ringkas, dan sekilas yaitu jenis-jenis berita *the spot* dan *hard news* (Santana, 2004). Berita-berita seperti itu jelas tidak cukup untuk membangkitkan kesadaran dan menggerakkan masyarakat untuk memahami persoalan-persoalan lingkungan. Dalam pandangan Downie dan Kaiser media telah melakukan *Bad Journalism*, di mana media memberitakan suatu peristiwa secara dangkal, sembrono, dan tidak lengkap (Santana, 2005). Ketidaklengkapan informasi yang didapat masyarakat tentu akan mengakibatkan kurangnya data bagi masyarakat yang akan mendatangkan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu pemberitaan yang komprehensif dan proporsional penting sekali karena akan membantu khalayak mengambil keputusan yang dibutuhkan.

4.3.3. Kategori Halaman Penempatan

Halaman penempatan berita pada suatu surat kabar tidak berarti bahwa surat kabar mengabaikan nilai aktualitas dan urgensi suatu berita. Masing-masing surat kabar memiliki cara pandang dan kebijakan sendiri-sendiri dalam hal halaman penempatan tergantung kebijakan redaksional masing-masing.

Berdasarkan kategori halaman penempatan kecenderungan Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos dalam menempatkan berita lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.3.3.1.
Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Halaman Penempatan



Sumber : Data hasil olahan

Dari gambar terlihat bahwa Bangka Pos sebanyak 17 kali (30,36%) menempatkan beritanya di halaman 1. Hal ini menjelaskan bahwa Bangka Pos menganggap berita lingkungan menjadi salah satu isu yang dipandang penting oleh redaksional untuk diangkat sebagai tulisan dan hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan redaktur pelaksana harian pagi Bangka Pos saudara Albana sebagai berikut :

....."Bangka Pos memiliki komitmen yang jelas terhadap persoalan lingkungan sehingga menjadi bagian kebijakan redaksionalnya..."

Setelah halaman 1, berita lingkungan juga ditempatkan pada halaman 2 yaitu sebanyak 10 kali (17,86%). Sisanya tersebar di berbagai halaman. Sementara itu Bangka-Belitung Pos lebih suka menempatkan berita lingkungan pada halaman 4 yakni sebesar 36,84%, Kemudian sebesar 13,16% pada halaman 3 dan 6. Adapun Rakyat Pos sebesar 43,48% menempatkan berita lingkungannya pada halaman 2, dan 17,39% pada halaman 1. Untuk lebih jelasnya sebaran pemberitaan berdasarkan halaman penempatan dapat dilihat pada lampiran 6 tentang tabel frekuensi.

Secara umum ketiga surat kabar telah menempatkan pemberitaan lingkungan pada proporsi halaman yang masuk akal. Meskipun demikian menurut Santana (2005), berita-berita dengan jenis *hard news* yang biasanya menyangkut hal-hal penting dan langsung terkait dengan kehidupan pembaca akan ditempatkan pada halaman depan sebuah surat kabar. Pernyataan Santana tersebut sejalan dengan keterangan Oetama (1998), yang menyebutkan biarpun orang bilang bahwa semua halaman surat kabar sama bobotnya, namun secara organis dan psikologis, halaman satu tetap diterima oleh semua pihak sebagai halaman terpenting. Dari dua pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa halaman satu memang penting, termasuk halaman-halaman lainnya juga, yang membedakannya hanyalah kebijakan redaksional terhadap suatu berita.

4.3.4. Kategori Ruang Rubrikasi

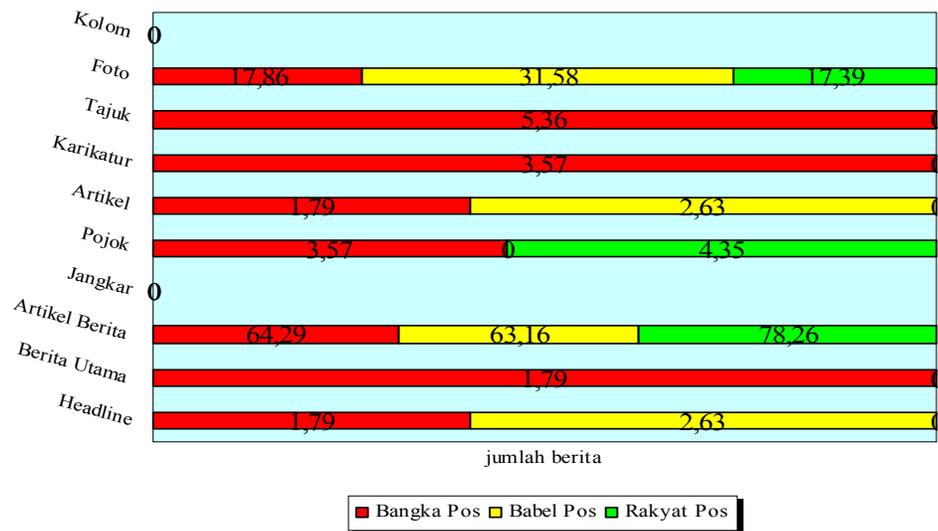
Pemilihan ruang rubrikasi dalam menempatkan suatu tulisan dapat mengindikasikan bagaimana surat kabar memandang persoalan tersebut berdasarkan nilai kepentingan dan tingkat aktualitasnya.

Sumadiria (2005) menyebutkan isi surat kabar, tabloid, majalah dan bulletin dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok besar antara lain: berita

(*news*), opini (*views*), dan iklan (*advertising*). Kelompok berita meliputi antara lain: berita langsung (*straight news*), berita menyeluruh (*comprehensive/depth news*), berita mendalam (*depth news*), pelaporan mendalam (*depth reporting*), berita penyelidikan (*investigative news*), berita khas bercerita (*feature news*), dan berita gambar (*photo news*). Kelompok opini, meliputi tajuk rencana, karikatur, pojok, artikel, kolom, esai dan surat pembaca.

Untuk lebih jelasnya bagaimana Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos dan Rakyat Pos menempatkan tulisan lingkungan ke dalam ruang rubrikasi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.3.4.1.
Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Rubrikasi



Sumber : Data hasil olahan

Dari gambar nampak bahwa pemuatan berita lingkungan dalam rubrik artikel berita (*hard news*) pada ketiga surat kabar mendominasi dengan persentase masing-masing ; Bangka Pos (64,29%), Bangka-Belitung Pos (63,16%), dan Rakyat Pos (78,26%). Di luar artikel berita, ketiga surat kabar juga memuat berita lingkungan dalam bentuk foto, masing-masing Bangka Pos 17,86%, Bangka-Belitung Pos 31,58%, dan

Rakyat Pos 17,39%. Sementara itu hanya sedikit tulisan lingkungan yang masuk ke dalam headline. Bangka Pos tercatat hanya sekali (1,79%) memuat *headline* tentang konflik lingkungan yaitu pada tanggal 28 April 2005 dengan judul massa membakar kamp TI, sementara itu Bangka-Belitung Pos juga hanya sekali memuat *headline* dengan judul bencana selat Nasik yaitu pada tanggal 25 Nopember 2005. Sedangkan Rakyat Pos tidak pernah menurunkan berita lingkungan dalam bentuk *headline*. Untuk lebih jelasnya sebaran pemberitaan berdasarkan ruang rubrikasi dapat dilihat pada lampiran 6 tentang tabel frekuensi.

Dari tiga surat kabar tersebut variasi penempatan terlihat pada Bangka Pos yang cukup merata pada beberapa rubrik. Bahkan ada tiga opini redaksional yang ditulis sebagai tajuk oleh Bangka Pos. Tajuk sendiri merupakan opini resmi surat kabar yang ditulis oleh redaksi surat kabar tentang sesuatu yang dianggap penting untuk dibahas lebih lanjut. Rivers dalam Santana (2005), menjelaskan tujuan sebuah tajuk adalah untuk menjelaskan berita, menjelaskan latar belakang, meramalkan, dan menyampaikan pertimbangan moral. Lebih lanjut menurut Rivers tajuk memaparkan opini pemilik atau manajemen media ihwal soal yang jadi perhatian publik dan mempengaruhi pendapat umum.

Tiga tajuk yang ditulis oleh surat kabar Bangka Pos di antaranya berjudul “*Perhatikan Perkebunan*”, “*Awas Malaria*”, dan “*Kawasan Hijau*”. Pada ketiga tajuk tadi isinya mengarah kepada perhatian terhadap persoalan-persoalan lingkungan yang intinya ingin mempengaruhi persepsi publik terhadap persoalan lingkungan.

Secara umum rubrikasi yang menjadi pilihan ketiga surat kabar untuk menampilkan berita lingkungan didominasi oleh bentuk artikel berita (*hard news*) dan foto. Hal ini paralel dengan gambar 4.3.2.1. tentang sebaran persentase pemberitaan lingkungan berdasarkan ukuran kolom yang memperlihatkan ukuran kecil. Berita-berita dengan ukuran tersebut biasanya berita-berita yang merupakan laporan langsung segera yaitu berjenis *the spot* dan *hard news* (Santana, 2004).

Menurut Muhtadi dalam Sumadira (2005), sikap dan perilaku publik dapat digerakkan dengan bantuan gambar, foto, dan karikatur, sebab ketiganya merupakan pesan-pesan yang hidup sekaligus menghidupkan deskripsi verbal lainnya. Karena itu menurutnya, surat kabar dan majalah hanya akan menjadi lembaran-lembaran mati yang membosankan jika hadir tanpa foto dan gambar. Penggunaan foto sebagai bagian dari berita sering dilakukan untuk memperkuat penyajian suatu berita. Foto merupakan gambaran kenyataan yang faktual, memiliki daya tarik visual yang kuat dan melukiskan peristiwa nyata. Karena itu foto terkadang lebih bisa bercerita tentang kondisi sesungguhnya dari suatu peristiwa.

Dari rubrikasi yang cenderung digunakan oleh ketiga surat kabar dapat disimpulkan bahwa tulisan-tulisan lingkungan berjenis berita (*news*) cenderung mendominasi, hanya sedikit sekali tulisan-tulisan lingkungan berupa opini (*views*) yang ditemukan. Hal ini mengindikasikan bahwa belum banyak opini-opini tentang lingkungan yang ditulis oleh para ahli maupun pemerhati dan peminat lingkungan. Padahal tulisan-tulisan tersebut dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam suatu proses kebijakan. Pada saat bersamaan sedikitnya tulisan lingkungan yang berbentuk *Headline* pada tiga surat kabar mengindikasikan media menganggap nilai pentingnya (*importance value*) persoalan lingkungan sudah berkurang, demikian pula aktualitasnya. Hal ini dimungkinkan terjadi karena persoalan-persoalan lingkungan telah sering diberitakan. Hanya kejadian-kejadian yang dianggap sangat penting dan menghebohkan serta aktual saja yang akan diangkat dalam bentuk *headline* sebagaimana yang ditulis Bangka Pos dan Rakyat Pos yakni berita berjudul "Massa membakar kamp TI" dan "Bencana Selat Nasik".

Contoh *headline* dan artikel berita dari Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos yang disertai foto dapat dilihat pada gambar berikut :

Gbr.4.3.4.2. Massa Bakar Tujuh Kamp TI



Sbr. Bangka Pos tanggal 28 april 2005 halaman 1.

Headline diatas berisi tentang pembakaran kamp Tambang Inkonvensional (TI) milik salah satu pengusaha asal Pangkal Pinang oleh massa di Desa Jelutung I Pangkalan Baru.

Gbr.4.3.4.3. Perlu Komitmen Bersama Soal TI



Sbr. Bangka-Belitung Pos tanggal 7 September 2005 halaman 6.

Artikel berita seperti yang terlihat pada gambar 4.3.4.3. tersebut berisi tentang kerusakan hutan akibat kegiatan penambangan ilegal di kawasan hutan Gunung Menumbing.

Gbr.4.3.4.4. Peringati Hari Air Sedunia,DPD ASWD Bersih Kolong



Peringati Hari Air Sedunia, DPD ASWD Bersih Kolong

PANGKALPINANG - Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Swara Wartawan Demokrasi Propinsi Babel mengadakan kegiatan bersih-bersih kolong. Kegiatan ini dalam rangka Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret. Kegiatan yang dilaksanakan di Kolong Air Mangkok Kelurahan Bacang itu melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Dengan bersih kolong tersebut, diharapkan pemerintah nantinya penanganan air dalam volume yang besar itu dapat dijadikan objek wisata.

Hadir dalam kegiatan itu Walikota Pangkalpinang, Drs.Zulkarnain Karim,MM, Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kota, Drs. Ridwan Damanik, Kapolsek Bukit Intan, Wadiyono Insur mspida dan Ketua DPD ASWD H.Iskandar, ST.

"Kolong itu fungsinya untuk menampung air, sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Juga dapat menjadi sumber air bersih dan dapat dijadikan objek wisata, maka kolong itu harus dilestarikan," ujar Walikota Pangkalpinang.

Kepada Rakyat Pos, Selasa (22/3), Zulkarnain mengatakan ko-

Mangkok dapat dikembangkan untuk sumber air bersih dan kawasan wisata. Sumber air baku dikatakan harus terpusat dan apabila masyarakat kekurangan konsumsi air, sumber air baku seperti itu cukup membantu.

Saat ini, dikatakan lebih lanjut, Pemkot telah membangun sumber air baku yang seluas 42 x 8 hektar atau sebanyak 336 juta liter kubik air. Dengan begitu dipastikan jumlah itu cukup untuk kebutuhan warga Pangkalpinang hingga 2020.

"Kalau waduk Kacang Pedang selesai, maka kita akan membangun inteksnya dan water treatment di Pedindang yang berkemampuan 350 liter perdetik," tukas Zul.

Menurutnya, untuk pengelolaan waduk itu tidaklah masalah, walaupun aktivitas TI yang airnya mengalir ke waduk dan berlumpur tersebut masih terus beroperasi. Pemkot dijelaskan sudah mempunyai solusi untuk mengelola air imbas TI yang mengalir ke waduk dengan menggunakan deterjen.

Sedangkan Ketua DPD ASWD, H. Iskandar ST ketika ditemui di sela kegiatan membenarkan, yang mereka dilakukan ini dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia. Hal ini dengan pertimbangan lain lantaran

manusia, sehingga harus dilakukan pelestarian sumber air baku yang bersih.

"Kegiatan ini seperti yang telah kita lakukan pada tahun 2004 kemarin, selama 44 hari. Kegiatan ini melibatkan 20 siswa dari SMU Pelayaran dan SMU perikanan. Kita juga dapat bantuan berupa perahu karet dari TNI-AL untuk membuang sampah. Siswa-siswa ini akan membersihkan tanaman yang tumbuh di sekitar tepi kolong," jelasnya.

Dipaparkan Iskandar, pembersihan di sekitar pinggiran kolong dilakukan, untuk memperluas penampang batas di Kolong Air Mangkok. Sebab penampang batas kolong tersebut sudah mulai menyempit. Sehingga semak-belukar berupa tumbuhan air di sekitar kolong harus dibersihkan.

Dalam kegiatan kemarin, kolong di penampang batas itu sudah dibersihkan kembali. Terlihat, luas kolong saat ini seakan bertambah lebar dari posisi sebelum dibersihkan. Para pelajar yang terlibat itu pun tanpa sungkan melakukan kegiatan, bahkan terlihat sangat antusias ketika didampingi dengan staf pengajar di sekolah tersebut.

Sbr. Rakyat Pos tanggal 23 Maret 2005 halaman 3.

Artikel berita di atas berisi tentang kerja bakti bersih-bersih kolong oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Swara Wartawan Demokrasi (ASWD) Propinsi Bangka Belitung dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia di kolong Air Mangkok Kelurahan Bacang, Kota Pangkalpinang.

4.3.5. Kategori Teknik Penulisan

Kovach & Rosenstiel dalam Santana (2005), menyebutkan salah satu tugas jurnalisme adalah membuat berita secara komprehensif dan proporsional. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari khalayaknya dari miskin informasi. Menurut mereka pemberitaan yang komprehensif dan proporsional akan membantu khalayak mengambil keputusan yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini kategori teknik penulisan digunakan untuk melihat sejauh mana kedalaman isi suatu tulisan. Teknik penulisan ini diklasifikasikan dalam dua macam yaitu *straight news* dan *depth news*. Suatu berita menggunakan *straight news* bila ditulis hanya memenuhi unsur 5W+1H (*what, who, why, when, where, how*) tanpa disertai penelaahan dan paparan yang lebih komprehensif oleh wartawan. Sedangkan teknik penulisan *depth news* memerlukan penelusuran fakta secara mendalam oleh wartawan dengan mewawancarai beberapa nara sumber. Penyajiannya sangat komprehensif dengan disertai data dan informasi dari sumber utama.

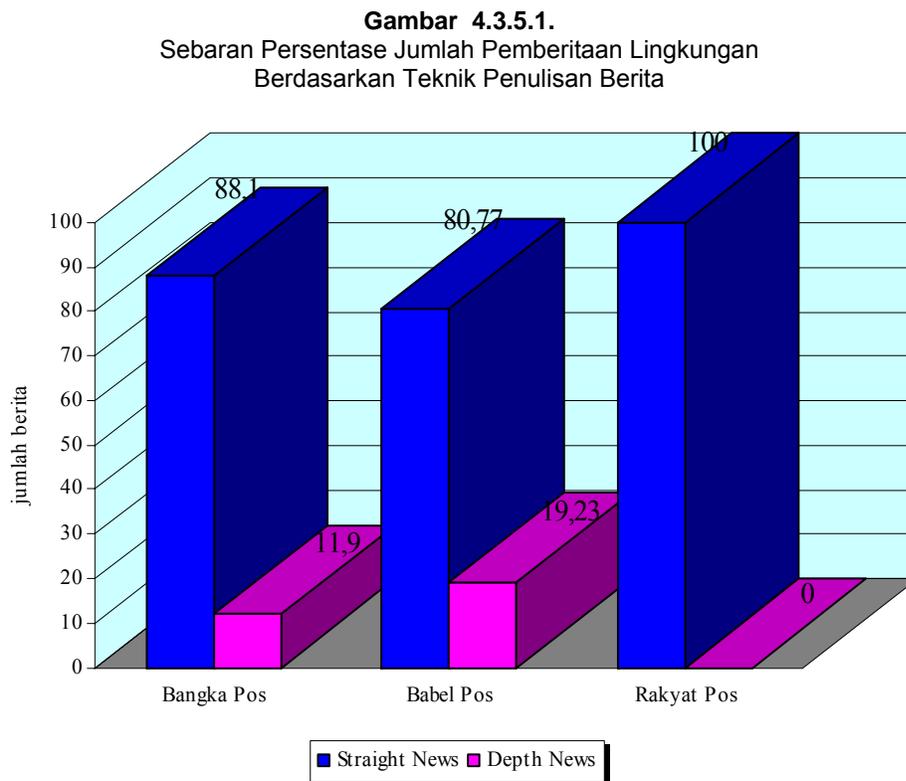
Santana (2004), menyebutkan bahwa jurnalisme membagi klasifikasi berita menjadi *hard news* dan *soft news*. Lebih lanjut menurutnya sebuah berita menjadi *hard* ketika muatan berita mengikuti kronologi 5W+1H, dan materi yang ditulis adalah fakta segera yang harus diketahui masyarakat. Sedangkan *soft news* menjadi pelanjut dan pengembang pelbagai berita utama namun disampaikan secara ringan.

Gambaran mengenai kedalaman tulisan penting untuk mengungkapkan bagaimana ketiga surat kabar menjalankan perannya sebagai media penyaji informasi yang diperlukan masyarakat dalam bidang lingkungan hidup, serta bagaimana pula surat kabar menjalankan misi jurnalistik lingkungan hidupnya untuk menumbuhkan kesadaran terhadap masalah-masalah lingkungan hidup. Informasi yang lengkap dan mendalam tentang suatu isu lingkungan hidup diyakini dapat

menggerakkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Assegaff (1996), penulisan masalah lingkungan sebaiknya menggabungkan jurnalistik proses dengan model penulisan mendalam (*indepth reporting*). Dikatakannya bahwa tulisan-tulisan yang menyertakan jurnalistik proses lebih dapat menggerakkan penghayatan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian dan kemampuan lingkungan

Bagaimana kedalaman tulisan lingkungan yang diberitakan oleh Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Data hasil olahan

Pemberitaan Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos yang mengangkat persoalan lingkungan dalam periode tahun 2005 didominasi oleh pemberitaan dengan format *straight news*. Sedangkan berita lingkungan yang dikemas secara komprehensif dan mendalam

dengan teknik *depth news* hanya sebagian kecil saja. Hal ini menggambarkan bahwa Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos cenderung menulis hal-hal yang lebih bersifat faktual sehingga kurang mengeksplorasi kompleksitas suatu permasalahan lingkungan melalui konsep *depth news*.

Bangka Pos tercatat sebesar 88,1% laporannya menggunakan teknik penulisan *straight news*. Hanya 11,9% saja yang menggunakan teknik penulisan *depth news*. Tidak berbeda dengan Bangka-Belitung Pos tulisan *straight news* mendominasi sebesar 80,77%, selebihnya 19,23% menggunakan teknik *depth news*. Demikian pula halnya dengan Rakyat Pos bahkan 100% tulisannya tentang lingkungan dilakukan dengan teknik *straight news*. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketiga surat kabar masih lebih banyak mengungkapkan kejadian faktual saja. Untuk lebih jelasnya sebaran pemberitaan berdasarkan teknik penulisan berita dapat dilihat pada lampiran 6 tentang tabel frekuensi.

Dari keterangan tadi dapat diartikan bahwa ketiga surat kabar belum menyajikan tulisan lingkungan dalam kerangka jurnalistik lingkungan hidup yang lebih dari sekedar mengungkapkan fakta. Dengan demikian ketiga surat kabar ini belum optimal dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas informasi lingkungan hidup, meskipun perannya dalam menyampaikan informasi lingkungan tidak pula dikatakan kecil. Hal ini lebih disebabkan masih terbatasnya sumberdaya manusia surat kabar itu sendiri, di samping itu karena dibatasi waktu yang sangat singkat dan dikejar *deadline*, sehingga tidak memungkinkan untuk menurunkan berita bersifat mendalam (*depth*) yang membutuhkan waktu lebih panjang. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan redaktur pelaksana harian pagi Bangka Pos, saudara Albana yang mengatakan

“.....untuk koran-koran di daerah belum mampu melakukan investigatif reporting , kami hanya bisa melakukan laporan-laporan yang sifatnya temuan saja, misalnya laporan-laporan dari masyarakat.....”. (Wawancara pada tanggal 5 Juni 2006).

Berikut ini adalah salah satu contoh penulisan berita dengan teknik *straight news* yang dimuat oleh Bangka-Belitung Pos tanggal 7 September 2005, pada halaman 4.

Desa Kace Kembali Bermasalah

“Desa Kace kembali bermasalah. Belum usai kasus pro dan kontra pembangunan gedung walet selasa (6/9) kemarin, warga Kace kembali menuntut penghentian aktivitas penambangan TI di lokasi yang sama sekitar Sungai Kace. Tuntutan tersebut disampaikan beberapa perwakilan warga Kace yang mendatangi komisi C dalam pertemuan di ruang panmus DPRD Bangka kemarin”.

4.3.6. Kategori Nara Sumber

Kategori nara sumber adalah orang yang dimintai keterangannya oleh wartawan untuk menulis suatu berita atau orang yang dijadikan rujukan dalam pemberitaan lingkungan yang termuat dalam surat kabar Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos.

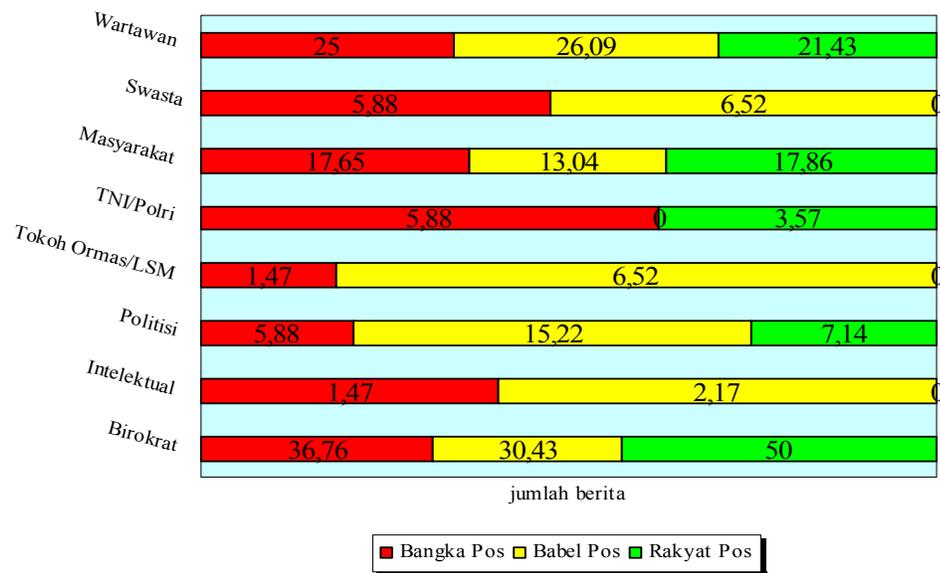
Nara sumber menjadi buruan media dalam mengangkat sebuah peristiwa. Hal ini terkait dengan dunia jurnalisme itu sendiri sebagai dunia pelaporan yang sangat dituntut tanggungjawabnya berkenaan dengan tingkat akurasi fakta yang disajikan (Santana, 2005). Dengan perkataan lain wartawan harus melandasi tulisannya tidak hanya berdasarkan fakta tapi harus pula memverifikasi fakta tersebut dari nara sumber yang secara langsung terkait dengan suatu peristiwa ataupun yang kompeten terhadap suatu persoalan.

Dalam suatu tulisan dapat terdiri lebih dari satu pernyataan atau kutipan nara sumber. Kategori nara sumber ini didasarkan pada atribut yang disandang nara sumber misalnya jabatan dan latar belakang. Dalam penelitian ini nara sumber dikategorikan menjadi birokrat, intelektual, politisi, tokoh Ormas/LSM, TNI/Polri, Masyarakat, Swasta, dan Wartawan.

Status nara sumber dapat mengindikasikan kecenderungan surat kabar terhadap suatu pemberitaan. Untuk mengetahui kecenderungan

surat kabar Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos, dalam kaitannya dengan berita lingkungan hidup, dapat diketahui melalui status nara sumber yang dominan muncul pada setiap pemberitaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.3.6.1.
Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Nara Sumber



Sumber : Data hasil olahan

Gambar di atas menunjukkan bahwa nara sumber yang paling sering dijadikan rujukan dan dimintai keterangannya dalam penulisan berita lingkungan didominasi oleh birokrat. Ketiga surat kabar memperlihatkan kecenderungan yang sama. Bangka pos menjadikan birokrat sebagai nara sumber utamanya yakni sebesar (36,76%), sementara itu Bangka-Belitung Pos sebesar (30,43%) dan Rakyat Pos sebesar (50%). Kenyataan tadi menunjukkan bahwa birokrat masih menjadi sumber utama untuk berita lingkungan bagi wartawan dan itu dapat dimengerti sebab birokrat dianggap paling memadai dan mudah untuk diminta komentarnya tentang persoalan lingkungan. Berkaitan

dengan Hal tersebut Oetama (1989), menyebutkan bahwa frekuensi yang tinggi tentang pemerintah sebagai sumber berita pers berlaku di negara dengan sistem sosial politik manapun, baik Indonesia, Amerika Serikat, atau Uni Soviet sekalipun. Lebih lanjut menurut Oetama hubungan pers dan pemerintah dalam kerangka mencari dan membuat berita, bukanlah hubungan sepihak, melainkan senantiasa timbal balik antara dua pihak.

Adapun nara sumber kedua setelah birokrat yang menjadi sumber berita adalah wartawan. Bangka Pos menjadikan wartawan sebagai nara sumbernya sebesar (25%), Bangka-Belitung Pos sebesar (26,09%), dan Rakyat Pos sebesar (21,43%). Dalam hal ini wartawan menjadi nara sumber berita pada rubrik-rubrik foto. Hal ini paralel dengan sebaran berita berdasarkan kategori ruang rubrikasi dimana rubrik foto menempati posisi kedua terbanyak setelah artikel berita..

Sementara itu nara sumber ketiga yang menjadi rujukan dan dimintai keterangannya dalam suatu pemberitaan adalah masyarakat. Tercatat Bangka Pos menggunakan masyarakat sebagai nara sumber sebesar (17,65%) dan Rakyat Pos sebesar (17,86%). Sementara itu Bangka-Belitung Pos menjadikan politisi sebagai nara sumber ketiga yang paling sering dimintai komentarnya yakni (15,22%). Untuk lebih jelasnya sebaran pemberitaan berdasarkan nara sumber berita dapat dilihat pada lampiran 6 tentang tabel frekuensi.

Berikut contoh berita berdasarkan kategori nara sumber birokrat yang dimuat Bangka Pos pada tanggal 11 Juni 2005 halaman 2.

Pemilik Bongkar Alat TI Sendiri

Kepada Bangka Pos Group, Camat Rangkui Drs. Suparyono, MM menjelaskan penertiban TI di kolong Bilon karena ada laporan dari masyarakat. "Setelah kami cek, dua TI itu baru beroperasi Selasa (7/6). Makanya bersama anggota kepolisian, satpol PP pemkot Pangkalpinang melakukan penertiban," ujarnya.

Adapun contoh berita berdasarkan kategori nara sumber politisi yang dimuat oleh Rakyat Pos pada tanggal 7 September 2005 halaman 2 dapat dilihat sebagai berikut.

Merasa Resah, Warga Adukan Bangunan Walet Asian

.....Menurut Supriadi MHI, SH salah seorang anggota Komisi B, sepekan sebelumnya, kendati belum ada laporan dari masyarakat, komisi B telah turun ke lapangan dan membenarkan memang demikianlah adanya. Saat air pasang atau hujan besar diakuinya banyak rumah warga di sekitar bangunan walet tersebut yang tergenang air.

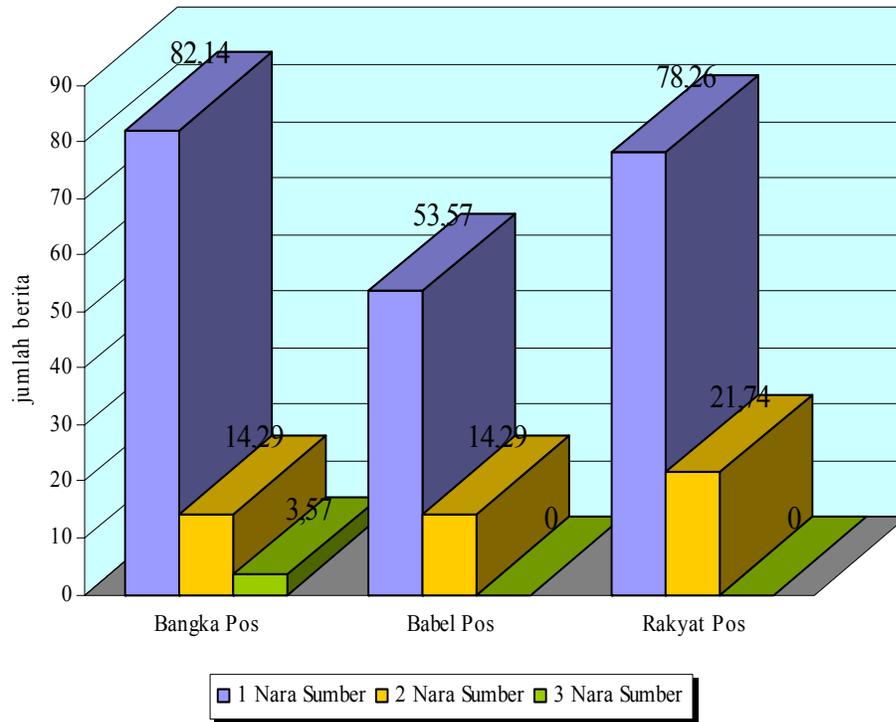
4.3.7. Kategori Jumlah Nara sumber

Salah satu ciri jurnalisme yang baik (*good journalism*) menurut Kovach & Rosenstiel dalam (Santana, 2005) adalah memiliki disiplin untuk melakukan verifikasi. Hal ini terkait dengan kegiatan menelusuri sekian saksi untuk sebuah peristiwa, mencari sekian banyak nara sumber, dan mengungkap sekian banyak komentar. Disiplin melakukan verifikasi ini penting untuk menjamin keakuratan suatu berita. Oleh sebab itu wartawan hendaknya melakukan penelusuran ke berbagai sumber informasi, hal ini dilakukan dengan harapan akan mengungkapkan fakta-fakta dari suatu peristiwa, sehingga khalayak akan mendapatkan informasi yang terjaga validitasnya.

Dalam penulisan setiap artikel berita pada media cetak khususnya surat kabar sebaiknya tidak hanya berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan, tetapi juga harus menyertakan opini dari nara sumber yang kompeten, seperti kalangan birokrat, politisi, TNI/Polri, masyarakat umum serta kaum intelektual dan lain sebagainya. Banyaknya nara sumber berbeda yang ada dalam suatu artikel berita menunjukkan bagaimana upaya wartawan dalam mencari kelengkapan bahan berita. Suatu artikel berita yang memuat tentang isu lingkungan idealnya menyertakan opini nara sumber yang berbeda guna mewujudkan pemberitaan yang berimbang (*cover both side*).

Berikut ini adalah gambar rincian jumlah nara sumber yang terdapat dalam pemberitaan lingkungan di surat kabar Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos.

Gambar 4.3.7.1.
Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan
Berdasarkan Jumlah Nara Sumber



Sumber : Data hasil olahan

Gambar di atas menunjukkan sebagian besar berita mengenai lingkungan pada ketiga surat kabar hanya menggunakan satu nara sumber. Bangka Pos tercatat menggunakan satu nara sumber dalam tulisannya dengan jumlah sebesar (82,14%), Bangka-Belitung Pos tercatat (78,95%), sedangkan Rakyat Pos sebesar (78,26%). Sementara itu berita yang menggunakan dua nara sumber yang berbeda dalam tulisannya, untuk Bangka Pos sebesar (14,29%), Bangka-Belitung Pos tercatat (21,05%), dan Rakyat Pos sebesar (21,74%). Adapun yang menggunakan tiga nara sumber dalam pemberitaannya hanya Bangka Pos yakni sebesar (3,57%). Sementara itu Bangka-Belitung Pos dan Rakyat Pos tidak menggunakan nara sumber ketiga dalam tulisannya. Untuk lebih

jelasnya sebaran pemberitaan berdasarkan jumlah nara sumber berita dapat dilihat pada lampiran 6 tentang tabel frekuensi.

Di sini terlihat bahwa persentase jumlah nara sumber yang dijadikan rujukan pada tulisan lingkungan oleh wartawan berasal dari satu nara sumber. Minimnya jumlah nara sumber tersebut, mengindikasikan bahwa ketiga surat kabar tidak terlalu melakukan penelusuran mendalam tentang persoalan lingkungan yang ditulisnya. Pemberitaan hanya menyertakan satu opini nara sumber sebagai kutipan dan ditambah sedikit opini dari wartawan.

Dalam pandangan Kovach & Rosenstiel dalam (Santana,2005) keadaan ini mengindikasikan telah terjadi *Bad Journalism*, dimana media dianggap kurang cakap melaporkan pemberitaan yang penting untuk diketahui masyarakat. Media yang memberitakan suatu peristiwa secara dangkal, sembrono, dan tidak lengkap, sering disebut tidak akurat dan tidak *cover both sides*. Ini berbahaya bagi masyarakat karena ketidaklengkapan informasi yang didapatnya. Lebih lanjut menurut Kovach dan Rosenstiel semua itu dikarenakan kemalasan meliput dan kedangkalan pelaporan. Lebih ekstrim dikatakannya bahwa kerja media cuma mengisi kolom demi kolom dengan hal-hal yang “halus dan sepele”, enggan berurusan dengan hal-hal “penting dan penuh pertempuran”, lebih banyak menimba fakta-fakta yang sudah “siap edar” dari nara sumber yang sudah rutin dan formal dan “siap wawancara”. Buruknya pemberitaan media menyebabkan ketidaktahuan masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan kerugian.

Berikut contoh berita berdasarkan kategori jumlah nara sumber sebanyak 3 orang (birokrat, masyarakat, swasta) yang dimuat Bangka Pos pada tanggal 3 Januari 2005 halaman 2.

TI Beroperasi di Bawah Kawat Bertegangan Tinggi

..... Salah seorang warga Kuday Hartono, kepada Grup Bangka Pos, Kamis (30/12), mengatakan sebenarnya ia tidak mau ambil pusing dengan kegiatan mereka di bawah jalur listrik PT.Timah tersebut. Namun aktivitas TI mulai merambat ke tanah milik mereka dan ditakutkan pada musim hujan ini

akan terjadi longsor. “Beberapa waktu lalu Bangka Pos pernah memberitakan mengenai hal ini, dan mereka sempat menghentikan aktivitas mereka, entah mengapa mereka saat ini mulai melakukan aktivitasnya menggali timah”, kata Hartono.

Lurah Kuday Toni Ali mengatakan ia belum mengetahui persis tentang adanya aktivitas TI di bawah jalur listrik PT.Timah tersebut. “Kita akan mengecek ke lokasi tersebut dan mencoba memberi pengertian kepada mereka bahwa daerah tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan mereka”, kata Toni Ali.

Sementara itu pihak PT. Timah melalui Kepala Humas PT.Timah Drs. Abrun Abu Bakar mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan petugas untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. “Saat ini kita hanya menghimbau kepada warga yang membuka TI di jalur listrik tegangan tinggi PT.Timah untuk segera menghentikan aktifitas tersebut, karena sangat berbahaya”, kata Abrun.

4.3.8. Kategori Tema Berita

Tema suatu pemberitaan dimaknai sebagai substansi isi berita. Kategori tema berita dalam kajian ini diklasifikasikan dalam sembilan tema, masing-masing Hukum Lingkungan, Kebijakan Lingkungan, Pendidikan Lingkungan, Dampak Lingkungan, Konflik Lingkungan, Budaya Lingkungan, Kelembagaan Lingkungan, Partisipasi Lingkungan, dan Propaganda lingkungan. Dari masing-masing klasifikasi tadi diuraikan lagi ke dalam jenis-jenis berita sebagaimana dijelaskan pada bagian kategorisasi di bab terdahulu.

Tema berita akan sangat terkait dengan nilai suatu berita (*news values*). (Santana, 2005), menyebutkan beberapa elemen nilai berita yang mendasari pelaporan suatu peristiwa, antara lain; kesegaran peristiwa (*immediacy*), kedekatan (*proximity*), konsekuensi (*consequence*), konflik (*conflict*), tidak biasa (*oddity*), seks (*sex*), emosi (*emotion*), terkenal (*prominence*), ketegangan (*suspence*), dan perkembangan (*progress*).

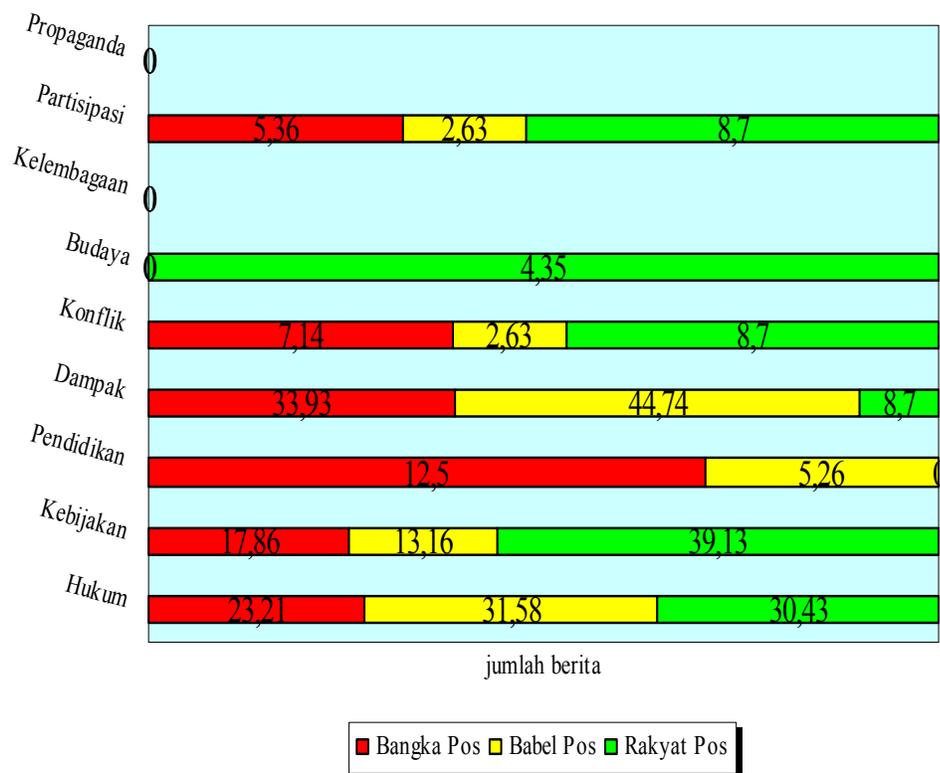
Intensitas pemberitaan tentang suatu peristiwa dengan tema tertentu sangat dipengaruhi oleh aktualitas dan nilai pentingnya suatu peristiwa. Perhatian media akan dengan mudah beralih ketika terjadi suatu peristiwa baru yang menjadi pusat perhatian publik. Hal ini wajar terjadi di dalam industri pers, karena pemberitaan tentang suatu peristiwa

yang sedang hangat terjadi, ditinjau dari sisi aktualitas akan memiliki nilai jual lebih dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya.

Bagaimana Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos menuliskan berita lingkungan berdasarkan tema mengindikasikan bahwa isu atau persoalan lingkungan dimaksud merupakan hal menarik bahkan mungkin penting untuk dijadikan bahan masukan bagi pihak berkepentingan (*stakeholders*) lingkungan untuk mengambil suatu tindakan ataupun kebijakan selanjutnya.

Untuk lebih jelasnya, melalui gambar berikut akan terlihat tema apa yang frekuensi kemunculannya tinggi.

Gambar 4.3.8.1.
Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan
Berdasarkan Tema Berita



Sumber : Data hasil olahan

Dari gambar terlihat berita lingkungan yang bertemakan dampak lingkungan lebih mendominasi berita-berita yang ditulis Bangka Pos (33,93%), di urutan kedua didominasi tema hukum lingkungan (23,21%). Sisanya tersebar masing-masing tema kebijakan lingkungan (17,86%), pendidikan lingkungan (12,50%), konflik lingkungan (7,14%) dan partisipasi lingkungan (5,36%). Sementara itu tema budaya lingkungan, kelembagaan lingkungan dan propaganda lingkungan tidak ada sama sekali.

Bangka-Belitung Pos memuat berita lingkungan bertemakan dampak lingkungan (44,74%) dan untuk urutan kedua adalah berita bertemakan hukum lingkungan (31,58%). Kemudian 13,16% bertemakan kebijakan lingkungan, 5,26% bertemakan pendidikan lingkungan. Sedangkan berita bertemakan konflik dan partisipasi lingkungan masing-masing sebesar 2,63%. Tidak ada berita bertemakan budaya lingkungan, kelembagaan lingkungan dan propaganda lingkungan yang dimuat Bangka-Belitung Pos.

Berbeda dengan dua harian tadi, Rakyat Pos cenderung menulis berita lingkungan bertemakan kebijakan lingkungan sebesar 39,13% dan diurutan kedua berita lingkungan yang bertemakan hukum lingkungan (30,43%). Selanjutnya masing-masing 8,70% berita lingkungan bertemakan dampak lingkungan, konflik lingkungan dan partisipasi lingkungan. Berita bertemakan budaya lingkungan tercatat hanya 4,35%. Tema-tema pendidikan lingkungan, kelembagaan lingkungan dan propaganda lingkungan tidak ditemukan pada Rakyat Pos. Untuk lebih jelasnya sebaran pemberitaan berdasarkan tema berita dapat dilihat pada lampiran 6 tentang tabel frekuensi.

Secara umum berita yang mengangkat tema dampak lingkungan menunjukkan trend paling diminati oleh surat kabar. Berita-berita yang termasuk klasifikasi tersebut misalnya masalah banjir, pencemaran air akibat aktifitas penambangan, kecelakaan kerja di pertambangan, kerusakan pantai oleh aktifitas penambangan di laut, kerusakan hutan

bakau, berjangkitnya malaria, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh berita yang bertemakan dampak lingkungan yang ditulis Bangka Pos pada tanggal 23 Maret 2005 di halaman 3.

Air Keruh, PDAM Tak Berdaya

Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) kota Pangkalpinang tidak mampu mengatasi keruhnya air yang disuplai kepada para pelanggannya karena tingkat kekeruhannya sudah sangat tinggi.

“Kita tidak berdaya lagi menangani tingkat kekeruhan air yang sudah sangat tinggi, jelas Direktur PDAM kota Pangkalpinang, Ir Budi Dharma Setiawan, Selasa (22/3) di ruang kerjanya. Dijelaskannya keruhnya air disebabkan maraknya tambang inkonvensional yang beraktivitas di sekitar sumber air baku Pedindang.

Berita yang bertemakan hukum lingkungan misalnya tulisan tentang ketaatan terhadap AMDAL, penertiban terhadap kegiatan penambangan ilegal, penyitaan kayu *illegal logging*, dan sebagainya. Contoh berita yang bertemakan hukum lingkungan dapat dilihat pada pemberitaan yang ditulis Bangka-Belitung Pos pada tanggal 15 Febuari 2005 halaman 4.

Polhut Sita Kayu Ilegal

Setelah berhasil menyita 5 kubik kayu olahan dari Kota Waringin Kecamatan Mendo Barat beberapa waktu lalu, Polisi Hutan Kabupaten Bangka kembali menggagalkan pencurian kayu di wilayah Kabupaten Bangka, Jum’at (11/2) lalu.

Dalam operasi itu lima anggota Polhut Dinas Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Bangka berhasil menyelamatkan 57 batang kayu bulat dan 50 keping kayu olahan yang dicuri dari kawasan hutan lindung kaki bukit Maras Desa Dalil Kecamatan Bakam.

Sementara itu berita bertemakan kebijakan lingkungan misalnya berita tentang upaya pemkab memfasilitasi warga buka lahan sawit, sosialisasi perijinan pengelolaan kayu, rencana tata ruang dan sebagainya. Berikut contoh berita bertema kebijakan lingkungan yang ditulis Rakyat Pos pada tanggal 28 April 2005 halaman 3.

Benahi Tata Ruang, Pemerintah Kota Butuh Pemekaran

Menjadikan Kota Pangkalpinang pada suatu wilayah tertata dengan rapi dan bersih dengan fasilitas umum yang lengkap, memang tidak semudah yang dibayangkan. Karena itu, Pemkot masih perlukan pembenahan tata ruang yang berkaitan dengan alokasi tempat sarana dan prasarana umum untuk kepentingan masyarakat banyak. Diantaranya keberadaan lokasi air baku untuk keperluan sehari-hari, sarana dan prasarana umum seperti alokasi pasar yang menunjang ekonomi masyarakat serta sarana dan prasarana perumahan. Pemerintah kota menargetkan, tepat hari jadi kota Pangkalpinang, sudah ada peraturan daerahnya mengenai perluasan wilayah.

Beberapa berita tersebut paling tidak memiliki nilai kesegaran peristiwa (*immediacy*) karena sifatnya aktual. kedekatan (*proximity*) karena terjadi di lingkungan sekitar, konsekuensi (*consequence*) karena akan berdampak pada kehidupan secara langsung, konflik (*conflict*) karena terkandung potensi konflik, emosi (*emotion*) karena banyak yang menjadi korban, dan perkembangan (*progress*) karena ditunggu bagaimana tindakan yang akan diambil oleh pihak berkepentingan.

4.3.9. Kategori Substansi Aspek Kebijakan

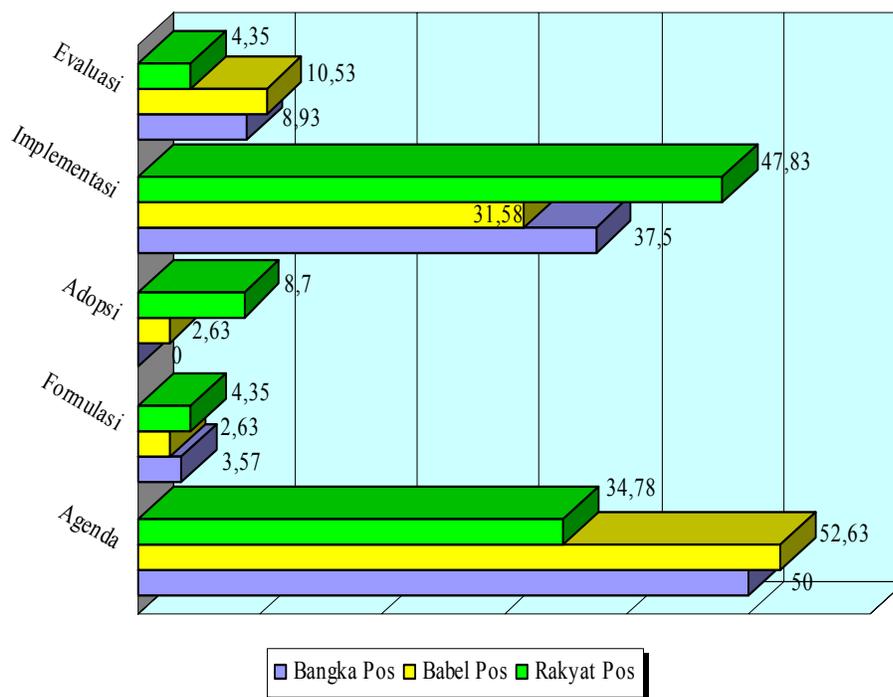
Kategori substansi aspek kebijakan ini dimaksudkan untuk melihat kecenderungan isi suatu berita lingkungan dilihat dari proses tahap kebijakan. Aspek kebijakan dalam hal ini direpresentasikan pada lima tahap kebijakan yaitu tahap penyusunan agenda kebijakan, adopsi kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Bagaimana kecenderungan Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos menulis berita lingkungan tentu akan memiliki implikasi terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan, sebagaimana disampaikan oleh redaktur pelaksana harian pagi Bangka Pos saudara Albana. Ia mengatakan bahwa :

“Di Bangka Pos isu-isu tentang persoalan lingkungan hidup senantiasa dikedepankan.....,.....ini akan digulirkan terus sehingga paling tidak mempengaruhi kebijakan-kebijakan”.

Berikut ini adalah gambar jumlah pemberitaan lingkungan berdasarkan substansi isi tahap kebijakan yang dimuat di surat kabar Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos.

Gambar 4.3.9.1.
Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan Berdasarkan Substansi Isi Tahap Kebijakan



Sumber : Data hasil olahan

Dari gambar di atas terlihat bahwa Bangka Pos dalam tulisannya memuat tulisan lingkungan yang lebih bermuatan informasi untuk tahap penyusunan agenda kebijakan yakni sebesar 50%. Pada urutan kedua berita Bangka Pos lebih mengarah pada tahap implementasi kebijakan yakni sebesar 37,50%, kemudian 8,93% berita mengarah pada tahap evaluasi kebijakan dan 3,57% berita mengarah pada tahap formulasi

kebijakan. Tak satupun berita yang mengarah pada tahap adopsi kebijakan.

Tidak berbeda dengan Bangka Pos data pada tabel menunjukkan bahwa Bangka-Belitung Pos juga lebih sering menuliskan berita yang mengarah pada tahap penyusunan agenda kebijakan yakni sebesar 52,63%. Kemudian di urutan kedua berita yang mengarah pada tahap implementasi kebijakan sebesar 31,58%. Selanjutnya berita yang mengarah pada tahap evaluasi kebijakan sebesar 8,9% dan masing-masing 2,63% berita mengarah pada tahap formulasi dan adopsi kebijakan.

Sementara itu Rakyat Pos lebih sering menurunkan berita lingkungan yang mengarah pada tahap implementasi kebijakan yaitu sebesar 47,83%, disusul berita untuk tahap penyusunan agenda kebijakan sebesar 34,78%. Selanjutnya berita yang mengarah pada tahap adopsi kebijakan sebesar 8,70% dan masing-masing 4,35% berita yang mengarah pada tahap formulasi serta evaluasi kebijakan. Untuk lebih jelasnya sebaran pemberitaan berdasarkan substansi isi tahap kebijakan dapat dilihat pada lampiran 6 tentang tabel frekuensi.

Secara umum berita yang diturunkan ketiga surat kabar cenderung mengarah pada tahap penyusunan agenda kebijakan. Berita-berita dengan muatan tahap penyusunan agenda ini misalnya berita tentang tambang inkonvensional yang beroperasi di bawah kawat bertegangan tinggi, pekerja tambang pendatang yang terlantar, terjadinya kemacetan akibat banjir, pekerja tambang yang mengalami kecelakaan kerja, sumber air yang tercemar dan sebagainya.

Tentunya berita-berita tersebut dimaksudkan sebagai bahan masukan (*input*) kepada pihak berkepentingan untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan isu atau permasalahan yang digulirkan. Hal ini menjelaskan bahwa berita-berita lingkungan yang ditulis ketiga surat kabar seringkali berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya melaporkan sesuatu yang terjadi untuk bahan masukan khususnya dalam

pengambilan suatu kebijakan, yang dalam perspektif kebijakan publik dapat disebut sebagai tuntutan kebijakan (*policy demands*).

Winarno (2002), menyebutkan bahwa tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*) dibuat oleh aktor swasta atau pemerintah, di tujukan kepada pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan tersebut dapat merupakan suatu desakan agar pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu.

Berikut ini contoh berita dengan substansi isi mengarah pada tahap penyusunan agenda kebijakan yang ditulis Bangka-Belitung Pos.

Gbr.4.3.9.2. Sumber Air Tercemar, Warga Ngadu ke Dewan



Sbr. Bangka-Belitung Pos tanggal 23 Maret 2005 halaman 5.

Selain berita yang memiliki substansi isi pada tahap penyusunan agenda kebijakan, berita-berita yang ditulis oleh ketiga surat kabar juga banyak yang bermuatan tahap implementasi kebijakan. Berita yang masuk dalam kategori ini antara lain berita tentang operasi penertiban TI oleh tim

PETI, pembagian 500 bibit pohon untuk penghijauan, pelatihan dasar kesehatan lingkungan bagi bidan, pemkab fasilitasi warga buka lahan sawit, polhut sosialisasikan perijinan pengelolaan kayu, dan sebagainya.

Implementasi suatu kebijakan oleh lembaga pemerintah merupakan salah satu sumber pemberitaan bagi wartawan. Artinya ada *simbiosis mutualisme* antara pers dan pemerintah sebagaimana disebutkan oleh Oetama (1989). Dalam hal ini pemerintah berkepentingan untuk mengekspos kebijakan berikut implementasinya di lapangan yang intinya lebih jauh adalah sosialisasi bagi masyarakat bahwa ada program pemerintah yang telah dilaksanakan. Bagi pers sendiri yang merupakan agen untuk menyebarkan informasi juga agen dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan tentunya pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah tersebut merupakan bahan menarik untuk diinformasikan kepada khalayak pembacanya.

Berikut ini contoh berita dengan substansi isi mengarah pada tahap implementasi kebijakan yang ditulis Bangka Pos tanggal 23 Maret 2005 halaman 1-15.

Tim Penertiban Pergi, Mesin TI Kembali Riu

Tim Penertiban Tambang Ilegal (PETI) kembali melakukan penertiban tambang inkonvensional (TI) di Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Selasa (22/3). Sedikitnya delapan unit TI yang beroperasi di tiga lokasi dekat permukiman penduduk dan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kelurahan Sungai Daeng, Mentok ditutup.

.....Anggota tim PETI merupakan gabungan dari pemkab Bangka Barat, Camat Mentok, Polres, Kejaksaan Negeri, ditambah Satpol PP.....

4.4. Analisis Implikasi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Implikasi pemberitaan lingkungan terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di kabupaten Bangka dapat ditinjau dengan cara menganalisis isi berita menggunakan tabulasi silang antara kategori tema berita dengan kategori tahap kebijakan dan menganalisis isi berita menggunakan tabulasi silang antara kategori nara sumber berita dengan kategori tahap

kebijakan. Untuk mempertajam penjelasan tadi akan dipadukan dengan hasil wawancara terhadap pihak eksekutif, legislatif, LSM, serta redaktur surat kabar. Dalam hal ini pihak eksekutif diwakili oleh Kepala Dinas Pertambangan, dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Sementara itu pihak legislatif diwakili oleh satu orang anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bangka. Dari hasil wawancara ini akan terlihat sejauhmana persepsi pengambil kebijakan terhadap persoalan lingkungan dan sejauhmana surat kabar memberikan warna dalam proses pembuatan suatu kebijakan sejak tahap penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu kebijakan.

Keterangan dari LSM digunakan untuk melakukan cek silang dengan tujuan mengetahui sejauhmana LSM dilibatkan dalam hal penentuan kebijakan dan sejauhmana hak akan informasi lingkungan terpenuhi, misalnya hak untuk ikut ambil bagian berwacana melalui surat kabar dalam menyampaikan tuntutan-tuntutannya dan hak berpartisipasi dalam suatu proses pembuatan kebijakan lingkungan. Dari berbagai keterangan tadi akan dapat diketahui interelasi pemberitaan lingkungan terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka.

Winarno (2005), menyebutkan beberapa faktor yang mendorong suatu isu masuk ke agenda kebijakan. Pertama, isu-isu publik akan mencapai status agenda karena suatu krisis atau peristiwa kritis. Kedua, agar suatu masalah menjadi agenda kebijakan adalah dengan melakukan protes. Ketiga, adalah perhatian media massa terhadap suatu isu.

Lebih lanjut menurut Winarno dalam beberapa penelitian berkenaan dengan peran serta warga negara, terungkap bahwa para pembuat kebijakan lebih responsif terhadap warga negara yang mempunyai peran serta. Disamping itu pembuat kebijakan cenderung menerima tuntutan-tuntutan dan pilihan-pilihan agenda yang diusulkan oleh kelompok warga negara yang berperan serta dalam rangka memecahkan masalah.

Berikut hasil tabulasi silang antara kategori tema berita dan tahap kebijakan yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.4.1.
Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan
Berdasarkan Tema Berita dengan Substansi Isi Tahap Kebijakan

Tema Berita		Tahap Kebijakan					Total
		Penyusunan	Formulasi	Adopsi	Implementasi	Evaluasi	
Hukum Lingkungan	Count	7	1	0	21	3	32
	% Tema Berita	21,9	3,1	,0	65,6	9,4	100,0
	% Tahap Kebijakan	12,5	25,0	,0	47,7	30,0	27,4
Kebijakan Lingkungan	Count	2	1	3	15	3	24
	% Tema Berita	8,3	4,2	12,5	62,5	12,5	100,0
	% Tahap Kebijakan	3,6	25,0	100,0	34,1	30,0	20,5
Pendidikan Lingkungan	Count	4	0	0	2	3	9
	% Tema Berita	44,4	,0	,0	22,2	33,3	100,0
	% Tahap Kebijakan	7,1	,0	,0	4,5	30,0	7,7
Dampak Lingkungan	Count	34	2	0	1	1	38
	% Tema Berita	89,5	5,3	,0	2,6	2,6	100,0
	% Tahap Kebijakan	60,7	50,0	,0	2,3	10,0	32,5
Konflik Lingkungan	Count	7	0	0	0	0	7
	% Tema Berita	100,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	% Tahap Kebijakan	12,5	,0	,0	,0	,0	6,0
Budaya Lingkungan	Count	1	0	0	0	0	1
	% Tema Berita	100,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	% Tahap Kebijakan	1,8	,0	,0	,0	,0	,9
Partisipasi Lingkungan	Count	1	0	0	5	0	6
	% Tema Berita	16,7	,0	,0	83,3	,0	100,0
	% Tahap Kebijakan	1,8	,0	,0	11,4	,0	5,1
Total	Count	56	4	3	44	10	117
	% Tema Berita	47,9	3,4	2,6	37,6	8,5	100,0
	% Tahap Kebijakan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Data hasil olahan

Tabel di atas menunjukkan secara umum dari persentase berita lingkungan yang ditulis surat kabar yang ada di Bangka Belitung dilihat dari substansi isi yang terkandung, sebesar 47,9% merupakan tulisan-tulisan yang bersifat menginformasikan kejadian faktual tentang

lingkungan yang dapat dianggap sebagai masukan (*input*) untuk tahap penyusunan agenda kebijakan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa surat kabar selain telah menjalankan fungsi informasinya sekaligus juga menjalankan fungsi kontrol (*watchdog*) terhadap pemerintah, yakni menjalankan hak mengoreksi dan mengontrol dalam masalah pengelolaan lingkungan hidup (Atmakusumah,1996).

Apa yang ditulis surat kabar tentang persoalan lingkungan dapat dikatakan telah sesuai dengan perannya, lebih khusus lagi dalam menyampaikan tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*) kepada pemerintah terutama di bidang lingkungan. Hal ini sejalan dengan keterangan yang didapat dari wawancara dengan redaktur pelaksana harian pagi Bangka Pos saudara Albana yang mengatakan sebagai berikut :

“Di Bangka Pos isu-isu tentang persoalan lingkungan hidup senantiasa dikedepankan.....,ini akan digulirkan terus sehingga paling tidak mempengaruhi kebijakan-kebijakan”. (Wawancara pada tanggal 5 Juni 2006).

Berkaitan dengan isu-isu lingkungan yang ditulis oleh wartawan sebagai bagian dari tuntutan kebijakan atau *policy demands* dan disampaikan melalui surat kabar dalam rangka memberikan masukan kepada Pengambil Kebijakan, dilakukan wawancara dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka yang mengemukakan sebagai berikut :

“Pers itu adalah unsur penekan atau pengawas terhadap kinerja pemerintah, ataupun bersifat informatif terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah, jadi pers menjadi salah satu tolok ukur kita bekerja. Bagi saya pers itu positif, dalam arti membuka wacana masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang ada sehingga masyarakat tahu, pemerintah juga tahu, bagi pemerintah, walaupun ada kritikan dia bisa tahu apa yang harus dilakukan dan bagi masyarakat, dia juga tahu program pemerintah”.

“Saya memerlukan informasi pers, pertama pada saat saya harus melakukan penertiban. Misalnya, untuk mengetahui lokasi terjadinya kegiatan penambangan di kawasan terlarang dari pemberitaan pers. kedua, dari pers itu saya tahu apa yang mesti saya lakukan”. (Wawancara pada tanggal 13 Juni 2006).

Dari dua keterangan di atas diketahui bahwa antara pers dengan pihak pemerintah telah terjadi *simbiosis mutualisme*. Pada satu sisi pers telah menjalankan perannya sebagai fungsi informatif sekaligus fungsi kontrol. Pada sisi lain pemerintah membutuhkan informasi dari pers untuk mendukung pekerjaannya.

Beberapa keterangan lain yang senada dari hasil wawancara berkenaan dengan hal di atas dapat dilihat sebagai berikut :

“Kita rutin menggunakan media massa dalam bentuk tulisan untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan,..... sejauh ini LSM tetap melakukan tekanan terhadap kebijakan pemerintah melalui tulisan di surat kabar....”, “Surat kabar juga sering mengakomodir tulisan-tulisan yang kita sampaikan untuk di ekspos.... (wawancara dengan ketua LSM Plantari, pada tanggal 5 Juni 2006).

“Ketika membuat kebijakan kita akan melihat masukan dari masyarakat, masukan media tetap kita pertimbangkan juga,... namun saya pilah-pilah mana yang layak saya ambil mana yang tidak”. (wawancara dengan anggota Komisi C DPRD Kab.Bangka, pada tanggal 6 Juni 2006).

Dari beberapa hal di atas tadi apabila dilihat dari delapan tangga partisipasi Arstein dapat dikatakan bahwa peranserta yang dilakukan oleh pers maupun Lembaga Swadaya Masyarakat berada pada tingkat *partnership* dimana masyarakat memiliki ruang untuk bernegosiasi dan terlibat dalam “*trade-off*” dengan para pemegang kekuasaan. Tidak hanya itu bahwa ruang partisipasi melalui pers juga ternyata di perlukan oleh pemerintah untuk mendapatkan masukan-masukan sekaligus sosialisasi berbagai program dan kegiatan yang akan dibuat maupun yang telah dilaksanakan.

Terbukanya ruang partisipasi bagi stakeholders untuk ambil bagian memberikan masukan maupun koreksi yang dilakukan oleh pers maupun yang difasilitasi oleh pers berdasarkan kondisi yang ada ternyata mendapat respon yang positif oleh pembuat kebijakan. Hal tersebut terindikasi dari beberapa keterangan yang diberikan oleh eksekutif dan legislatif sebagaimana hasil wawancara. Dari beberapa pemberitaan

tentang terjadinya kerusakan lingkungan akibat penambangan liar yang dilakukan masyarakat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan mengadakan penertiban para penambang liar. Tidak hanya itu maraknya penambangan yang tidak ramah lingkungan di Bangka Belitung yang banyak menimbulkan kerusakan mendapat respon keras pula dari pemerintah pusat. Hal tersebut tak lepas dari rajinnya pers nasional yang juga turut memberitakan kondisi kerusakan lingkungan di Bangka Belitung.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro (Kompas, 2006) menyebutkan bahwa persoalan peti /TI belakangan berkembang tak lagi sekedar persoalan legalitas dan perebutan lahan antara rakyat dan pemilik kuasa pertambangan. Namun sudah meluas menjadi konflik besar dengan beragam permasalahan, mulai dari kerusakan lingkungan, penyelundupan dan ekspor bijih timah, rebutan rezeki, hilangnya penerimaan royalti, hingga terancam kolapsnya PT.Timah Tbk, yang sebelumnya menguasai aktivitas penambangan dan perdagangan timah di Indonesia. Berlandaskan berbagai kompleksitas permasalahan tersebut menurut Purnomo, pemerintah telah merencanakan beberapa langkah lintas departemen/instansi. Depdagri akan mengevaluasi kembali ketentuan perizinan smelter. Depkeu akan mengevaluasi kembali ketentuan royalti timah. Depdag akan mengevaluasi ketentuan ekspornya.

Respon yang diberikan pemerintah pusat antara lain mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara kegiatan peleburan timah yang dilakukan oleh pabrik peleburan timah (smelter) dan mengadili para penanggung jawabnya, karena dianggap melanggar UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan Umum. Di samping itu dilakukan penataan ulang terhadap kebijakan pertambangan khususnya yang dibuat oleh pemerintah daerah yang selama ini dianggap menjadi pangkal terjadinya kegiatan penambangan liar yang besar-besaran.

Di Kabupaten Bangka sejak ada kebijakan pemerintah pusat untuk menata kembali kegiatan penambangan timah, pemerintah daerah telah mengeluarkan maklumat untuk menghentikan seluruh proses pembuatan perijinan kegiatan penambangan, dan meningkatkan upaya penertiban bagi penambang-penambang liar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka terutama yang jelas-jelas melakukan aktifitasnya di daerah-daerah terlarang.

Lebih lanjut berkenaan dengan tema yang paling sering menjadi bahan pemberitaan sehubungan dengan tahap penyusunan agenda kebijakan adalah tema dampak lingkungan, yakni sebesar 60,71% disusul tema hukum lingkungan dan konflik lingkungan masing-masing sebesar 12,5%. Tema dampak lingkungan ini didominasi oleh pemberitaan tentang aktivitas penambangan terutama tambang inkonvensional. Tema dampak lingkungan ini memang hal yang wajar menjadi bagian terbesar dari tulisan lingkungan, sebab persoalan-persoalan lingkungan ini nilainya penting dan berkaitan dengan kepentingan publik. Dari pengamatan terhadap berita lingkungan yang ada tidak jauh berbeda dengan tema dampak lingkungan, tema-tema hukum lingkungan dan konflik lingkungan isinya cenderung berisikan aktivitas penambangan dengan segala kompleksitasnya.

Sementara itu pada urutan selanjutnya substansi isi berita lingkungan banyak menyoroti tahap implementasi kebijakan yakni sebesar 37,6%. Adapun berita yang termasuk pada tahap implementasi kebijakan ini sebesar 47,7% adalah berita yang bertemakan hukum lingkungan, disusul berita bertemakan kebijakan lingkungan yakni sebesar 34,1%.

Berita yang terkait dengan tahap implementasi lingkungan ini adalah berita yang berisi kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah berkenaan dengan lingkungan. Pers sebagaimana fungsi yang disandangnya memang memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi, disamping itu pers juga membuka ruang untuk saling berinteraksi antara berbagai komponen masyarakat. Dalam hal ini

tak jarang pemerintah memanfaatkan kemampuan yang dimiliki pers untuk mengekspos kebijakan-kebijakan yang dibuatnya dalam bentuk program, proyek ataupun tindakan yang dijelaskannya.

Berkaitan dengan banyaknya tulisan lingkungan yang bertemakan dampak lingkungan, hukum lingkungan dan konflik lingkungan dimana isinya hampir seragam yaitu tentang aktivitas penambangan dengan segala kompleksitasnya, dari hasil wawancara ditemukan bahwa ternyata ada cara pandang yang berbeda antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan surat kabar (pers) dalam melihat kebijakan pertambangan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bangka, yakni terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

Dari kacamata Pemerintah Kabupaten Bangka Peraturan Daerah No.6 Tahun 2001 dan turunannya dibuat dengan pertimbangan untuk mengakomodir masyarakat yang ingin menambang sehingga perlu diatur dalam suatu bentuk peraturan daerah. Pemerintah beranggapan hal yang wajar dalam suatu kegiatan penambangan akan merubah bentang alam, dalam hal ini pemerintah lebih melihat perda pertambangan yang dibuat justru untuk membantu masyarakat secara ekonomi. Meskipun dalam kenyataannya di lapangan justru terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya penambangan yang dilakukan di kawasan yang jelas-jelas terlarang. Untuk yang satu ini pemerintah sudah melakukan upaya penertiban, meskipun kerap terjadi kucing-kucingan antara aparat dan penambang.

Sementara itu kalangan pers berpendapat sebaliknya, kerusakan lingkungan yang terjadi secara masif di Bangka Belitung berawal ketika dibukanya keran bagi masyarakat untuk turut serta melakukan penambangan yang selama ini hanya bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. Timah.

Pers mensinyalir banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh penambang lebih disebabkan pasir timah secara ekonomi memang lebih

memberikan hasil jangka pendek yang sangat menggiurkan, sehingga upaya untuk mendapatkannya terkadang sudah di luar cara-cara yang benar. Di samping itu persoalan pertambangan ini menjadi sangat kompleks karena melibatkan pemodal-pemodal besar yang kemudian menyediakan alat-alat berat yang jelas-jelas dilarang untuk beroperasi. Tidak cukup sampai di situ bahkan para cukong tersebut memodali penambang-penambang kecil. Tak heran kerap terjadi konflik antara penambang kecil dan penambang besar yang didanai cukong sebagaimana terlihat pada contoh berita yang berjudul Massa Bakar Tujuh Kamp TI (hal 72), terlihat pada gambar tersebut kamp TI yang dibakar pada latar belakangnya terdapat alat berat (*escavator*).

Pers menganggap tidak ada upaya serius dari pemerintah propinsi maupun kabupaten untuk menyelesaikan persoalan lingkungan akibat penambangan yang notabene banyak dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Berkenaan dengan maraknya kegiatan penambangan yang dilakukan di Bangka Belitung sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor. 6 tahun 2001 peneliti melakukan wawancara terhadap para *stakeholders* tentang apresiasi mereka terhadap pengelolaan lingkungan khususnya kebijakan pertambangan yang disinyalir berbagai kalangan sebagai sebab utama persoalan lingkungan di Bangka Belitung.

Berikut ini petikan beberapa hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak, terkait persoalan ini :

Berkenaan dengan Kebijakan, problem lingkungan di Bangka yang paling utama pada aspek kebijakan pertambangan. Di Bangka Pos ditekankan bahwa isu lingkungan harus menjadi prioritas, setiap kebijakan yang menyangkut pertambangan lepas dari pertarungan kekuasaan, kita tetap mengedepankan isu lingkungan tersebut, ini karena lebih bersifat jangka panjang.
(Albana, redaktur pelaksana Harian Pagi Bangka Pos, 5 Juni 2006).

Bangka-Belitung Pos mengalir saja memandang persoalan lingkungan, sifatnya kasuistis, tidak menjadi kebijakan redaksional tapi

lebih melihat trend. *Bangka-Belitung Pos* pernah membuat liputan khusus lingkungan, upaya-upaya pemerintah. *Bangka-Belitung Pos* menulis dalam bentuk headline, tajuk dan sebagainya, porsinya cukup besar karena lingkungan *Bangka-Belitung* sudah menjadi perhatian pemerintah pusat. Secara umum persoalan lingkungan lebih disebabkan pemerintah daerah tidak mampu untuk mengelola lingkungan. (Amar Darmono redaktur Pelaksana *Harian Pagi Bangka-Belitung Pos*, 12 Juni 2006).

Persoalan lingkungan di *Bangka Belitung* belum dikelola secara baik. Persoalan lingkungan yang layak diketahui umum akan kita beritakan apa adanya. Hal ini terkait dengan pers sebagai lembaga kontrol, kita akan selalu lihat kebijakan pemerintah daerah seperti apa. (Kemal, redaktur *Harian Pagi Rakyat Pos*, 15 Juni 2006).

Kebijakan pemerintah pada tingkat aturan sudah bagus, artinya sudah ada usaha. Berkaitan dengan kebijakan tambang inkonvensional sangat sulit karena menyangkut persoalan perut. Kita selalu bertemu pemerintah untuk mencari jalan keluar. LSM tetap memonitor kebijakan pemerintah. Kita tetap mengkritisi dalam bentuk tekanan lewat tulisan. Plantari lebih soft terhadap pemerintah tidak memosisikan sebagai oposisi, tapi lebih kearah kemitraan. (Syafri Yatta, Ketua LSM *Plasma Nutfah Lestari*, 5 Juni 2006).

Menanggapi isu lingkungan di Koran, "bagi yg tidak paham, akan melihat penambangan tersebut merusak lingkungan", padahal memang konsekuensi kegiatan menambang akan merubah bentang alam, namun bagaimana meminimalisasikannya, jadi kita harus bersabar. Bahwa setiap usaha penambangan ada jaminan reklamasi. Yang merusak lingkungan itu yang melarikan diri, dan tidak bertanggung jawab. Sepanjang mereka menambang dengan benar maka sabarlah pasti ada upaya untuk perbaikan lingkungan. Jadi isu lingkungan yang dikoran sebetulnya konteksnya berbeda. Penambangan memang daerah yang dibuka jadi jangan disalahkan penambangannya. Konteksnya adalah kita harus mampu mereklamasi setelah selesai kegiatan menambang. (Noor Nedy, Kadis Pertambangan dan Energi Kab. *Bangka*, 8 Juni 2006).

Bicara lingkungan ada positif-negatif. Misalnya, tambang dikerjakan masyarakat, dampaknya persoalan lingkungan tapi dari ekonomi masyarakat meningkat. Perlu ada regulasi agar masyarakat tidak seenak-naknya. Secara ekonomi tetap ada manfaat. Sekarang dampak yang terjadi tanggung jawab siapa. Kalau diserahkan ke masyarakat tidak akan sanggup. Pertama secara konseptual, tidak mereka miliki. Kedua, persoalan dana. Jadi mau tidak mau tanggung jawab pemerintah. Saya rasa pemerintah bisa melakukan itu dengan dana yang ada. Akibat maraknya tambang inkonvensional saat ini diperlukan pengaturan dan penegakan hukum yang lebih baik. Saya dukung tambang inkonvensional

*karena secara ekonomi bermanfaat bagi masyarakat, secara teknis tidak terlalu berbahaya tidak menimbulkan dampak kimiawi hanya dampak fisik-biologis. Jadi boleh-boleh saja masyarakat menambang, tapi harus tetap dikendalikan, diperlukan aturan-aturan main yang jelas, reklamasi harus dipungut dimana, bukan penambang misalnya tapi di smelter atau eksportir. Jadi saya tetap berfikir positif sepanjang untuk masyarakat. Disamping itu pers juga harus melakukan pengendalian dengan memberikan informasi jika ada yang kurang pas.
(Freddy Asmanto, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.Bangka, 13 Juni 2006).*

*Saya tidak setuju terhadap tambang inkonvensional, ketika belum jadi dewan saya memandang hitam putih, tapi ketika saya tahu ini persoalan perut, saya dapat memaklumi, artinya selama rakyat menambang demi perut silakan. Untuk itu ada toleransi. Tapi kalau sudah skala besar menggunakan alat berat itu jelas tidak boleh.
(Kurtis, Anggota Komisi C DPRD Kab. Bangka, 6 Juni 2006).*

Keterangan diatas menunjukkan bagaimana berbedanya cara pandang *stakeholders* menyikapi persoalan lingkungan khususnya kebijakan pertambangan. Jadi jelas sekali akan selalu ada polemik terhadap kegiatan pertambangan yang ada di Bangka Belitung. Dalam hal ini pers tentunya menangkap sinyal tersebut, sehingga topik-topik lingkungan yang banyak bermuatan dampak lingkungan sebagai akibat lahirnya kebijakan pertambangan akan selalu menjadi topik hangat dan menarik untuk diulas. Dalam konteks inilah terlihat jelas bagaimana interelasi antara pemberitaan lingkungan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan.

Hasil wawancara juga mendapatkan keterangan bahwa pers telah menjadi forum kritik dan kesepakatan bagi publik (*public sphere*) sebagaimana disebutkan Kovach & Rosenstiel dalam (Santana, 2005). Jurnalisme tidak saja memiliki kewajiban memberikan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan masyarakat tetapi juga memberikan sebuah forum untuk membangun ikatan yang mengembangkan masyarakat, demikian menurut Kovach & Rosenstiel.

Jadi jelas persepsi yang berbeda dalam memandang kebijakan pertambangan antara para *stakeholders* di Kabupaten Bangka akan

terkanalisis oleh media dengan menciptakan ruang publik (*public sphere*) bagi pihak berkepentingan untuk melakukan kompromi guna mencari solusi yang paling tepat berkenaan dengan pertambangan dan lingkungan secara umum.

Selanjutnya implikasi pemberitaan lingkungan terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di kabupaten Bangka ditinjau dengan cara menganalisis isi berita menggunakan tabulasi silang antara kategori nara sumber berita dengan kategori tahap kebijakan. Dari sini dapat dilihat sejauh mana sesungguhnya surat kabar mewarnai proses kebijakan dan siapa yang paling sering menjadi nara sumber dalam proses tersebut. Kemudian pada tahap-tahap mana pernyataan mereka terlibat.

Secara prinsip ketika kebijakan diterjemahkan dalam program atau proyek kemudian dilanjutkan dengan aksi atau tindakan konkrit sehingga terlihat konsekuensinya dalam bentuk efek atau dampak, rasanya surat kabar atau pers akan selalu terlibat di dalamnya. Berikut hasil tabulasi silang antara kategori nara sumber berita dan tahap kebijakan yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.4.2.
Sebaran Persentase Jumlah Pemberitaan Lingkungan
Berdasarkan Nara Sumber Berita dengan Substansi Isi Tahap Kebijakan

Nara Sumber		Tahap Kebijakan					Total
		Penyusunan	Formulasi	Adopsi	Implementasi	Evaluasi	
Birokrat	Count	11	2	3	33	4	53
	% Nara Sumber	20,8	3,8	5,7	62,3	7,5	100,0
	% Tahap Kebijakan	15,5	33,3	100,0	67,3	30,8	37,3
Intelektual	Count	1	0	0	0	1	2
	% Nara Sumber	50,0	,0	,0	,0	50,0	100,0
	% Tahap Kebijakan	1,4	,0	,0	,0	7,7	1,4
Politisi	Count	9	2	0	2	0	13
	% Nara Sumber	69,2	15,4	,0	15,4	,0	100,0
	% Tahap Kebijakan	12,7	33,3	,0	4,1	,0	9,2
Ormas/ LSM	Count	1	0	0	1	2	4
	% Nara Sumber	25,0	,0	,0	25,0	50,0	100,0
	% Tahap Kebijakan	1,4	,0	,0	2,0	15,4	2,8
TNI/Polri	Count	3	0	0	1	1	5
	% Nara Sumber	60,0	,0	,0	20,0	20,0	100,0
	% Tahap Kebijakan	4,2	,0	,0	2,0	7,7	3,5
Masyarakat	Count	15	2	0	3	3	23
	% Nara Sumber	65,2	8,7	,0	13,0	13,0	100,0
	% Tahap Kebijakan	21,1	33,3	,0	6,1	23,1	16,2
Swasta	Count	7	0	0	0	0	7
	% Nara Sumber	100,0	,0	,0	,0	,0	100,0
	% Tahap Kebijakan	9,9	,0	,0	,0	,0	4,9
Wartawan	Count	24	0	0	9	2	35
	% Nara Sumber	68,6	,0	,0	25,7	5,7	100,0
	% Tahap Kebijakan	33,8	,0	,0	18,4	15,4	24,6
Total	Count	71	6	3	49	13	142
	% Nara Sumber	50,0	4,2	2,1	34,5	9,2	100,0
	% Tahap Kebijakan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Data hasil olahan

Dari tabel di atas terlihat secara umum persentase berita lingkungan yang ditulis surat kabar yang ada di Bangka Belitung dilihat dari substansi isi yang terkandung sebesar 50% keterangan dari nara sumber berhubungan dengan tahap penyusunan agenda kebijakan. Ini menandakan pemberitaan yang ditulis oleh surat kabar paling sering berkenaan dengan tuntutan-tuntutan kebijakan sebagai *input* untuk tahap

penyusunan agenda kebijakan. Yang lebih menarik, wartawan merupakan nara sumber terbesar yakni sejumlah 33,8% dalam hal memberikan masukan untuk tahap penyusunan agenda kebijakan. Dari hasil pengamatan ditemukan metode penyampaian yang disukai wartawan untuk menggambarkan persoalan lingkungan dikemas dalam bentuk foto.

Foto jelas memiliki daya tarik visual yang kuat dan melukiskan peristiwa nyata karena foto lebih bisa bercerita tentang kondisi sesungguhnya dari suatu peristiwa (Santana, 2005). Hal ini jelas menunjukkan bahwa wartawan ingin memberikan masukan apa adanya yang terjadi tentang sesuatu hal, dan ini merupakan bagian dari fungsi kontrolnya. Selain berbentuk foto ketika menuliskan gagasan ataupun masukan pada tahap penyusunan agenda ini wartawan juga menggunakan rubrik-rubrik lain seperti tajuk, pojok, dan karikatur. Penggunaan berbagai jenis rubrik dalam tulisan dibarengi dengan teknik penulisan mendalam tentu akan dirasakan lebih baik guna membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan lingkungan, sehingga dengan demikian mereka akan terdorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Setelah wartawan, masyarakat menduduki urutan kedua sebagai nara sumber dalam tahap penyusunan agenda kebijakan yakni sebesar 21,1%. Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa masyarakat mulai peduli dengan persoalan-persoalan lingkungan, hal ini terbukti ketika terjadi persoalan lingkungan disekitarnya dan mereka merasa hal itu perlu diketahui oleh pemerintah, masyarakat menghubungi pers untuk mengekspos persoalan tersebut dengan harapan mendapat tanggapan dari yang berwenang.

Berikut ini contoh berita dimana masyarakat menjadi nara sumber yang isi beritanya berkenaan dengan masukan untuk tahap penyusunan agenda yang ditulis Bangka-Belitung Pos tanggal 30 Agustus 2005 halaman 2.

TI di Hutan Bakau Dituntut Warga

Tambang Inkonvensional illegal kembali jadi masalah, kali ini giliran warga desa Penyamun Kecamatan Bakam yang menuntut dihentikannya aktivitas TI illegal di kawasan hutan bakau Slang Penyamun. Tuntutan tersebut disampaikan salah seorang anggota Badan Perwakilan Desa Penyamun, Yulhadi ke komisi C DPRD Bangka, Senin (29/8) kemarin.

Kepada wartawan Yulhadi mengakui, dirinya mewakili warga desa Penyamun meminta perhatian pemkab dan DPRD untuk segera menghentikan aktivitas TI milik M.Rudi warga setempat.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap pemerintah berikut petikan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.

Peran masyarakat, pers, LSM sangat dibutuhkan untuk mengontrol pemerintahan dan pemerintah harus siap. Kritik masyarakat adalah bagian dari pembangunan, bagian dari keberlanjutan kebijakan. Kebijakan itu terus berubah seiring perubahan waktu dan dalam perubahan ini tentunya harus selalu dimonitor masyarakat, pers, LSM. Ambil contoh lahirnya Perda 6/2001 dan SIUJP itu sebetulnya untuk mengakomodir masyarakat kecil yang ingin menambang. Karena itu masyarakat selalu diajak diskusi. Materi-materi yang dimasukkan mereka akan diakomodir. Ruang dan wacana untuk merubah aturan itu terus dihidupkan sesuai tuntutan perubahan.

(Noor Nedy, Kadis Pertambangan dan Energi Kab.Bangka, 8 Juni 2006)

Kebutuhan akan hubungan kita dengan masyarakat sangat kuat misalnya pada program adipura. Partisipasi forum kota yang ada di Sungailiat sangat baik dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat disamping pers. Hubungan kami dengan forum kota sangat erat. Ke depan kami akan buat program bersama. Hal-hal yang tadinya dikuasai pemerintah itu nantinya semakin kecil dan kita harus menjadikan masyarakat yang punya inisiatif. Dalam hal ini lembaga-lembaga masyarakatlah yang diharapkan menjadi perantara pemerintah dengan masyarakat luas. Sejak awal kami sudah buat kemitraan. Dengan demikian kami memiliki media untuk bicara pada masyarakat luas, apakah itu wartawan, LSM yang dapat berbicara dalam bahasa mereka, nanti hasilnya kita respon. Yang terpenting ada interaksi secara dialogis sehingga masyarakat merasa diayomi.

(Freddy Asmanto, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.Bangka, 13 Juni 2006).

Sementara itu di urutan kedua sebesar 34,5% keterangan nara sumber berhubungan dengan tahap implementasi kebijakan. Adapun nara sumber yang paling dominan dalam tahap implementasi kebijakan ini adalah birokrat yakni 67,3%, disusul oleh wartawan sebesar 18,4%. Hal ini menunjukkan bahwa berita-berita yang ditulis wartawan merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berikut ini contoh berita dimana birokrat menjadi nara sumber yang isi beritanya berkenaan dengan tahap implementasi kebijakan yang ditulis Bangka-Belitung Pos tanggal 25 Nopember 2005 halaman 5.

46 Bidan Ikuti Pelatihan Kesehatan Lingkungan

Para bidan yang bertugas di daerah-daerah se-Kabupaten Bangka, tidak saja dituntut bisa memberi pengobatan pada masyarakat. Mereka juga harus bisa memberi contoh mengenai lingkungan hidup yang sehat kepada masyarakat. Untuk itu para bidan diberikan pelatihan tentang pengetahuan dasar-dasar kesehatan lingkungan. Dengan lingkungan hidup yang sehat maka masyarakat pun jadi sehat.

Ini dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, dr. Hendra Kesuma Jaya di hadapan bidan-bidan yang mengikuti latihan dasar-dasar kesehatan lingkungan, kemarin di wisma Pemkab Bangka.

Berkenaan dengan nara sumber dalam implementasi kebijakan yang diliput oleh surat kabar ini ada beberapa keterangan yang sejalan dari hasil wawancara dengan pihak eksekutif sebagai berikut :

Pers adalah unsur penekan dan pengawas kinerja pemerintah juga bersifat informatif terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pers menjadi salah satu tolok ukur kita bekerja. Bagi saya pers positif dalam arti membuka wacana masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang ada. Sehingga masyarakat tahu, pemerintah juga tahu, dan bagi pemerintah walaupun ada kritikan bisa jadi tahu apa yang harus dilakukan, sedangkan bagi masyarakat juga tahu tahu program pemerintah sehingga saling memahami,

(Freddy Asmanto, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.Bangka, 13 Juni 2006).

Distamben tetap merespon isu lingkungan di media dengan cara rapat staf dan turun ke lapangan, keputusannya disesuaikan dengan hasil lapangan. Karena itu media merupakan bagian/mitra dari kontrol

masyarakat untuk perbaikan. Media punya peran mempengaruhi kebijakan. Kitapun menggunakan pers untuk sosialisasi. Jadi isu yang disampaikan pers akan kita respon dan disampaikan kembali kepada pers untuk diekspos kembali.
(Noor Nedy, Kadis Pertambangan dan Energi Kab.Bangka, 8 Juni 2006).

Berkenaan dengan *Good Journalism* Leonard Downie dan Robert G. Kaiser dalam Santana (2005), mengatakan bahwa jurnalistik yang baik itu manakala kegiatan dan produknya dapat mengajak kebersamaan masyarakat di saat krisis. Artinya berbagai informasi dan gambaran krisis atas suatu peristiwa yang disampaikan kepada masyarakat dimaksudkan agar menjadi pengalaman bersama. Ketika sebuah kejadian yang merugikan masyarakat terjadi, sebuah media memberi sesuatu yang dapat dipegang oleh masyarakat. Sesuatu itu adalah fakta-fakta, juga penjelasan dan ruang diskusi, yang dapat menolong banyak orang menghadapi kejadian tak terduga. Dalam hal ini masyarakat diajak untuk agresif pada sesuatu hal penting yang terjadi. Pemberitaan lingkungan menyelamatkan kehidupan rakyat, demikian Downie dan Kaiser.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dengan konsep *Good Environmental Governance* yang mengedepankan 10 hal yakni : visi strategis, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, partisipasi, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme sebagaimana disebutkan Santosa (2006), maka media dan pemerintah memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan (Suranto, 2005). Hubungan media dan *Good Governance* menjadi penting mengingat proses pengambilan keputusan pemerintah tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi masyarakat, dan media menjadi wahana informasi untuk memuat aspirasi masyarakat sekaligus memungkinkan terjadinya transparansi atas berbagai keputusan yang akan diambil pemerintah maupun informasi mengenai keputusan itu sendiri, termasuk mengenai kebijakan pemerintah.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa surat kabar yang ada di Bangka Belitung telah memainkan peran yakni sebagai media informasi dan alat kontrol sekaligus membuka ruang bagi berbagai komponen untuk berinteraksi dalam rangka pengelolaan lingkungan sebagaimana fungsi yang dimilikinya. Bahwa media massa memiliki tiga misi utama di bidang lingkungan pernah diungkapkan oleh Atmakusumah (1996) yakni : menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah lingkungan, merupakan wahana pendidikan bagi masyarakat untuk menyadari perannya dalam mengelola lingkungan hidup, dan mengoreksi sekaligus mengontrol masalah pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan lingkungan yang dilakukan oleh surat kabar di Bangka Belitung meskipun belum optimal tapi setidaknya sudah menjalankan perannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial”.

Pers dalam hal ini surat kabar telah memenuhi hak masyarakat atas informasi lingkungan sesuai pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Juga pasal 14 ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

Dari perspektif lingkungan, dengan terbukanya ruang publik oleh pers tentu akan mempermudah masyarakat memenuhi haknya memperoleh informasi lingkungan dan berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tersebut berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak

atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup". Lebih lanjut dalam penjelasan pasal dan ayat dikatakan bahwa hak atas informasi lingkungan merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan yang baik dan sehat.

Fungsi yang dijalankan oleh media dalam konteks Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup tentunya dapat menjadi pengawal terhadap pelaksanaan Pasal 10 tentang kewajiban pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahulu, maka dalam Studi Analisis Isi Pemberitaan Media Massa tentang Lingkungan Hidup Implikasinya terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bangka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut :

5.1.1. Profil dan Isi Pemberitaan Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi pemberitaan lingkungan hidup di surat kabar dapat dilihat dari rubrikasi penyajian berita lingkungan hidup, nara sumber berita, jumlah nara sumber, kecenderungan isi berita, dan tema berita. Selain itu juga dapat dilihat dari ukuran kolom yang disediakan surat kabar untuk menyajikan pemberitaan lingkungan.

Berdasarkan intensitas pemberitaan sepanjang tahun 2005, Bangka Pos paling intensif memuat isu dan masalah lingkungan di banding Bangka-Belitung Pos dan Rakyat Pos. Dari dimensi tata letak untuk kategori rubrikasi penyajian berita diketahui bahwa Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos, lebih banyak menyajikan pemberitaan lingkungan hidup dalam rubrik artikel berita, disusul rubrik foto. Hal tersebut paralel dengan ukuran kolom yang paling sering dipakai ketiga surat kabar yakni kolom-kolom kecil dibawah 75 Cm/kolom. Kolom-kolom tersebut biasanya dipakai untuk berita-berita biasa berjenis *hard news* yang penempatannya pada kolom-kolom kecil seperti artikel berita.

Pada aspek teknik penulisan, Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos secara bersamaan cenderung menggunakan teknik *straight news* yaitu penulisan yang hanya memenuhi unsur suatu berita yakni *what, who, where, why, when, how* (5W+1H). Format berita yang

hanya memenuhi unsur 5W+1H mengindikasikan penulisan berita yang kurang mendalam, hanya cenderung menampilkan fakta di lapangan apa adanya tanpa dilengkapi dengan ulasan lengkap.

Berdasarkan sumber berita, Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos memiliki kecenderungan menggunakan nara sumber tunggal dalam tulisannya. Yang paling sering dijadikan nara sumber oleh ketiga surat kabar adalah birokrat disusul wartawan dan masyarakat. Dijadikannya birokrat sebagai nara sumber utama dalam suatu tulisan menjelaskan hubungan pers dan pemerintah dalam kerangka mencari dan membuat berita bukanlah hubungan sepihak melainkan senantiasa timbal balik antara dua pihak.

Pada aspek tema berita, isu-isu dan permasalahan yang sering dimunculkan Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos adalah isu-isu dampak lingkungan diikuti isu hukum lingkungan dan isu kebijakan lingkungan. Sementara itu isu pendidikan lingkungan, konflik lingkungan dan partisipasi lingkungan jarang muncul. Dari isu-isu tadi diketahui bahwa permasalahan aktifitas penambanganlah yang menjadi perhatian publik di Kabupaten Bangka.

Berdasarkan substansi isi, berita-berita yang dimunculkan ketiga surat kabar cenderung berita-berita yang sifatnya merupakan kritik dan masukan kepada pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai tuntutan kebijakan untuk tahap penyusunan agenda. Selanjutnya berita-berita yang bersifat menginformasikan implementasi kegiatan pemerintah.

Dari beberapa hal di atas dapat dijelaskan bahwa Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos dan Rakyat Pos telah menjalankan peran untuk memenuhi hak atas informasi lingkungan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup", namun masih belum optimal. Artinya berita-berita yang disajikan hanya bersifat informatif untuk sekedar

diketahui. Padahal penulisan berita yang hanya mengungkapkan kenyataan kerusakan lingkungan kurang dapat menggerakkan penghayatan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

5.1.2. Intensitas dan kualitas pemberitaan Isu Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos sangat tertarik dengan isu-isu lingkungan yang bertemakan dampak lingkungan. Tulisan-tulisan ini mendominasi berita-berita yang ditulis Bangka Pos dan Bangka-Belitung Pos. Sementara itu Rakyat Pos lebih menyukai berita lingkungan bertema kebijakan lingkungan. Pada urutan kedua berita lingkungan yang paling sering muncul adalah yang bertemakan hukum lingkungan.

Secara umum berita yang mengangkat isu dampak lingkungan menunjukkan trend paling diminati oleh surat kabar. Berita-berita yang termasuk klasifikasi tersebut misalnya masalah-masalah banjir, pencemaran air akibat aktivitas penambangan, kecelakaan kerja di pertambangan, kerusakan pantai oleh kegiatan penambangan di laut, kerusakan hutan bakau, berjangkitnya malaria dan sebagainya.

Dari tema-tema yang diangkat oleh surat kabar yang didominasi isu-isu dampak lingkungan, hukum lingkungan dan kebijakan lingkungan, dapat diketahui bahwa permasalahan-permasalahan lingkungan khas yang ada di Bangka Belitung adalah seputar aktifitas penambangan dengan segala kompleksitasnya. Perhatian surat kabar terhadap eksekusi dari kegiatan penambangan ini setidaknya merupakan wujud keprihatinan dan sekaligus merupakan bagian dari koreksi atau masukan pers terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka, dan hal ini sudah sejalan dengan fungsi pers sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor.40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 6 poin (d)

yakni “Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”.

Secara umum dari aspek kualitas, pemberitaan lingkungan oleh surat kabar masih belum optimal. Artinya berita-berita yang disajikan hanya bersifat informatif untuk sekedar diketahui. Penulisan berita yang hanya mengungkapkan kenyataan kerusakan lingkungan kurang dapat menggerakkan penghayatan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

5.1.3. Implikasi Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berita-berita lingkungan yang ditulis surat kabar Bangka Pos, Bangka-Belitung Pos, dan Rakyat Pos merupakan tulisan-tulisan yang bersifat menginformasikan kejadian faktual tentang lingkungan yang dijadikan sebagai bahan masukan (*input*) untuk tahap penyusunan agenda kebijakan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa surat kabar selain telah menjalankan fungsi informasinya sekaligus juga menjalankan fungsi kontrol dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Hal-hal yang ditulis surat kabar tentang persoalan lingkungan dapat dikatakan telah sesuai dengan perannya, lebih khusus lagi dalam menyampaikan masukan (*input*) atau tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*) kepada pemerintah, terutama di bidang lingkungan. Hal ini sejalan dengan beberapa keterangan yang didapat dari hasil wawancara dengan redaktur surat kabar, Lembaga Swadaya Masyarakat dan para pengambil kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan lingkungan.

Kemudian antara pers dengan pengambil kebijakan dalam hal ini telah terjadi *simbiosis mutualisme*. Pada satu sisi pers telah menjalankan perannya sebagai fungsi informatif sekaligus fungsi kontrol. Pada sisi lain pengambil kebijakan selain membutuhkan informasi dari pers untuk mendukung pekerjaannya juga percaya bahwa pers dapat menyebar

luaskan kebijakan yang mereka buat, apakah itu bentuknya sosialisasi terhadap program-program pemerintah, tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Bahkan pers atau surat kabar juga digunakan untuk memonitor jalannya kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Hal yang paling penting adalah pers telah menyediakan ruang publik (*public sphere*) bagi *stakeholders* untuk berinteraksi lewat media dalam rangka menghasilkan kompromi-kompromi untuk persoalan publik.

Berkaitan dengan banyaknya tulisan lingkungan yang bertemakan isu dampak lingkungan, hukum lingkungan dan konflik lingkungan yang isinya hampir seragam yaitu tentang permasalahan aktifitas penambangan dengan segala kompleksitasnya, ditemukan bahwa ternyata ada cara pandang yang berbeda antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pers dalam melihat kebijakan pertambangan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bangka.

Pemerintah Kabupaten Bangka memandang bahwa kebijakan pertambangan yang mereka buat semata-mata untuk mengakomodir keinginan masyarakat, dan ini dianggap sebagai bagian dari respon pemerintah atas aspirasi masyarakat. Sedangkan kalangan pers berpendapat sebaliknya, kerusakan lingkungan yang terjadi secara masif di Bangka Belitung berawal dari adanya kebijakan pertambangan tersebut. Sementara itu kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat sendiri tampak tidak mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Meskipun demikian mereka cukup aktif menyuarakan tuntutan lingkungan melalui surat kabar.

Dari berbagai perbedaan cara pandang dalam menyikapi persoalan lingkungan khususnya kebijakan pertambangan, jelas sekali akan selalu ada polemik terhadap kegiatan pertambangan di Bangka Belitung. Pers tentunya menangkap sinyal tersebut, sehingga topik-topik lingkungan yang terkait kebijakan pertambangan akan selalu menjadi topik hangat dan menarik untuk diulas, di samping itu ruang publik di

mediapun selalu tersedia bagi para *stakeholders* untuk berinteraksi dalam rangka pengelolaan lingkungan.

Dari beberapa keterangan di atas terlihat bagaimana Implikasi pemberitaan terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan. Pada aspek kontrol sosial media telah menyampaikan kritik-kritik sekaligus masukan dan tuntutan kebijakan berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bangka termasuk membuka ruang bagi publik (*public sphere*) untuk berpartisipasi. Tidak hanya itu terkait aspek kontrol sosial ini, beberapa pelanggaran terhadap peraturan daerah bidang lingkungan telah pula mendapat tindakan, mulai dari evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan penambang, penghentian terhadap kegiatan usaha, sampai pada penegakan hukum melalui pengadilan. Pada aspek kebijakan implikasi pemberitaan lingkungan ternyata terlihat pada semakin terbukanya pemerintah sehingga transparansi dan partisipasi menjadi semakin kondusif yang pada gilirannya akan menciptakan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini terlihat dari perbaikan perencanaan pengelolaan lingkungan, di mana pengambil kebijakan semakin responsif terhadap masukan pers dalam hal pengelolaan lingkungan. Partisipasi masyarakat semakin mendapatkan ruang khususnya dalam pembahasan rencana kebijakan.

Dari aspek media sendiri, semakin kompleksnya persoalan lingkungan di Kabupaten Bangka, implikasinya media semakin meningkatkan kapasitasnya untuk memberitakan isu-isu dan permasalahan lingkungan yang terjadi di lapangan dalam tempo cepat. Hal ini terlihat dari intensitas berita lingkungan yang hampir setiap bulan muncul dalam pemberitaan media.

Keterkaitan atau interelasi antara komunikasi lingkungan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan telah sejalan dengan fungsinya. Dalam konteks Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup tentunya media dapat menjadi pengawal terhadap pelaksanaan

Pasal 10 tentang kewajiban pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

5.2. Saran-Saran

1. Mengingat kompleksnya persoalan lingkungan yang ada saat ini di Bangka Belitung, sudah selayaknyalah semua pihak mengambil peran dalam suatu keterpaduan untuk memecahkan persoalan kerusakan lingkungan, khususnya akibat kegiatan penambangan tak bertanggung jawab. Dalam konteks ini para pemimpin redaksi surat kabar hendaknya lebih mengoptimalkan perannya. Terutama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah lingkungan, membuka ruang pembelajaran bagi masyarakat untuk menyadari perannya dalam mengelola lingkungan hidup, dan lebih aktif lagi mengoreksi dan mengontrol masalah pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu bentuk optimalisasi peran tersebut redaksi bisa mengadakan rubrik khusus lingkungan di dalam surat kabarnya. Hal tersebut dalam rangka memfasilitasi *stakeholders* untuk berinteraksi secara khusus untuk *sharing* mengenai topik-topik lingkungan
2. Mengingat masih lemahnya sumberdaya manusia pers terutama di bidang lingkungan, diharapkan beberapa wartawan yang memiliki minat terhadap lingkungan dididik secara khusus untuk mendalami masalah lingkungan sekaligus mempertajam intuisi jurnalistiknya di bidang lingkungan (*capacity Building*) melalui pelatihan-pelatihan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan ataupun institusi-institusi yang bergerak di bidang lingkungan.
3. Pemerintah Kabupaten Bangka dalam hal ini harus responsif terhadap masukan-masukan ataupun kritikan-kritikan berkenaan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan dan harus senantiasa membuka akses bagi seluruh *stakeholders* khususnya dalam rangka pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan kepentingan publik

khususnya di bidang lingkungan. Untuk itu agar regulasi yang dibuat dapat menjawab tantangan dan persoalan lingkungan yang ada harus disiapkan sumber daya manusia yang betul-betul memiliki kompetensi, kelembagaan yang kuat, dan dukungan anggaran yang memadai.

4. Pemerintah harus konsisten memelihara dan menegakkan aturan-aturan sesuai hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas harus selalu dijaga dalam mengambil suatu kebijakan publik, dan yang terpenting senantiasa menumbuhkan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan.
5. Semua pihak harus menyadari bahwa peran dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa hanya ditimpakan di pundak satu institusi atau orang per orang saja. Semua pihak sangat berkepentingan dengan lingkungan hidup, oleh sebab itu sudah selayaknya ikut andil dalam pengelolaan lingkungan hidup apapun bentuknya. Tentunya dengan kadar dan porsi masing-masing.
6. Penelitian lingkungan menggunakan perspektif komunikasi dalam tulisan ini masih penuh dengan keterbatasan. Untuk melihat seberapa jauh interelasi pemberitaan lingkungan oleh surat kabar terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangka tentunya tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan dalam penelitian ini. Akan lebih baik apabila dilakukan penelitian lanjutan menggunakan pendekatan yang lebih pas dengan melibatkan variabel yang lebih lengkap untuk melihat sejauhmana berita mempengaruhi sikap para pengambil kebijakan dalam konteks pengelolaan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar,A.N.,1993.Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup.Gadjahmada University Press,Yogyakarta.
- Assegaff,D.H.,1996.Jurnalistik Masa Kini: Pengantar ke Praktek Kewartawanan Indonesia.Ghalia Indonesia,Jakarta.
- Atmakusumah.,dkk.,1996.Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa.Lembaga Pers Dr.Sutomo dan Yayasan Obor Indonesia,Jakarta.
- Badjuri,Abdulkahar.,Yuwono,Teguh.,2003.Kebijakan Publik Konsep dan Strategi,Universitas Diponegoro,Semarang.
- Bulaeng,Andy.,2004. Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer.Andi,Yogyakarta.
- Cunningham.,etall.,2005.*Environmental Science, A Global Concern,Eighth Edition*,Mc Graw Hill,New York.
- Devito,Joseph.,1996.Komunikasi Antar Manusia, Edisi 5 (alih bahasa Maulana A).Harper Collin Publisher,New York.
- Djunaedi, Achmad.,2000, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian di Tingkat Program Pascasarjana,*download* dari internet (17-05-2006, Pk. 20:13).
- Effendi, O.U.,1993.Dinamika Komunikasi.Remaja Rosdakarya,Bandung.
- Fluornoy,D.M.,1989.Analisa Isi Surat Kabar-Surat Kabar Indonesia.Gadjamada University Press,Yogyakarta.
- Hadi,P.Sudharto.,2001. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Gadjamada University Press,Yogyakarta.
- .,2002. Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan,Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang.
- .,2002.Lingkungan Makin Buruk Karena Tidak Didukung Pemerintahan Yang Baik. Bahan Refleksi Akhir Tahun Pada Forum Diskusi Intelektual UNDIP, Semarang,27 Desember 2002.
- .,1999.Peranserta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.PPLH Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro.Disampaikan pada Seminar Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.Diselenggarakan oleh Bapedal.Jakarta 3 – 4 Pebuari 1999.
- Hannigan,A.John.,1995. *Environmental Sociology, A Social Constructionist Perspective*,Routledge,London and New York.
- Hardjasoemantri, Koesnadi.,2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjahmada University Press,Yogyakarta.

- Holsti,R., 1969. *Content Analysis for Social Science and Humanities*.Addison Westly Publishing Company,Massachussets.
- Jahi,Amri.,1993.Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia Ketiga.Gramedia,Jakarta.
- Kelle,Udo.,2001.*Sociological Explanation Between Micro and Macro and the Integration of Qualitative and Quantitative Methods*.On-line Journal:Forum Qualitative Social Research.Vol 2 No. 1.Febuari 2001 at <http://qualitative-research.net/fgs>.
- Kerlinger, F.N.,1973.*Foundation of Behavioral Research*.Halt Rinehart &Winston Inc.,New York.
- Liebrand, W.B.G.,et all.,1992.*Social Dilemma Theoretical Issues and Research Findings*.Pergamon Press, New York.
- Litbang Kompas, Sentra Media.,2003.Laporan Penelitian Pola Pemberitaan Media Terhadap Konflik Di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD),Fisip Undip,Semarang
- Malik,Ichsan, dkk.,2003.Menyeimbangkan Kekuatan, Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam, Yayasan Kemala, Jakarta.
- Messick, D.M.,Brewer,M.B.,1983.*Solving Social Dilemmas:a Review*.In *Review of Personality and Social Psychology* 4.11-44.
- McQuail,Denis.,1989.Teori Komunikasi Massa.Erlangga,Jakarta.
- Mitchell,Bruce., dkk.,2003. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan.Gajah Mada University Press,Yogyakarta.
- Nuryadi,M.,2003.Analisis Isi Dari Informasi Lingkungan Hidup di Beberapa Surat Kabar,Studi Kasus:Surat Kabar Kompas,Koran Tempo,dan Sinar Harapan.PSIL-PPS UI,Jakarta.
- Oetama,Jakob.,1989.Perspektif Pers Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES),Jakarta.
- Purnaweni,Hartuti.,2004. Implementasi Kebijakan Lingkungan di Indonesia:Hambatandan Tuntutan."Dialogue"JI AKP,Vol.1,N0.3.500-512.
- Rachmadi, F.,1989.Perbandingan Sistem Pers.Gramedia, Jakarta.
- Rakhmat,Jalaluddin.,1991.Metode Penelitian Komunikasi.Remaja Rosdakarya,Bandung.
- Riduwan.,2004.Metode dan Teknik Menyusun Tesis,Alfabeta,Bandung.
- Santana,Septiawan,K.,2005.Jurnalisme Kontemporer,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- ,2004.Jurnalisme Investigasi,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Santosa,Edi.,2006. Kerangka Kelembagaan dan Keterpaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah. Bahan Pelatihan Dasar-dasar Pengelolaan SDA dan Lingkungan Wilayah Pesisir Pulau Batam.
- SKEPHI,1995.Analisis Isi Media Massa Lokal dan Nasional:Delapan Perusahaan Perusak Lingkungan dan Anatomi Masalah Lingkungan Hidup.Biro Penerbitan Seri Lingkungan Hidup SKEPHI,Jakarta.
- Soemarwotto,Otto.,1991.Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan.Penerbit Djambatan,Jakarta.
- ,1994.Masalah Lingkungan Nasional Dan Global, Sebuah Ikhtiar Membangun Tanpa Merusak Lingkungan. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup,Jakarta.
- Soerjani,M.,1997.Pembangunan dan Lingkungan,Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development.Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan,Jakarta.
- ,2000.Kepedulian Masa Depan, Laporan Komisi Mandiri Kependudukan dan Kualitas Hidup,Agenda Radikal Menuju Perubahan Positif, IPPL, Jakarta.
- Staats,H.J.,et all.,1996.*Communicating the Grennhouse Effect to Public:Evaluation of a Mass Media Campaign from a Social Dilemma Perspective*.Journal of Environmental Management 45,198-203.
- Subiakto,Henry.,2000.Obyektifitas Pemberitaan Pers Nasional.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Surabaya,diakses melalui <http://adln.lib.unair.ac.id/>.
- Sumadiria,Haris.,2005.Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalistik Profesional,Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Suranto,Hanif,dkk.,2005.Media Sadar Publik, *Open Society Institute* (OSI) dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta.
- Suwardi,H.,1993.Peranan Pers dalam Politik di Indonesia.Pustaka Sinar Harapan,Jakarta.
- Szszzynsi,B.,1991.*Environmentalism,the Mass Media and Public Opinion*.Lancaster University,UK.
- Tangkilisan,S.N.Hessel.,2004.Kebijakan dan Manajemen Lingkungan Hidup.YPAPI,Yogyakarta.
- Thoha, Miftah,2002.Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara.PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta.
- Winarno,Budi.,2005.Teori dan Proses Kebijakan Publik.Media Pressindo,Jakarta

Dokumen-dokumen :

UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kompas, 2005.Isu Lingkungan Kabur, Evaluasi Akhir Tahun Bidang Lingkungan, Desember.

Kompas, 2006.Simalakama Pertambangan Rakyat, Oktober.

WAWANCARA :

Wawancara dengan Albana, di Pangkalpinang pada 05 Juni 2006.

Wawancara dengan Ir.Syafril Yatta, di Pangkalpinang pada 05 Juni 2006.

Wawancara dengan Kurtis,S.Si, di Sungailiat pada 06 Juni 2006.

Wawancara dengan Ir.Noor Nedy,M.Si, di Sungailiat pada 08 Juni 2006.

Wawancara dengan A. Darmono,di Pangkalpinang pada 12 Juni 2006.

Wawancara dengan Ir.Fredy Asmanto Harirarti. M.Si, di Sungailiat pada 13 Juni 2006.

Wawancara dengan Kemal, di Pangkalpinang pada 15 Juni 2006.